



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021**



Maret, 2022

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanjungpinang, 22 Maret 2022





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan atas capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima RPJMD Tahun 2016-2021. Laporan kinerja ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

Laporan kinerja disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara optimal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya mengumpulkan berbagai data kinerja untuk disajikan dalam laporan kinerja ini agar dapat menguraikan informasi kinerja yang objektif dan dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.



Akhirnya, saya berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	xi
Daftar Gambar	xii
Ikhtisar Eksekutif	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2
1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis	3
1.4 Gambaran Umum Demografi	6
1.4.1 Jumlah Penduduk	6
1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi	9
1.4.3 PDRB Per Kapita	10
1.4.4 Persentase Penduduk Miskin	11
1.5 Tugas dan Struktur Organisasi	12
Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	12
1.6 Kondisi Pegawai	14
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A Rencana Strategis	17
Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	17
Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	19
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	20
B Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
III.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	29
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
1 Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Kekayaan Budaya Daerah	33
2 Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	45
3 Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi	53
4 Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih	62



5	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	68
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	78
7	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja	88
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	101
9	Angka Kemiskinan Menurun	108
10	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	123
11	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan	135
12	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	141
13	Meningkatnya Realisasi Investasi dan Daya Saing Koperasi dan UKM	154
14	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	163
15	Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan,	168
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	175
BAB IV	PENUTUP	204
1	Aspek Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	205
2	Aspek Pelayanan Umum	205
3	Aspek Daya Saing Daerah	205

Lampiran :

- I Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
- II Daftar Penghargaan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau	3
Tabel 1.2	Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	7
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021	8
Tabel 1.5	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	27
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	32
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Meningkatnya Kelestarian Nilai-nilai Budaya Melayu sebagai Kekayaan Budaya Daerah	35
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Persentase Bangunan Yang Berciri Khas Melayu Tahun 2016-2021	36
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD	36
Tabel 3.5	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu se Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2021	40
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik Tahun 2021	45
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir RPJMD	45
Tabel 3.8	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Provinsi Berkondisi Baik dari Tahun 2016-2021	46
Tabel 3.9	Evaluasi Jalan Berkondisi Baik Pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri	47
Tabel 3.10	Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021	49
Tabel 3.11	Perbandingan Persentase Pertambahan Panjang Jalan Berkondisi Baik Terhadap Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021	52
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi Tahun 2021	54
Tabel 3.13	Evaluasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pelabuhan Laut Tahun 2017-2021	54



Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD	55
Tabel 3.15	Evaluasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pelabuhan Laut Tahun 2020-2021	54
Tabel 3.16	Pelabuhan Laut se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	57
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja	62
Tabel 3.18	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	62
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/Minum Yang Aman Tahun 2017 – 2020	63
Tabel 3.20	Pelayanan Akses Air Bersih/Minum yang Aman pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri	64
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Target Nasional Tahun 2021	65
Tabel 3.22	Program/Kegiatan Penunjang Capaian Pelayanan Akses Air Bersih/Minum	66
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Rasio Elektrifikasi Tahun 2021	67
Tabel 3.24	Data Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	70
Tabel 3.25	Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 s.d 2021	71
Tabel 3.26	Evaluasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021	71
Tabel 3.27	Evaluasi Rasio Elektrifikasi pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2021	73
Tabel 3.28	Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2021	80
Tabel 3.29	Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2021..	80
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD	81
Tabel 3.31	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah 2017-2021	81
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Nasional	82
Tabel 3.33	Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2021	83
Tabel 3.34	Capaian Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja Tahun 2021	88
Tabel 3.35	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, 2011-2021	91
Tabel 3.36	Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri Tahun 2021	92



Tabel 3.37	Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri Tahun 2020-2021	93
Tabel 3.38	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD.....	94
Tabel 3.39	TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se Indonesia Tahun 2021	94
Tabel 3.40	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepri	97
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	103
Tabel 3.42	Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dengan Target RPJMD	103
Tabel 3.43	Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dengan Target Nasional.....	104
Tabel 3.44	Jumlah Posyandu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	106
Tabel 3.45	Persebaran Tenaga Gizi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	106
Tabel 3.46	Realisasi Keuangan Kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yang Menunjang Penurunan Angka Underweight	107
Tabel 3.47	Evaluasi Capaian Persentase Penduduk Miskin 2021	108
Tabel 3.48	Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021	109
Tabel 3.49	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2021	111
Tabel 3.50	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah	119
Tabel 3.51	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kategori Perkotaan dan Perdesaan September 2020 - September 2021	120
Tabel 3.52	Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota Tahun 2021	120
Tabel 3.53	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Se-Indonesia Semester II Tahun 2021	121
Tabel 3.54	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021	112
Tabel 3.55	Evaluasi Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016-2020	126
Tabel 3.56	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	126
Tabel 3.57	IDG Provinsi Kepri dan kabupaten Kota 2013-2019	127
Tabel 3.58	Anggota Legislatif laki-laki dan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2020	128
Tabel 3.59	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja	



	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 dengan Target akhir RPJMD	129
Tabel 3.60	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) se Indonesia	129
Tabel 3.61	Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan Tahun 2021	135
Tabel 3.62	Evaluasi Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2021	136
Tabel 3.63	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	137
Tabel 3.64	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target akhir RPJMD	138
Tabel 3.65	Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Target Nasional	138
Tabel 3.66	Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2021	142
Tabel 3.67	Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2020-2021	143
Tabel 3.68	Evaluasi Pencapaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021.....	144
Tabel 3.69	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target akhir RPJMD	144
Tabel 3.70	Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Target Nasional	145
Tabel 3.71	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pintu Masuk Tahun 2020 – 2021	145
Tabel 3.72	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Provinsi Tujuan Tahun 2020– 2021	146
Tabel 3.73	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Berdasarkan Negara Asal Wisatawan Tahun 2021	147
Tabel 3.74	Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Yang dipergunakan Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	148
Tabel 3.75	Perbandingan Efektifitas Anggaran Yang dipergunakan Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020-2021	148
Tabel 3.76	Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....	151
Tabel 3.77	Capaian Meningkatnya Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	154
Tabel 3.78	Evaluasi Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 sd Tahun 2021	155
Tabel 3.79	Evaluasi Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten dan Kota Tahun 2016 sd Tahun 2021	156
Tabel 3.80	Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan negara Asal	158
Tabel 3.81	Evaluasi Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 s.d 2021	159



Tabel 3.82	Evaluasi Realisasi Investasi PMDN Kabupaten/Kota Tahun 2016 s.d 2021	159
Tabel 3.83	Program DPMPTSP Tahun 2021	160
Tabel 3.84	Perbandingan Penganggaran DPMPTSP Tahun 2017-2021 berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.....	161
Tabel 3.85	Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2021	162
Tabel 3.86	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021	164
Tabel 3.87	Capaian Kinerja Meningkatnya kinerja sektor perdagangan Tahun 2017-2021.....	165
Tabel 3.88	Persentase Pertumbuhan Nilai PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	166
Tabel 3.89	Capaian Kinerja PDRB Sektor perdagangan Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD	166
Tabel 3.90	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 s/d 2021	166
Tabel 3.91	Capaian Kinerja Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan.....	168
Tabel 3.92	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020	
Tabel 3.93	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Proporsi RTH Publik di Wilayah Perkotaan Tahun 2017-2021.....	169
Tabel 3.94	Proporsi RTH Publik di Wilayah Perkotaan se Provinsi Kepri	170
Tabel 3.95	Pwerbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Target Nasional	171
Tabel 3.96	Program/Kegiatan Penunjang Capaian Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	172
Tabel 3.97	Proporsi RTH Publik di Wilayah Perkotaan se Provinsi Kepri	173
Tabel 3.98	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021	175
Tabel 3.99	Rincian Tingkat Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	180
Tabel 3.100	Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Pegawai Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	180
Tabel 3.101	Analisis Indeks Pegawai Tahun 2017-2021	181
Tabel 3.102	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD	182
Tabel 3.103	Program Pendukung Indeks Profesionalitas Pegawai	183
Tabel 3.104	Program Yang Mendukung Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Pegawai	184
Tabel 3.105	Indeks Profesionalitas Pegawai	186
Tabel 3.106	Evaluasi Realisasi Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2020-2021	188
Tabel 3.107	Perbandingan Nilai SAKIP Provinsi Kepri Tahun 2021 Terhadap	189



	Target RPJMD	
Tabel 3.108	Hasil Penilaian Komponen SAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dan 2021.....	189
Tabel 3.109	Rekapitulasi Nilai Sakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat Tahun 2017 – 2021	191
Tabel 3.110	Pengelompokan Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah Tahun 2017-2021	194
Tabel 3.111	Capaian Kinerja Nilai e-government Provinsi Kepri Tahun 2021	195
Tabel 3.112	Perbandingan Realisasi Kinerja e-government Provinsi Kepri Tahun 2017-2021.....	196
Tabel 3.113	Perbandingan Nilai e-Government Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Terhadap Target RPJMD.....	196
Tabel 3.114	Perbandingan Nilai e-Government Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Terhadap Target Target Nasional	196
Tabel 3.115	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan/Penerapan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri	198
Tabel 3.116	Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran..	200





DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 (BPMD Disduk Capil)	7
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 (BPS Provinsi Kepri Tahun 2020)	8
Grafik 1.3	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2015-2021 (%)	9
Grafik 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	10
Grafik 1.5	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau	11
Grafik 1.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	11
Grafik 1.7	Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	15
Grafik 1.8	Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan Tahun 2021	15
Grafik 3.1	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Bangunan Yang Berciri Khas Melayu Tahun 2021	39
Grafik 3.2	Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2021	69
Grafik 3.3	Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	70
Grafik 3.4	Pencapaian Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi Prov Kepri dari Tahun 2016-2021	72
Grafik 3.5	Perbandingan Akhir Periode RPJM dan Realisasi Kinerja	74
Grafik 3.6	Evaluasi Tingkat Penganguran Terbuka 2011-2021	89
Grafik 3.7	Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 S/D 2021	190
Grafik 3.8	Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD	194



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Peta Provinsi Kepulauan Riau	4
Gambar 1.2	Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	5
Gambar 3.1	Contoh Ornamen Bangunan Melayu Tampak Depan	34
Gambar 3.2	Contoh Ornamen Bangunan Melayu Tampak Samping.....	35
Gambar 3.3	Salah satu Gedung Dengan Ornament Melayu	35
Gambar 3.4	Pemeliharaan Berkala Pada Ruas Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	50
Gambar 3.5	Pemeliharaan Berkala Pada Ruas Jalan Provinsi di Kab Karimun.....	50
Gambar 3.6	Pemeliharaan Berkala Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna.....	51
Gambar 3.7	Pemeliharaan Berkala Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	51
Gambar 3.8	Pembangunan Dermaga di Pulau Panjang Kab.Karimun	56
Gambar 3.9	Dermaga Apung Pl.Penyengat dan Tanjung Uban	60
Gambar 3.10	Dermaga Ponton Kasu.....	60
Gambar 3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tempat Tinggal	91
Gambar 3.12	Pemberian Taburia Pada Balita Underweight	101
Gambar 3.13	Pelacakan Balita Underweight	102
Gambar 3.14	Pelacakan Kasus Balita dengan Permasalahan Gizi di Provinsi Kepulauan Riau	103
Gambar 3.15	Data Status Gizi Balita Kekurangan Gizi Berdasarkan Kab/Kota Provinsi Kep.Riau 2021.....	104
Gambar 3.16	Persebaran Nilai Realisasi Investasi (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	157
Gambar 3.17	Persebaran Nilai Realisasi Investasi (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	158
Gambar 3.18	Persebaran Nilai Realisasi Investasi (PMDN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	160



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja berdasarkan Visi dan Misi Gubernur.

Adapun Hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 bertujuan sebagai *feedback* bagi kepala daerah dan juga dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 (lima) dan merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran mengalami kontraksi dalam hal mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Kontraksi tersebut dikarenakan terdampak oleh pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 dan 2021. Pandemi covid-19 ini merupakan suatu bencana global yang berdampak terhadap seluruh dunia termasuk Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau, antara lain pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, transportasi dan beberapa sektor jasa lainnya. Secara garis besar pandemi covid-19 ini akan mempengaruhi sasaran strategis pembangunan dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

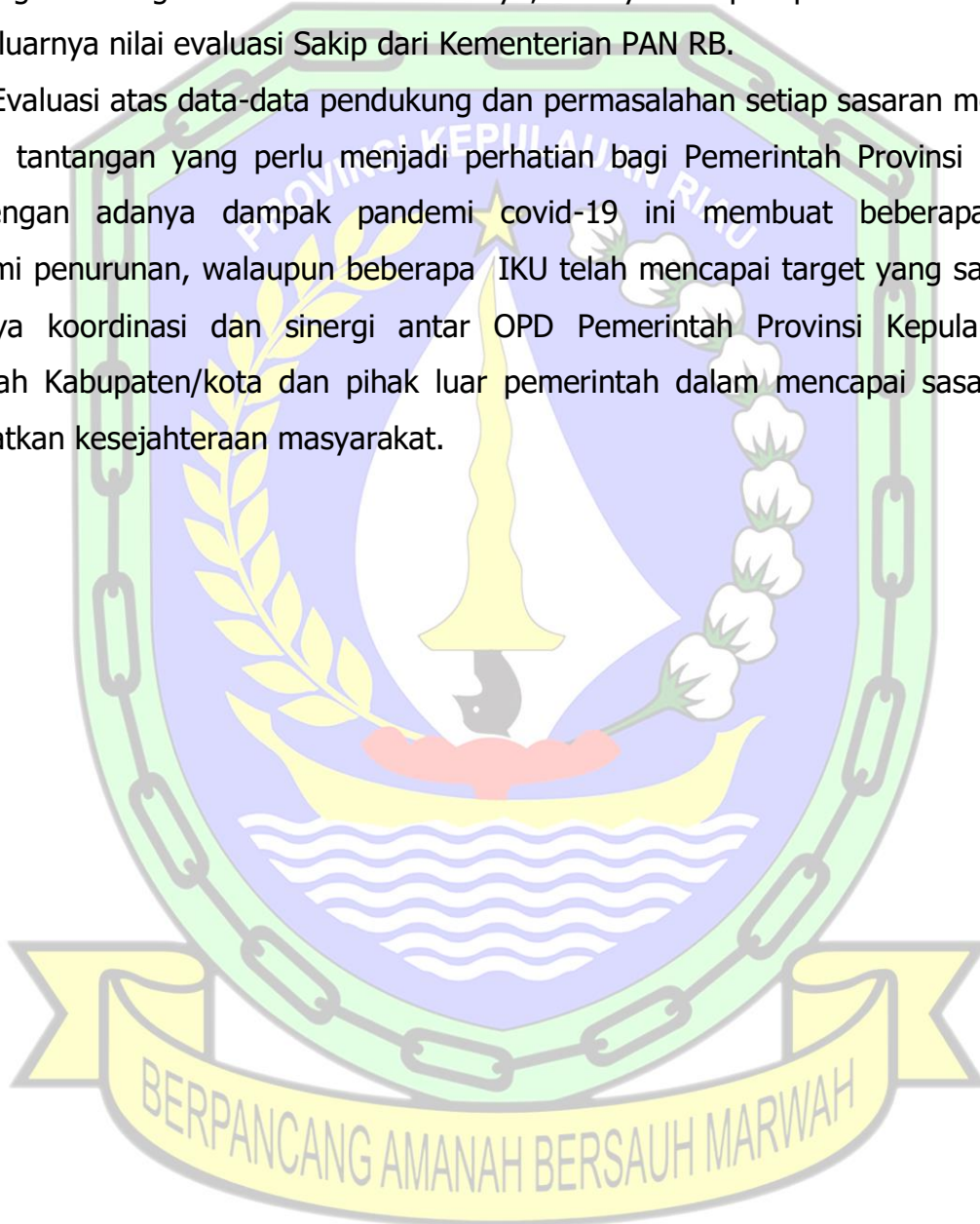
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2021 telah ditetapkan 16 sasaran strategis pembangunan dengan 19 indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja tersebut setelah dilakukan evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian kinerja dikategorikan sangat baik
2. 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja dikategorikan baik
3. 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja dikategorikan Kurang
4. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja dikategorikan Nol (hasil Evaluasi dari Kementerian PAN dan RB belum disampaikan/Nilai belum keluar



Dari 19 indikator diatas terdapat IKU dengan capaian kinerja kategori kurang dari target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Indeks Profesional Pegawai. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya sosialisasi Perda yang mengatur bangunan berciri khas melayu, adanya dampak pandemi covid-19 serta belum keluarnya nilai evaluasi Sakip dari Kementerian PAN RB.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan adanya dampak pandemi covid-19 ini membuat beberapa realisasi mengalami penurunan, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/kota dan pihak luar pemerintah dalam mencapai sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Provinsi Kepulauan Riau. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama

kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 pada tanggal 24 September 2002, Secara de jure Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto



Keterangan: Kantor Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai tanggal 1 Juli 2004. Kemudian dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 40P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2024, dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2024 merupakan periode pertama Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2021-2024.

Secara Administratif Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Kota Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, serta memiliki 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Letak astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada tabel berikut :



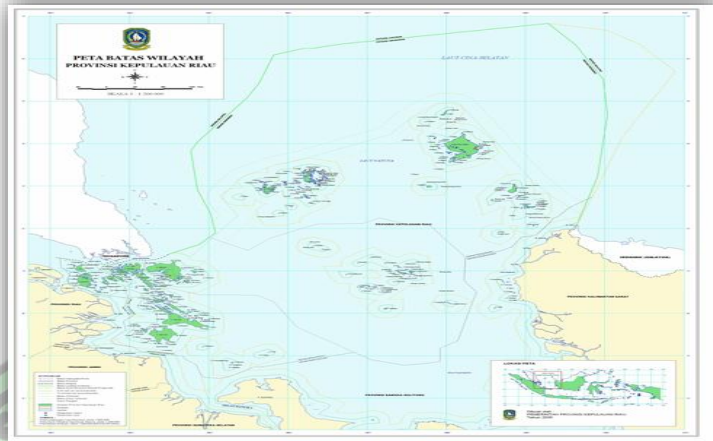
Tabel 1.1
Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab / Kota	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)			Jumlah Kel /Desa
			Daratan	% Daratan	Jumlah Kec	
1	Bintan	Bintan Buyu	1.739,74	16,42	10	51
2	Karimun	Tanjung Balai	1.524,00	14,38	12	71
3	Natuna	Ranai	2.814,26	26,56	15	77
4	Lingga	Daik	2.117,72	19,99	13	82
5	Kepulauan Anambas	Tarempa	590,14	5,57	10	54
6	Kota Batam	Batam	1.570,35	14,82	12	64
7	Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang	239,5	2,26	4	18
Provinsi Kepulauan Riau			10.595,71	100	76	417

1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang daerahnya sebagian besar adalah daerah kepulauan. Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 427.608,68 km², dengan luas lautan 417.012,97 km² (97,52 persen) dan luas daratannya sebesar 10.595,71 km² (2,48 persen). Luas daratan sekitar 0,20 % dari luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara serta antara 103°22' Bujur Timur sampai dengan 109°40' Bujur Timur.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan. Letak dan kondisi geografis ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Riau, hal ini karena Provinsi Kepulauan Riau berada di jalur emas perdagangan di bagian barat Indonesia yang dapat menjadi potensi untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah maupun devisa bagi Negara Indonesia. Berikut ini peta Provinsi Kepulauan Riau:



Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota serta dikelilingi oleh lautan dan memiliki pulau terluar yang berbatasan dengan Negara tetangga, hal ini yang membuat Provinsi Kepulauan Riau harus memperkuat diplomatik wilayah, sehingga wilayah Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau khususnya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan. Bagi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau laut merupakan potensi, jumlah lautnya yang luas, pantainya yang indah serta hasil lautnya yang melimpah sehingga membuat Provinsi Kepulauan Riau menjadi sasaran Negara luar/tetangga untuk berinvestasi, terutama dibidang perhotelan/resort. Luasnya wilayah laut lebih besar dibandingkan daratan, sehingga Provinsi Kepulauan Riau harus mengembangkan maritim menjadi salah satu potensi untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Selain itu juga memiliki ribuan pulau dengan keindahan alami yang menawan dan eksotis, serta Kekayaan sumber daya alam (perikanan, kelautan, energi, mineral) yang melimpah. Tentunya hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaannya.

Berikut ini Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

Gambar 1.2
Batas Wilayah
Provinsi Kepulauan Riau

1) Sebelah Utara : Laut Cina Selatan

2) Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

3) Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi

4) Sebelah Barat Riau : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi

Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002

1) Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja

2) Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

4) Sebelah Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

5) Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal klarifikasi data geografis Kabupaten/Kota dengan mengambil data dari interpretasi peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000. Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan yang belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Adapun hasil verifikasi Ulang Pulau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 terdapat 1800.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1.800 pulau yang terdiri dari 395 pulau yang sudah berpenghuni dan 1.405 pulau yang belum berpenghuni, terdiri dari Kota Tanjungpinang memiliki jumlah pulau paling sedikit, yaitu 9 pulau, yang terdiri dari 2

pulau berpenghuni dan 7 pulau yang tidak berpenghuni, sedangkan Kabupaten Lingga adalah kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak, dengan 537 pulau yang terdiri dari 77 pulau berpenghuni dan 460 pulau yang tidak berpenghuni. Kota Batam memiliki jumlah pulau yang berpenghuni terbanyak (35,85%), sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki jumlah pulau yang berpenghuni paling sedikit (11,30%). Jumlah masing-masing pulau yang dimiliki Kabupaten/Kota tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Pulau Berpenghuni		Pulau Tidak Berpenghuni		Total Jumlah Pulau
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
1	Bintan	48	19,92	193	80,08	241
2	Karimun	73	29,08	177	70,80	250
3	Natuna	35	22,73	140	80,00	175
4	Lingga	77	14,50	460	85,66	537
5	Kepulauan Anambas	27	11,30	190	87,56	217
6	Kota Batam	133	35,85	238	64,15	371
7	Kota Tanjungpinang	2	22,22	7	77,78	9
Provinsi Kepulauan Riau		395	22	1.405	78	1.800

Sumber: Verifikasi Ulang Pulau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan data base kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 2.055.278 jiwa (Semester I Tahun 2021). Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni sebesar 56,91% atau sekitar 1.169.648 jiwa, sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,33% atau sekitar 47.803 Jiwa. Hal ini memperlihatkan masih kurang meratanya persebaran penduduk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



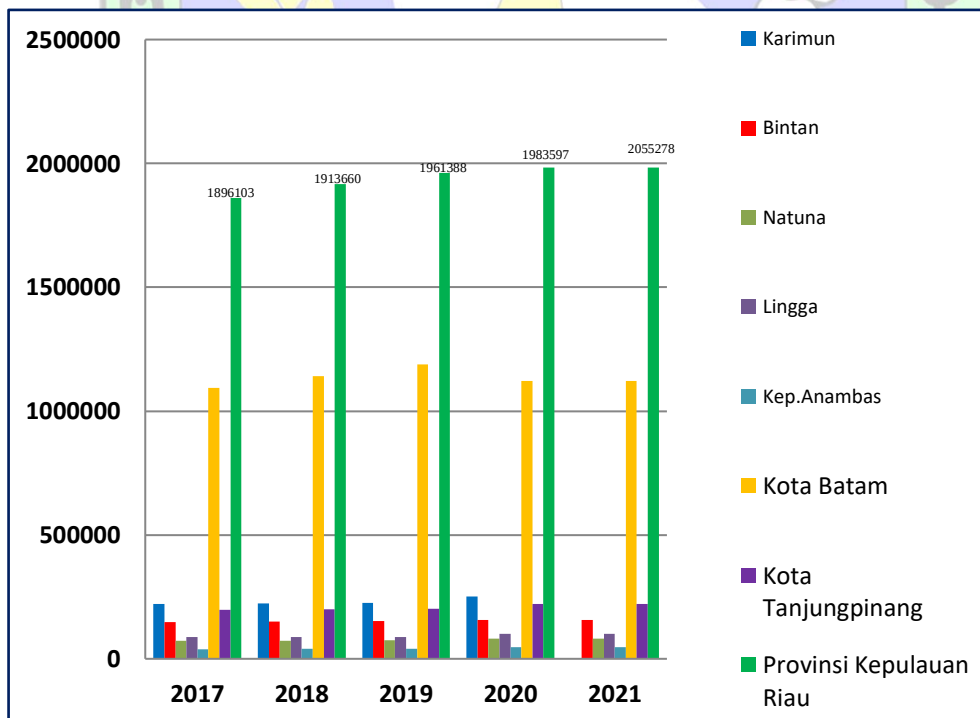
Berikut ini adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017– 2021

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Karimun	243.834	246.522	249.375	251.510	260.438
2	Bintan	152.571	153.675	156.105	157.459	165.920
3	Natuna	79.058	80.558	81.786	82.192	82.537
4	Lingga	99.245	100.243	100.905	101.429	101.863
5	Kep.Anambas	44.449	45.347	46.271	47.022	47.803
6	Kota Batam	1.063.941	1.071.231	1.107.551	1.121.875	1.169.648
7	Kota Tanjung Pinang	213.005	216.084	219.395	222.110	227.069
	Provinsi Kepulauan Riau	1.896.103	1.913.660	1.961.388	1.983.597	2.055.278

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

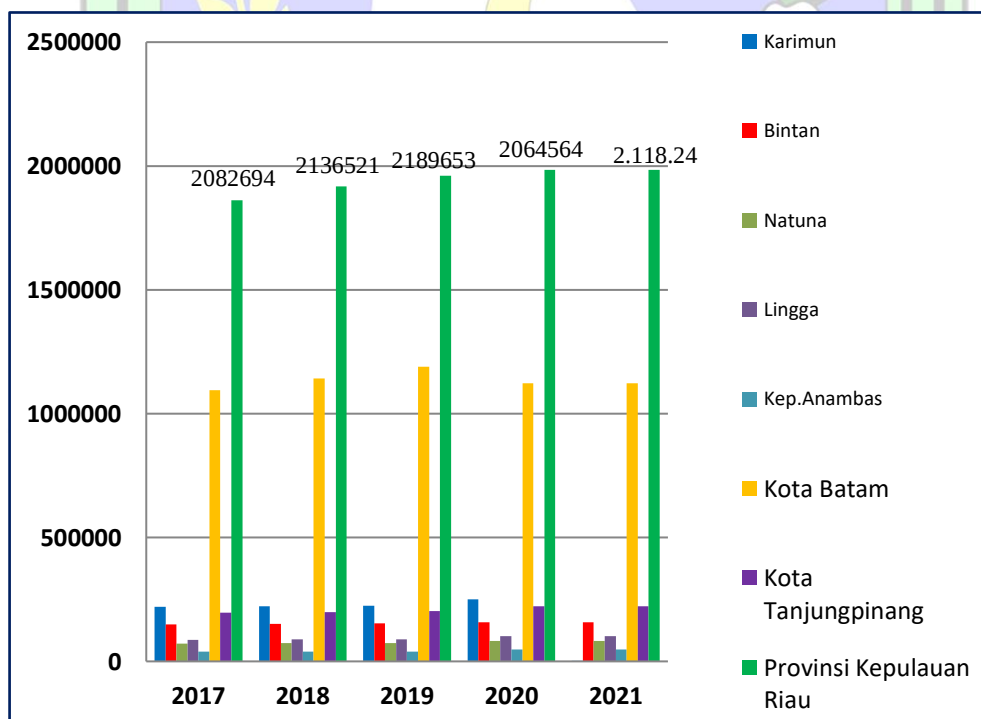


Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 - 2021

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Karimun	229.194	231.145	232.797	253.457	259.45
2	Bintan	156.313	157.927	159.403	159.518	162.56
3	Natuna	76.192	76.968	77.771	81.495	83.36
4	Lingga	89.330	89.501	89.781	98.633	100.66
5	Kep.Anambas	41.412	41.927	42.309	47.402	48.74
6	Kota Batam	1.283.196	1.329.773	1.376.009	1.196.396	1.230.10
7	KotaTanjung Pinang	207.057	209.280	211.583	227.663	233.37
	Provinsi Kepulauan Riau	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564	2.118.24

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Grafik 1.2
Jumlah Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

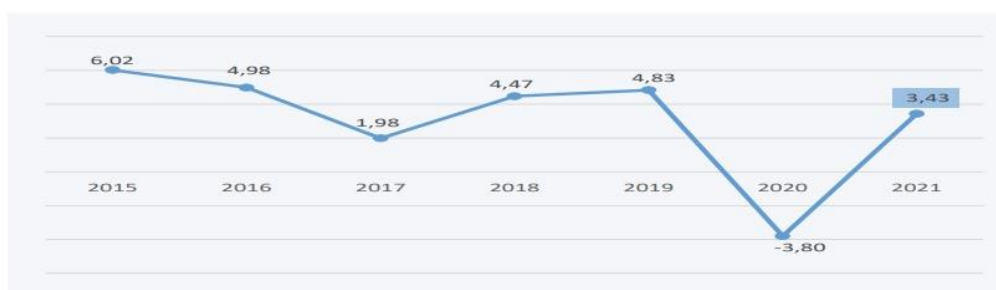
Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup tinggi, Hal ini sebagaimana diungkapkan berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 2.118.240 jiwa, terutama dikonstruisikan dari pertumbuhan penduduk Kota Batam yang mencapai

rata-rata sebesar 58,07% atau sebesar 1.230.100 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang besar di Kota Batam lebih disebabkan oleh migrasi masuk penduduk karena perkembangan Kota Batam yang sangat pesat sehingga menarik perhatian bagi penduduk dari daerah lain.

1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Dalam kurun waktu tahun 2020-2021, trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi minus sebesar 3,80 % terus mengalami kontraksi yang disebabkan oleh terdampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 3,43%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,26%. Secara lengkap perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 1.3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2021 (%)



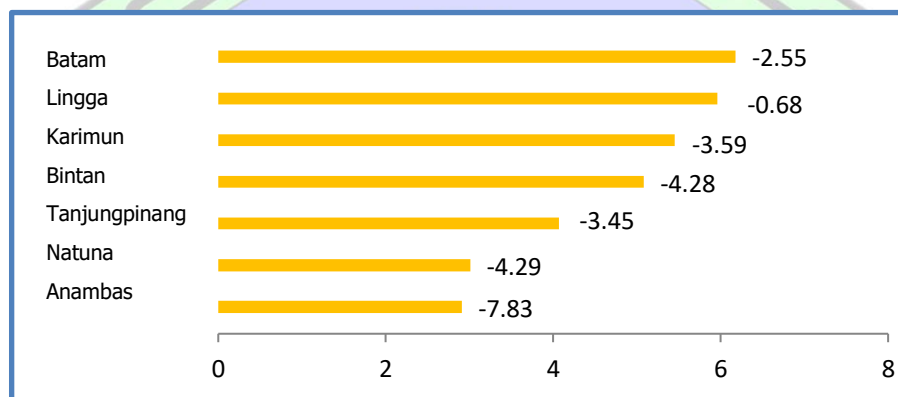
Gambar 1 Pertumbuhan PDRB Tahun 2015-2021 (c-to-c) (persen)

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan BPS Pusat Tahun 2021

Hampir seluruh sektor perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau terdampak akibat pandemik Covid-19. Sektor yang mengalami dampak paling besar terjadi pada sektor Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi

Makan dan Minum, dan Jasa Lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif di atas 40% di tahun 2021 ini. Sementara itu, tercatat hanya 3 sektor yang bertumbuh secara positif di tahun 2021 yaitu pada sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Grafik 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 tertinggi adalah Kota Batam sebesar 2,55%, selanjutnya Kabupaten Lingga sebesar 0,68 % dan Kabupaten Karimun sebesar 3,59 %. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar -7,83%.

1.4.3 PDRB Per Kapita

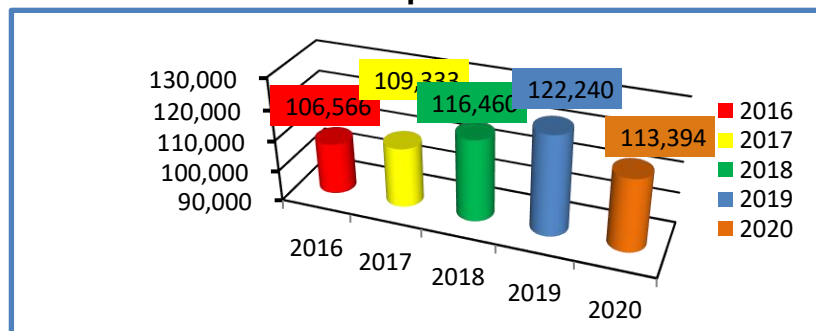
PDRB per kapita secara relatif dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp 113.394- ribu. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 106.566 ribu.

Tabel 1.5
Perkembangan PDRB PerKapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp ribu)	106.566	109.333	116.460	122.240	113.394

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Grafik 1.5
Perkembangan PDRB Per Kapita
Provinsi Kepulauan Riau

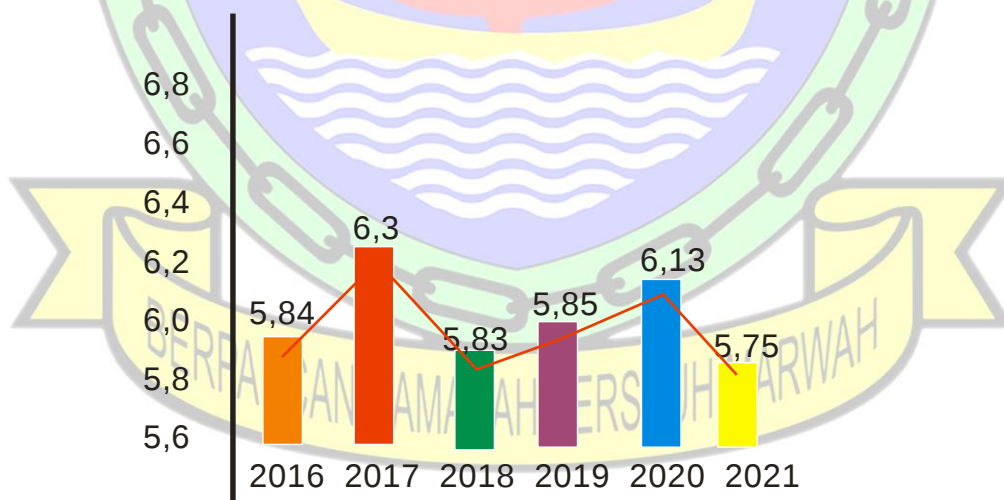


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

1.4.4 Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dilihat dalam lima tahun terakhir (2016-2021), yaitu dari sebesar 5,84% pada tahun 2016 menjadi 5,75% pada tahun 2021. Dalam kurun waktu tersebut, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 0,09%. Jika dilihat dari kinerja penurunannya, tren kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kondisi yang melambat. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja setiap tahunnya.

Grafik 1.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2021

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar 5,75%, lebih baik dari tingkat kemiskinan Nasional sebesar 7,60%. Jika dilihat berdasarkan provinsi di wilayah Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

lebih rendah dibandingkan Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, namun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 Tugas dan Struktur Organisasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dengan mensejahterakan masyarakat

melalui penyiapan Sumber

Daya Manusia dengan dukungan

infrastruktur yang memadai untuk

mencapai masyarakat yang sejahtera,

berakhlak mulia dan ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan tugas

tersebut ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi

Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

1. Sekretariat

a. Sekretaris Daerah

- a.1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
- a.2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
- a.3. Asisten Administrasi Umum.

b. Staf Ahli

- b.1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum,
- b.2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan,
- b.3. Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

c. Biro

- c.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
- c.2. Biro Hukum,
- c.3. Biro Kesejahteraan Rakyat,
- c.4. Biro Perekonomian dan Pembangunan,
- c.5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa,
- c.6. Biro Organisasi,
- c.7. Biro Umum,
- c.8. Biro Administrasi Pimpinan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Dinas Daerah

- 2.1. Dinas Pendidikan,
- 2.2. Dinas Kesehatan,
- 2.3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan,
- 2.4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2.5. Dinas Sosial,
- 2.6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
- 2.7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- 2.8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- 2.9. Dinas Perhubungan,
- 2.10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
- 2.11. Dinas Komunikasi dan Informatika,
- 2.12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- 2.13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
- 2.14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 2.15. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga,

- 2.16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
- 2.17.Dinas Kelautan dan Perikanan,
- 2.18.Dinas Pariwisata,
- 2.19.Dinas Kebudayaan,
- 2.20.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan,
- 2.21.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
- 2.22.Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

3. Inspektorat Daerah.

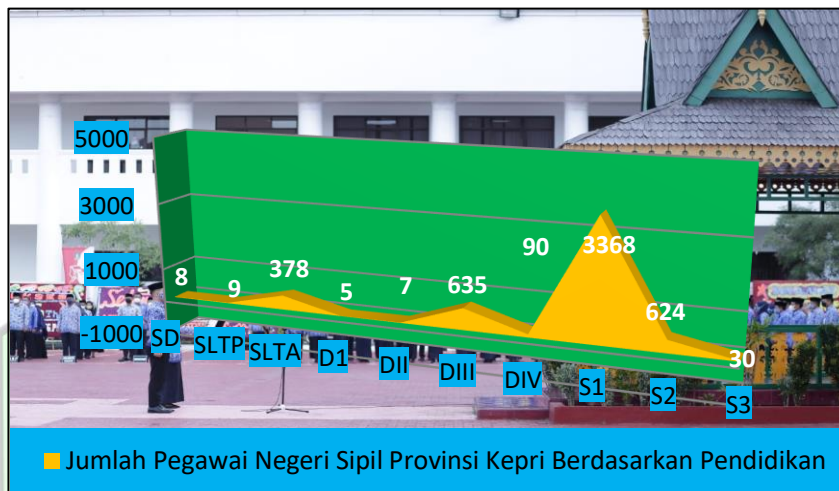
4. Badan Daerah.

- 4.1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,
- 4.2. Badan Keuangan dan Aset Daerah,
- 4.3. Badan Pendapatan Daerah,
- 4.4. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI,
- 4.5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- 4.6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah,
- 4.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
- 4.8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 4.9. Badan Penghubung Daerah.

1.6 Kondisi Pegawai

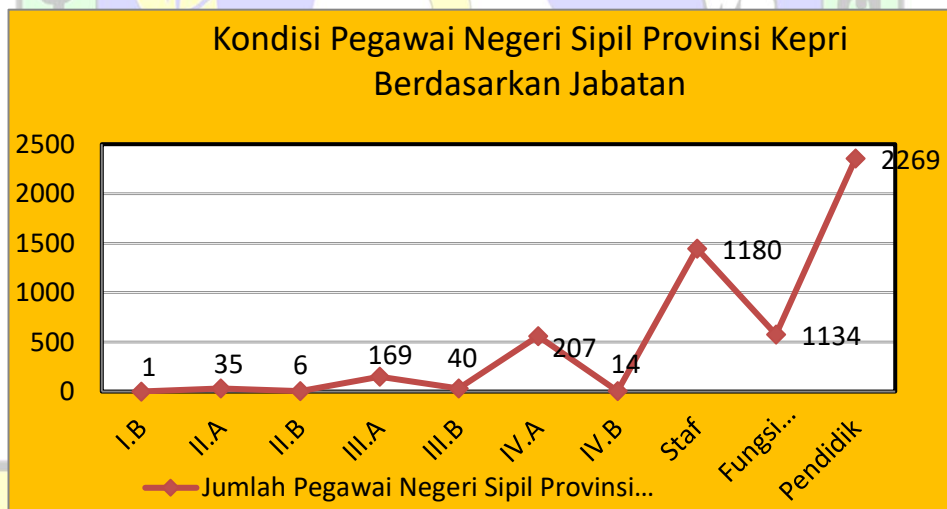
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 5.054 orang, dimana jumlah tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Adapun kondisi atau jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2021 sebagai berikut :

Grafik 1.7
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021



Sumber: BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2021

Grafik 1.8
Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jabatan



Sumber: BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2021

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan kinerja ini mengungkapkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Adapun sistematika penulisan laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi, profil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Dalam bab ini dijelaskan pencapaian sasaran-sasaran organisasi serta pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja tahun 2021.

BAB IV Penutup.

Dalam bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.

Lampiran:

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dan daftar penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2016 – 2021. Dalam RPJMD tersebut mengandung pernyataan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (ultimate outcome) yang diharapkan.

Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BUNDA TANAH
MELAYU YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA, RAMAH
LINGKUNGAN DAN UNGGUL DI BIDANG MARITIM

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai- nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.
- Kepulauan Riau yang Sejahtera adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).
- Kepulauan Riau yang Berakhlak Mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.
- Kepulauan Riau yang ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.
- Kepulauan Riau yang unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritim oriented*). Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu : meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang diemban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama

Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

2. Misi Kedua

Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.

3. Misi Ketiga

Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.

4. Misi Keempat

Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

5. Misi Kelima

Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.

6. Misi Keenam

Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

7. Misi Ketujuh

Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

8. Misi Kedelapan

Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan lingkungan hidup.

9. Misi Kesembilan

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Dalam menetapkan tujuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*), menggambarkan hasil yang ingin dicapai, mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, mencerminkan *core area* dimana organisasi berperan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.



Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2021 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut :

1) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama

- (a) Melestarikan Budaya Melayu dan Nilai-nilai Agama.

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya Melayu sebagai kekayaan budaya daerah - Persentase bangunan yang berciri khas Melayu - Persentase warisan budaya Tangible yang lestari	49,70 21,68	70,75 22,38
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama - Persentase Mubaligh yang tersertifikasi - Persentase Santri yang menjadi hafiz	80 80	100 100

- (b) Meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya ketertiban dan rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat - Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur - Angka kriminalitas	185 4.865	150 4.860



2) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua

(a) Meningkatkan keterhubungan antar Kabupaten/Kota

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya panjang jalan provinsi dalam kondisi baik - Persentase jalan provinsi berkondisi baik	73,24	75
2	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi - Persentase ketersediaan pelabuhan penyeberangan (roro) - Persentase ketersediaan kapal penyeberangan (roro) - Persentase ketersediaan pelabuhan laut - Persentase ketersediaan kapal angkutan laut	92,86 100 91,18 88,89	100 100 100 100

(b) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi - Cakupan pelayanan sanitasi (air limbah perkotaan, drainase, persampahan)	83,48	88,49
2	Meningkatnya akses pelayanan air bersih - Persentase pelayanan akses air bersih/ minum yang aman	97,59	100
3	Berkurangnya kawasan kumuh - Luas kawasan kumuh	379,57	255,09
4	Meningkatnya rasio elektrifikasi - Rasio Elektrifikasi	92,50	93,50

3) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga

(a) Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya kualitas pendidikan - Indeks Pendidikan Manusia (IPM) - Rata-rata lama sekolah - Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	10,31 82,00	10,47 84,00
2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja - Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) - Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	67,43 62	67,8 64

(4) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat

(a) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat - Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH - Persentase kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita	129 31 16,5	128 30 16,2
2	Angka kemiskinan menurun - Persentase penduduk miskin	5,83	5,68

(b) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak - Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Indeks Pemberdayaan Gender	94,50 62,25	94,75 62,5



(5) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima

- (a) Meningkatkan pengembangan perekonomian pariwisata dan kemaritiman

Sasaran :

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya produksi perikanan dan olahan hasil perikanan - Jumlah produksi perikanan tangkap - Jumlah produksi perikanan budidaya - Jumlah produk olahan hasil perikanan	305,850 33.852 1.328	306.463 33.920 1.331
2	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan - Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara	2,4	2,5

- (b) Meningkatkan Produksi Pertanian dan ketahanan pangan guna , memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya produksi pertanian - Jumlah produksi tanaman komoditas hortikultura - Jumlah produksi tanaman palawija - Jumlah produksi padi	44.644 12.742 1.020	45.822 12.742 1.020
2	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan - Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen - Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	CV < 10 92,00	CV < 10 93,00

(6) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keenam

- (a) Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing koperasi dan UKM - Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA) - Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN) - Persentase koperasi dan UKM yang memiliki produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	7.900 800 21,22	8.100 900 22,25

(7) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketujuh

- (a) Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri memanfaatkan bahan baku lokal.

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya kuantitas produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal - Jumlah Industri berbahan baku lokal - Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal	2.117 1.478,75	2.200 1.550,20
2	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,44	8,52

(8) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedelapan

- (a) Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Berkurangnya kerusakan lingkungan, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan - Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu - Proporsi RTH publik dikawasan perkotaan	90,91 10,84	100 10,99

(9) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kesembilan

(a) Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi

Sasaran:

No	Sasaran	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintah daerah - Indeks profesionalitas pegawai - Nilai hasil evaluasi SAKIP - Indeks kepuasan masyarakat - Nilai keterbukaan informasi publik - Nilai e-Government	78 BB B 65 2,4	80 BB B 67,5 2,5
2	Meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel - Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau - Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1.457 WTP 3	1.624 WTP 3

B. PERJANJIAN KINERJA

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar



evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan *reward and punishment*.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2021 sebagai tolok ukur evaluasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2021. Perjanjian Kinerja Perubahan Provinsi Kepri Tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Kekayaan Budaya Daerah	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	70,75
2	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Provinsi Berkondisi Baik	75,00
3	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi	Persentase Ketersediaan Pelabuhan Laut	100
4	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih	Persentase Pelayanan Akses Air Bersih yang Aman	100
5	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	94,50
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata – rata Lama Sekolah	10,41
7	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,60
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) Pada Anak Balita	16,2
9	Angka Kemiskinan Menurun	Persentase Penduduk Miskin	5,68
10	Meningkatnya Indeks Pembangunan dan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

11	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	306.463,67
12	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2,5
13	Meningkatnya Realisasi Investasi dan Daya saing Koperasi dan UKM	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	8.100
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	900
14	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,25
15	Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	10,99
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai	80
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB
		Nilai E- Government	2,5



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju



perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai.

III.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan e-performance adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi



pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yang ditargetkan untuk dicapai.

Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Sedangkan semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan penacapaian kinerja yang semakin rendah diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Kekayaan Budaya Daerah	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	70,75	28,89	40,85
2	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Provinsi Berkondisi Baik	75,00	76,38	101,83
3	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi	Persentase Ketersediaan Pelabuhan Laut	100	100	100
4	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih	Persentase Pelayanan Akses Air Bersih yang Aman	100	92,72	92,72
5	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	94,50%	94,50%	100,00
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10,41	10,18	97,79
7	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,60	9,91	49.84
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) Pada Anak Balita	16,2	13,4	117
9	Angka Kemiskinan Menurun	Persentase Penduduk Miskin	5,68%	5,75%	98,77%
10	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65	62,02	95,42
11	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	306.463,67	302.662,68	98,76
12	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2.500.000	3.103	0.12
13	Meningkatnya Realisasi Investasi dan daya saing Koperasi dan UKM	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	8.100	15.237	188
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	900	9.768	1.085
14	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,25	8,15	98,79
15	Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	10,99%	16,27%	148.04%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai	80	54.02	67.52
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB		
		Nilai E- Government	2,5	1,96	78,4

III.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan November kemudian Perjanjian Kinerja tersebut mengalami perubahan yang dikarenakan menyesuaikan dengan RPJMD 2016-2021 dan kemampuan keuangan daerah saat itu. Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 ditetapkan pada bulan November 2021. Berikut ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 sebagai berikut:

SASARAN. 1***Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Kekayaan Budaya Daerah***

Sebagai pusat kebudayaan melayu, Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi budaya melayu. Kekayaan budaya melayu yang ada di Kepulauan Riau tercermin dari kentalnya kehidupan masyarakat yang masih melaksanakan berbagai aktifitas sehari-hari yang mencerminkan kebudayaan kebudayaan Melayu.

Kebudayaan yang berciri khas Melayu di Kepulauan Riau sangat beragam. Keberagaman budaya melayu dapat dilihat maupun juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Beberapa kebudayaan yang dapat dilihat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diantaranya terlihat dari bentuk bangunan rumah maupun bangunan-bangunan lain yang ada di Kepulauan Riau. Bentuk atau model pakaian melayu dapat dengan mudah kita jumpai terutama pada hari-hari tertentu seperti hari ulang tahun pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi. Bahkan satu hari dalam seminggu ada kewajiban bagi pegawai pemerintah untuk mengenakan baju kurung sebagai baju kebesaran melayu.

Disamping budaya yang dapat dilihat (tangible), di Kepulauan Riau juga dengan mudah kita jumpai penggunaan bahasa dengan dialeg melayu. Hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Bumi Segantang Lada ini mampu melafazkan bahasa dengan dialeg melayu. Berbagai budaya melayu tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktifitas kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Budaya-budaya tersebut selanjutnya menjadi norma dalam kehidupan kemasyarakatan

Kepedulian pemerintah Indonesia dalam memajukan budaya nasional dapat dilihat dalam melestarikan budaya tradisional yang ada di tanah air baik dalam bentuk Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) atau lebih dikenal dengan sebutan *Intangible Culture heritage* maupun warisan benda. Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan pemajuan nilai budaya ini dituangkan oleh pemerintah pusat dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Pada Pemerintah Daerah turunan dari Undang-Undang pemajuan kebudayaan yaitu adanya penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah yang tertuang

didalam dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

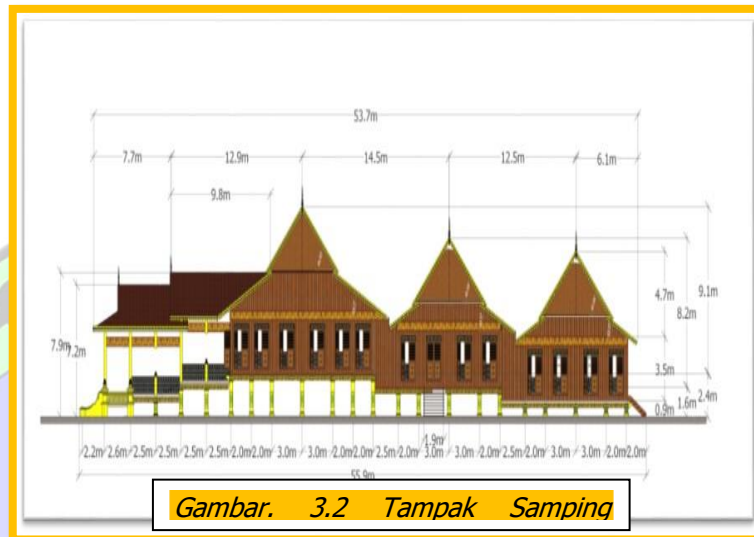
Dalam rangka meningkatkan pelestarian budaya di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang bangunan berciri khas melayu. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam memperkuat nilai-nilai karakter keperibadian dan jati dirimasyarakat Kepulauan Riau; melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan tradisi Melayu dalam pembangunan rumah berciri khas Melayu; meningkatkan pengelolaan Bangunan Berciri Khas Melayu yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; dan edukasi dan sosialisasi Bangunan Berciri Khas Melayu sebagai identitas dan simbol budaya Melayu Kepulauan Riau.

Sebuah bangunan dikatakan berciri khas melayu apabila memiliki ciri-ciri bangunan sebagai berikut:

1. Spesifik atap ataupun ornamen melayu, ini dapat dilihat dari bentuk Perabung Panjang/atap dan memiliki jumlah bandungan nya harus ganjil
2. Bangunan wajib diberi tunjuk langit di depan atap bangunan
3. Menggunakan plang nama kantor/gedung bertulisan arab melayu pada posisi masuk dengan filosofi yang jelas



Gambar. 3.1Tampak Depan bangunan



Capaian kinerja meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu sebagai Kekayaan Budaya Daerah Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	70,75	28,89	40,85

Bangunan yang berciri khas melayu adalah Bangunan yang mempunyai spesifik atap ataupun ornamen melayu. Persentase Bangunan yang berciri khas melayu merupakan perbandingan dari bangunan yang berciri khas Melayu dengan Bangunan yang ada di 7 Kabupaten/Kota.

Analisis terhadap Persentase Bangunan yang berciri khas melayu Tahun 2021 dapat digambarkan Bangunan yang sudah berciri khas melayu yakni 549 bangunan dibagi dengan bangunan yang ada di 7 Kabupaten/Kota yakni 1900 Bangunan Pemerintah dan Swasta diperoleh persentase sebesar 28,89 %.

Hasil Analisis bangunan yang berciri khas melayu dengan target sebesar 70,75% hanya dapat tercapai sebesar 28,89% sehingga capaian kinerja sebesar 40,85% atau dalam kategori ***kurang***.

Perbandingan Realisasi Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	5.28	8.28	11.68	14.23	26.16	28.89

Perbandingan Realisasi Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD 2021	Realisasi	%
1.	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	70,75	28,89	40,84

Sementara itu capaian pada indikator Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 70,75% dengan realisasi sebesar 28,89% maka diperoleh capaian sebesar 40,84%. Masih ada



57,75 % capaian ini merupakan kewajiban dinas kebudayaan untuk menyelesaikan sampai dengan 2021 tetapi belum dapat tercapai.

Analisis penyebab tidak tercapainya indikator bangunan berciri khas melayu pada tahun 2021 masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dalam mencapai target indikator Persentase Bangunan Berciri Khas Melayu, tetapi Dinas Kebudayaan telah berusaha semaksimal mungkin melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota baik itu pemerintah dan swasta dalam mencapai target tersebut. Pada tahun 2019 telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 Tentang Bangunan berciri khas melayu Kepulauan Riau dan ditindak lanjuti pada tahun 2020 dengan disahkannya Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2020 tentang Tata Cara Penerapan dan Pemberian Penghargaan Bangunan Berciri Khas Melayu sebagai dasar penerapan bangunan berciri khas melayu di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Dinas Kebudayaan dapat lebih fokus dalam mencapai target yang sudah ditentukan meskipun masih banyak kendala dilapangan pada saat dilakukannya monitoring terhadap bangunan ini Pada tahun 2021 Pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah bangunan berciri khas melayu di hotel kings ,sosialisasi ini dibagi menjadi 4 kelas dengan kapasitas 55 orang supaya tidak terjadi kerumunan,kegiatan sosialisasi perda ini awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Mei 2021 di Kota Batam tetapi terkait tinggi nya angka covid -19 di Provinsi Kepulauan Riau dan adanya surat edaran Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2021 tentang larangan melaksanakan kegiatan keramaian dalam rangka pengendalian penyebaran covid-19 maka kegiatan tersebut diundur pada tanggal 29 Juni s/d 1 Juli 2021 sosialisasi ini melibatkan berbagai *stakeholders* diantaranya: Lembaga Adat Melayu Kabupaten/Kota, dinas yang membidangi kebudayaan di Kabupaten/Kota, Dinas PU Kabupaten/Kota , Bapelitbang Apindo Bank,perhimpunan Hotel dan restoran se Provinsi Kepulauan Riau, Kejati,Kejari, Angkasa

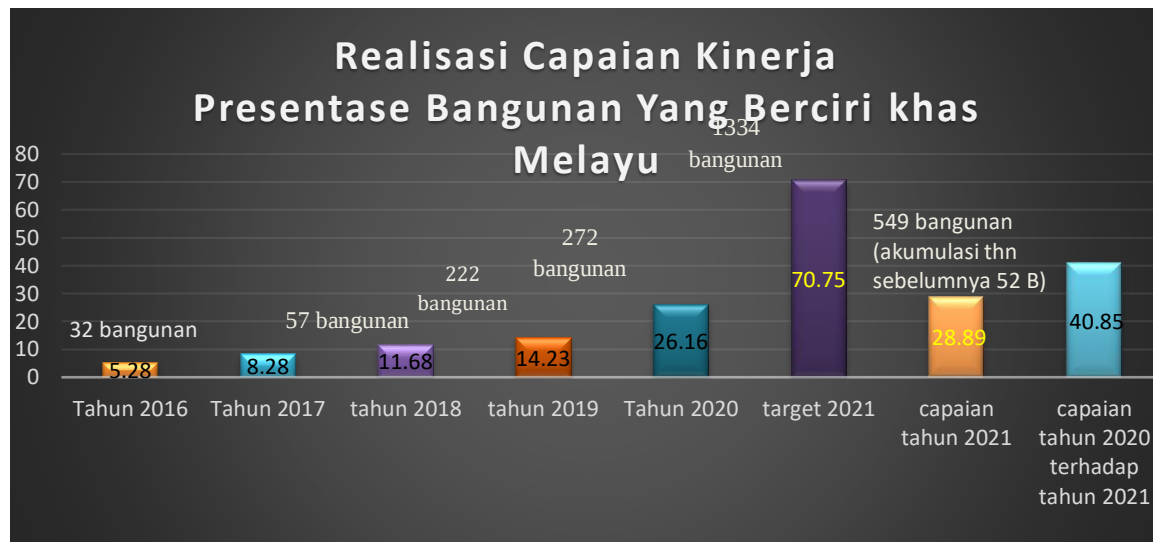


Pura Batam, Dinas Perhubungan Kab/Kota, pihak Bank, Universitas yang ada di Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Kabupaten/Kota, beberapa perwakilan Kecamatan yang ada di Batam, Polres, Kantor Bahasa, Askindo. Banyaknya stakeholders dalam kegiatan sosialisasi Perda ini Dinas Kebudayaan berharap agar dapat lebih bisa mewujudkan apa yang menjadi komitmen dinas kebudayaan dalam mencapai target. Pada Tahun 2021 Dinas Kebudayaan merencanakan akan melibatkan unsur swasta dan pemilik atau pengelola fasilitas umum maupun sekolah-sekolah dalam mensosialisasikan Perda bangunan berciri khas melayu dan dalam mempercepat sosialisasi perda ini dinas kebudayaan juga memasukan perda dan pergub bangunan berciri khas melayu ini kedalam website resmi Dinas kebudayaan sehingga masyarakat kepulauan riau dapat mengetahui ada nya perda dan pergub bangunan berciri khas melayu tersebut, Hal ini adalah bentuk komitmen Pemerintah untuk dapat menggesa agar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ini dapat dilaksanakan dengan cepat baik di lingkungan pemerintah dan Swasta di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu memperkuat identitas masyarakat Kepulauan Riau dengan membuat suatu *icon* dalam bentuk bangunan berciri khas melayu yang merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat melayu di Kepulauan Riau yang telah diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi, serta dapat memberikan dampak positif dalam penanaman nilai-nilai khazanah budaya lokal kepada masyarakat.

Tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi perda ini adalah Dinas Kebudayaan telah melakukan Inventarisasi dan Monitoring ke 7 Kabupaten/Kota menyangkut bangunan berciri khas melayu. Inventarisasi dan Monitoring ke Kabupaten/Kota Pada Tahun 2021 dan langsung turun ke lapangan, dan hasil yang di dapatkan dari monitoring tersebut adalah sudah ada penambahan Bangunan pemerintah dan Swasta yang berciri khas melayu sebanyak 54 Bangunan Pemerintah dan swasta, sehingga Total sampai tahun 2021 jumlah bangunan pemerintah dan Swasta yang berciri khas melayu sebanyak 549. Dari target yang di tetapkan memang masih sangat jauh yang belum terealisasi tetapi dinas kebudayaan telah berusaha dengan melakukan sosialisasi dan monitoring ke kabupaten/kota.

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya kelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kekayaan Budaya Daerah dengan indikator persentase bangunan yang berciri khas melayu Pada Tahun 2021 dapat dilihat pada diagram berikut :

Grafik. 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Presentase Bangunan Yang Berciri Khas Melayu



Pada tahun 2016 capaian pada kinerja ini sebesar 5,28 % atau 32 bangunan berbanding 606 bangunan milik pemerintah tetapi pada tahun 2017 terjadi perubahan pada jumlah bangunan yaitu sebesar 1900 bangunan milik pemerintah dan swasta sehingga adanya perubahan perhitungan pada tahun 2017 dapat digambarkan pada Grafik ini tahun 2017 realisasi sebesar 8,28 % atau 57 bangunan yang sudah berciri khas melayu berbanding 1900 bangunan milik pemerintah dan swasta. Pada tahun 2018 dapat digambarkan pada Grafik realisasi sebesar 11,68 % atau 222 bangunan yang sudah berciri khas melayu berbanding 1900 bangunan milik pemerintah dan swasta. Pada tahun 2019 terdapat penambahan 50 bangunan yang berciri khas melayu, sehingga sampai tahun 2019 jumlah bangunan berciri khas melayu sebanyak 272 bangunan atau 14,32%. Pada tahun 2020 terdapat penambahan sebesar 225 bangunan yang berciri khas melayu, sehingga sampai tahun 2020 jumlah bangunan berciri khas melayu sebanyak 497 bangunan atau sebesar 26,16% dan Pada tahun 2021 terdapat penambahan sebesar 52 bangunan yang berciri khas melayu baik itu bangunan pemerintah maupun swasta, sehingga sampai tahun 2021 jumlah bangunan berciri khas melayu sebanyak 549 bangunan atau sebesar 28,89 % Adapun bangunan yang berciri khas melayu pada setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut ini :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU **2021**

Tabel. 3.5
Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu se Provinsi Kepri
Tahun 2016 s/d tahun 2021

No	Kab/ Kota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Banguna n yang berciri khas Melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Banguna n yang berciri khas Melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Banguna n yang berciri khas Melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Banguna n Yang Berciri Khas Melayu sampai 2018	Banguna n yang berciri khas Melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Banguna n Yang Berciri Khas Melayu sampai 2019	Bangunan yang berciri khas Melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan Yang Berciri Khas Melayu sampai 2020	Bangunan yang berciri khas Melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan Yang Berciri Khas Melayu sampai 2021
1	Tanjung Pinang	n/a	76	20	965	27	965	47	3	965	50	83	965	133	11	965	144
2	Bintan	3	215	3	285	25	285	28	3	285	31	37	285	76	5	285	81
3	Batam	7	106	7	214	8	214	15	8	214	39	31	214	62	6	214	68
4	Karimun	6	88	6	143	9	143	15	11	143	32	20	143	52	3	143	55
5	Lingga	10	121	12	148	3	148	15	18	148	43	47	148	90	19	148	109
6	Natuna	n/a	n/a	2	62	14	62	16	6	62	22	3	62	25	3	62	28
7	Anambas	n/a	n/a	5	60	30	60	35	1	60	32	4	60	36	5	60	41
41 8	Provinsi Kepulauan Riau	6	n/a	6	23	17	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23
Total		32	606	57	1900	133	1.900	222	50	1.900	272	225	1900	497	52	1900	549

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penambahan jumlah bangunan yang berciri khas melayu paling banyak dilaksanakan pada Tahun 2020. Pada Tahun 2016 jumlah bangunan yang berciri khas melayu hanya 32 bangunan, pada tahun 2017 bertambah 57 bangunan, pada Tahun 2018 bertambah 133 bangunan, pada tahun 2019 bertambah 222 bangunan, dan tahun 2020 bertambah 225 bangunan. Tahun 2021 Terjadi peningkatan jumlah bangunan yang berciri khas melayu di setiap tahunnya sebanyak 52 bangunan, sehingga sampai saat ini jumlah bangunan melayu di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 549 bangunan terdiri dari bangunan pemerintah dan swasta.

Kendala yang di hadapi

-  Dinas Kebudayaan Provinsi belum optimalnya melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu ini sehingga masih banyak bangunan di Pemerintah Daerah pada khususnya dan pihak swasta dan pihak lainnya pada umumnya di yang belum memahami isi dari Peraturan Daerah tersebut, dikarenakan belum dijabarkan dalam Peraturan Pelaksanaannya melalui Peraturan Gubernur sampai kepada Peraturan Bupati maupun Peraturan Walikota.
-  Dinas kebudayaan belum membentuk Tim ahli bangunan berciri khas melayu agar dapat Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Bangunan Berciri Khas Melayu sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 5 bab IV pada Peraturan Daerah Bangunan berciri khas melayu nomor 1 tahun 2019 di Tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah dalam mendirikan bangunan yang berciri khas melayu di Provinsi Kepri.
-  Belum optimalnya antar Provinsi Kepulauan Riau bersama Kabupaten/Kota dalam hal pemberian penghargaan bagi pihak manapun yang melakukan Pendirian Bangunan Berciri Khas Melayu di wilayah Provinsi Kepri sesuai pada Pasal 22 poin 1 Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu.
-  Belum adanya Peran serta Masyarakat dalam pelestarian, pengembangan dan pengendalian Bangunan Berciri Khas Melayu

Solusi

-  Dinas Kebudayaan akan mengoptimalkan sosialisasi 1 Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu dan segera meninjau kembali Peraturan Gubernur yang telah di susun oleh Dinas Kebudayaan terkait bangunan berciri khas melayu ini untuk agar nantinya di tindak lanjutin Peraturan Pelaksanaan sampai kepada Peraturan Kabupaten/Kota.
-  Dinas kebudayaan akan segera membentuk Tim ahli terkait penerapan bangunan berciri khas melayu di Provinsi Kepulauan Riau.



- ✚ Dinas kebudayaan akan segera menyusun petunjuk pelaksanaan untuk pemberian penghargaan bagi pihak manapun yang melakukan Pendirian Bangunan Berciri Khas Melayu di wilayah Provinsi Kepri sesuai pada Pasal 22 poin 1 Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu.
- ✚ Menghimbau/Mengajak setiap elemen masyarakat untuk lebih peduli dan berperan serta dalam pelestarian, pengembangan dan pengendalian Bangunan Berciri Khas Melayu.
- ❖ Analisis program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan kebudayaan	Kegiatan dengan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.440.516.632	5.098.074.336	Peserta yang mengikuti sosialisasi/ jumlah bangunan berciri khas melayu, hibah karya budaya yang ditetapkan		

Terkait tabel diatas keterkaitan antar program/kegiatan dengan pencapaian baik itu sasaran mau pun di indicator sangat menunjang,pada program/kegiatan diatas terdapat beberapa rincian kegiatan salah satu nya didalam program dan kegiatan diatas merupakan factor penunjang tercapai nya indicator bangunan berciri khas melayu yaitu sosialisasi perda bangunan berciri khas melayu yang didalam pelaksanaan mengundang beberapa stakeholders yang terkait dari segi pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan sosialisasi itu yaitu Melakukan sosialisasi dan mempublikasikan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Bangunan Berciri Khas Melayu kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena Aparatur Pemerintah Kabupaten / Kota merupakan instansi yang berkewenangan memberikan perizinan mendirikan bangunan (IMB) kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah, Ruko, Kantor dan lain-lain dan juga

melakukan monitoring ke kabupaten/kota terkait target yang ditetapkan. Kegiatan sosialisasi perda ini dengan anggaran Rp.499.769.900 dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya :

a. Anggaran

Anggaran yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Merupakan dasar atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target pada bangunan berciri khas melayu, pada kondisi pandemic terjadi rasionalisasi pada beberapa program kegiatan, namun ini terjadi pada program kegiatan yang mendukung pencapaian dari indikator bangunan berciri khas melayu, dikarenakan ini adalah bentuk komitmen pemerintah bahwa indikator ini merupakan program prioritas pada dinas kebudayaan.

b. Sumber daya manusia

Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2). Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing. Paling tidak, pada semua pejabat struktural, pendidikan lanjut (Magister/S2) dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat.

Perlunya aparatur sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan tupoksi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung tupoksi yang diemban oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

c. Waktu pelaksanaan

Mulai pelaksanaan awal,Sebagian besar tidak mengalami kendala dan dapat berjalan sebagaimana waktu yang telah ditentukan

d. Sarana dan Pra sarana penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tapi masih perlu ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal.



SASARAN 2**Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik**

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan yang berkondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa antar wilayah. *Jalan Berkondisi Baik* dapat didefinisikan sebagai jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Jalan Berkondisi Baik merupakan salah satu sasaran yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021. Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik**, ditetapkanlah indikator kinerja berupa *persentase jalan provinsi berkondisi baik*. Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 3.6
Capaian Kinerja Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi
dalam Kondisi Baik Tahun 2021
(Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2021)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%)	75,00	76,38	101,83

Jalan berkondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan jalan. Persentase jalan provinsi berkondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi.

Adapun Capaian Kinerja Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel. 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	%
1	Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%)	75,00	76,38	101,83%

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Target Akhir RPJMD adalah 75,00% sedangkan Realisasi Tahun 2021 adalah 75,00% sehingga Capaian Kinerja sebesar 101,83%.

Persentase jalan provinsi berkondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Analisis terhadap Persentase jalan provinsi berkondisi baik Tahun 2021 dapat digambarkan jumlah jalan provinsi berkondisi baik yakni 684,67 KM dibagi dengan jumlah jalan provinsi yakni 896,45 KM dengan persentase 76,38%.

Hasil analisis jalan provinsi berkondisi baik dengan target sebesar 75,00% dapat tercapai sebesar 76,38% sehingga capaian kinerja sebesar 101,83% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut evaluasi capaian indikator kinerja persentase jalan Provinsi berkondisi baik dari Tahun 2016-2021:

Tabel. 3.8
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Provinsi Berkondisi Baik dari Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021
1	Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%)	66,22	66,21	67,97	67,30	69,73	70,31	71,49	73,64	73,24	74,51	75	76,38

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase jalan provinsi berkondisi baik dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Pada tahun 2016 realisasi persentase jalan provinsi berkondisi baik adalah sebesar 66,21% dimana persentase jalan berkondisi baik terus meningkat dari tahun 2017-2021 secara berturut-turut dengan persentase 67,30% (2017), 70,31% (2018), 73,64% (2019), 74,51% (2020) dan 76,38% (2021). Dibawah ini tabel jalan berkondisi baik :



Tabel. 3.9
Evaluasi Jalan Berkondisi Baik Pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepri

No	Kab/ Kota	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jalan Berkondisi Baik (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)
1	Tanjung Pinang	49.15	70,23	50,10	70,23	51,56	70,23	52.03	70.23	55.99	70.23
2	Bintan	128.61	139,10	129,93	139,10	130,71	139,10	131.17	139.10	132.55	139.10
3	Batam	91.96	112,35	104,81	112,35	110,63	112,32	116.48	112.35	117.35	112.35
4	Karimun	105.35	143,72	109,03	143,72	112,31	143,72	112.81	143.72	116.96	143.72
5	Lingga	128.47	236,72	128,62	236,72	138,35	236,72	138.61	236.72	141.55	236.72
6	Natuna	75.18	143,33	82,26	143,33	87,86	143,33	88.05	143.33	91.19	143.33
7	Anambas	24.58	51	25,51	51	28,76	51,00	28.76	51.00	29.09	51.00
Total		603,32	896,45	630,26	896,45	660,17	896,45	667,91	896,45	684,67	896,45

Berdasarkan dari tabel di atas, bahwa kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sepanjang 16.762 km melalui Program penyelenggaraan jalan provinsi. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (Akhir Tahun 2021), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah memperbaiki ruas jalan provinsi menjadi berkondisi baik sepanjang 99.96 km. Oleh karena itu kondisi jalan rusak yang masih harus diperbaiki sepanjang 211.78 km, sehingga masih membutuhkan jumlah anggaran perbaikan yang masih sangat besar. Adapun ruas jalan yang dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Jalan dan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi sepanjang 16.762 km pada tahun 2021. Realisasi kinerja tahun 2021 meningkat dari 2020 dikarenakan kegiatan yang mendukung indikator kinerja tahun 2021 berhasil terlaksana walaupun sempat adanya refofusing anggaran di pertengahan tahun namun tetap berhasil meningkatkan kinerja sehingga melewati target dari yang telah ditetapkan dan kegiatan yang dijalankan di tahun 2021 telah terlaksana sehingga capaian kinerja tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jalan berkondisi baik terpanjang pada tahun 2021 berada di Kabupaten Lingga sepanjang 141.55 km dan yang terpendek berada di Kabupaten Anambas dengan panjang 29,09 km. Jika dilihat lebih lanjut untuk kondisi jalan berkondisi baik dari tahun 2016-2021, jalan berkondisi baik terpanjang di Tahun

2021 berada di Kabupaten Lingga (141.55 Km), Tahun 2020 berada di Kabupaten Lingga (138.61 km) dan Tahun 2019 berada di Kabupaten Lingga (138,35 Km), Kabupaten Bintan (129.93 km) pada tahun 2018, Kabupaten Bintan (128.61 km) pada tahun 2017 dan Kabupaten Bintan (128.61 km) pada tahun 2016. Sedangkan jalan berkondisi baik terpendek untuk periode tahun 2016-2021 berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan panjang 29,09 km (2021) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan panjang 28.76 km (2019 dan 2020), 25.51 km (2018), 24.58 km (2017), dan 24.58 km (2016). Secara umum, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami stagnansi terkait kondisi jalan baik pada tahun 2016-2017, namun kondisinya terus meningkat dalam periode 2018-2021. Untuk Kabupaten Lingga, panjang jalan berkondisi baik memperlihatkan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2016-2021 karena Kabupaten Lingga memang memperoleh alokasi anggaran untuk meningkatkan kondisi jalan pada periode waktu tersebut mengingat Kabupaten Lingga memiliki ruas jalan provinsi yang paling panjang, yang membutuhkan alokasi anggaran setiap tahun untuk meningkatkan panjang jalan berkondisi baik.

Untuk menunjang pencapaian kinerja, alokasi anggaran merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Untuk mendukung tercapainya sasaran **Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik**, alokasi anggaran yang memadai perlu dianggarkan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator di anggarkan di Program Penyelenggaraan jalan dan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2021. Beberapa pekerjaan yang mendukung sasaran yang dimaksud adalah pekerjaan peningkatan jalan, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan. Untuk lebih jelasnya lihat pada Tabel 3.10 Berikut.



Tabel. 3.10
Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian
Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (%)
	Program Penyelenggaraan Jalan				
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
	Pembangunan Jalan				
1	Peningkatan Jalan Tg. Balai - Sei Bati (Lanjutan) Kabupaten Karimun	3.000.000.000	2.926.623.000	100,00%	97,55%
2	Peningkatan Jalan Pesisir Pantai Karimun, Kabupaten Karimun	6.330.000.000	6.315.466.000	100,00%	99,77%
3	Peningkatan Jalan Trans Batubi - Kelarik Kabupaten Natuna (Lanjutan)	21.000.000.000	19.847.558.000	100,00%	94,51%
4	Peningkatan jalan Sp. Kerandin - Belungkur Kabupaten Lingga (Lanjutan)	12.600.000.000	12.598.591.000	100,00%	99,99%
	Rehabilitasi Jalan				
5	Pemeliharaan Berkala Jl. Brig. Katamso - Jl. MT. Haryono - Jl. Gatot Subroto, Kota Tanjungpinang	4.367.345.000	4.367.345.000	100,00%	100,00%
6	Pemeliharaan Berkala pada ruas jalan Sp. Dompok Lama - Pelabuhan Roro Kota Tanjungpinang	2.298.172.000	2.204.633.000	100,00%	95,93%
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung Berlian - Sp. Urung, Kabupaten Karimun	4.652.277.000	4.652.277.000	100,00%	100,00%
	Pemeliharaan Rutin Jalan				
8	Pemeliharaan Rutin pada Ruas Jalan Provinsi di Kota Batam	492.917.381	492.917.000	100,00%	100,00%
9	Pemeliharaan Rutin pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna	495.461.219	-	100,00%	0,00%
10	Pemeliharaan Rutin pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	493.632.975	493.632.000	100,00%	100,00%
11	Pemeliharaan Rutin pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas	334.585.000	334.585.000	100,00%	100,00%



12	Pemeliharaan Rutin pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	435.212.958	435.212.000	100,00%	100,00%
13	Pemeliharaan Rutin pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	500.000.000	473.576.000	100,00%	94,72%



Gambar. 3.4 Pemeliharaan Berkala Jl Brig.Katamso, Jl.MT.Haryono dan Jl.Gatot Subroto



Gambar.3.5 Peningkatan Jalan Pesisir Pantai Karimun



Gambar. 3.6 Peningkatan Jalan Trans Batubi – Kelarik Kab Natuna (Lanjutan)

**VIDEO FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN:
PENINGKATAN JALAN SP. KERANDIN – BELUNGKUR KABUPATEN LINGGA (LANJUTAN)**



Gambar. 3.7 Peningkatan Jalan Sp Kerandin – Belungkur Kab Lingga (Lanjutan)

Untuk mencapai sasaran, organisasi membutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang tersedia tentunya perlu dikelola dengan baik agar sasaran organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat dilihat dari besaran efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya terkait. Analisis efektivitas dan efisiensi sumber daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilakukan dengan membandingkan penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran. Analisis terhadap sisi efektivitas menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sudah dilakukan dengan efektif dengan melihat pencapaian sasaran yang melampaui target. Terkait efisiensi sumber daya, hal ini dapat dianalisis dengan membandingkan persentase kenaikan panjang jalan

berkondisi baik dengan jumlah anggaran yang tersedia pada tahun 2020 dan 2021 (Tabel 3.11). Dari tabel tersebut, kesimpulan yang dapat diambil secara umum adalah bahwa efisiensi sumber daya anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 menunjukkan kecenderungan meningkat secara anggaran di karena kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak dari tahun sebelumnya (2020)

Tabel. 3.11
Perbandingan Persentase Pertambahan Panjang Jalan Berkondisi Baik Terhadap Anggaran Pada Tahun 2020 dan 2021

No	Program	Anggaran	Persentase Pertambahan Anggaran dari tahun sebelumnya
1	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan T.A. 2020	Rp. 7.708.730.097	0.87%
2	Program Penyelenggaraan Jalan (Sub Kegiatan Pembangunan jalan, Rehabilitasi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan) T.A 2021	Rp. 56.999.603.533	1,87%

Pencapaian target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan karena hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target program kinerja;
2. Adanya upaya – upaya strategis dalam optimalisasi pencapaian kinerja OPD;
3. Melaksanakan perencanaan anggaran untuk menunjang kewenangan OPD sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan;

SASARAN. 3**Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi**

Pelabuhan laut merupakan tempat yang berdiri di atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan perusahaan dan tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan. Pelabuhan laut di kepri begitu banyak baik pelabuhan laut pelayaran internasional, pelabuhan laut bongkar muat maupun pelabuhan/dermaga rakyat yang sesuai dengan peruntukannya, namun sesuai hirarki pelabuhan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PP 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan bahwa pelabuhan laut dibedakan menjadi 4 jenis yaitu pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan regional sesuai fungsi pelabuhan laut sebagai simpul jaringan, pintu gerbang kegiatan perekonomian, alih moda transportasi, penunjang kegiatan industri /perdagangan, tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan dalam mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan pelabuhan laut yang secara bertahap dan disegerakan pembangunannya adalah sebagai upaya membuka dan memberi investasi jangka panjang terhadap potensi sumber daya alam perikanan, perkebunan dan pariwisata. Pemerintah pusat juga mendukung secara penuh sebab Provinsi Kepulauan Riau dihadapkan pada letak wilayah yang menjadi daerah perbatasan dan daerah transit.

Persentase ketersediaan pelabuhan laut merupakan perbandingan dari jumlah pelabuhan laut yang tersedia dengan jumlah kebutuhan pelabuhan laut.

Adapun persentase ketersediaan pelabuhan laut dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.12
Capaian Kinerja Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi
Tahun 2021

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Ketersediaan Pelabuhan Laut	100	100	100

Analisis terhadap ketersediaan pelabuhan laut Tahun 2021 dapat digambarkan jumlah pelabuhan laut yang tersedia sebanyak 34 pelabuhan dibagi dengan jumlah kebutuhan pelabuhan laut sebanyak 34 pelabuhan dengan persentase 100%.

Hasil analisis persentase ketersediaan pelabuhan laut dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja dalam kategori **kinerja sangat baik**.

Berikut evaluasi capaian sasaran meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi melalui ketersediaan pelabuhan laut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.13
Evaluasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan
Pelabuhan Laut Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Ket.
1	jumlah pelabuhan laut yang tersedia	20	25	28	33	34	
2	jumlah kebutuhan pelabuhan laut	34	34	34	34	34	
3	Persentase ketersediaan pelabuhan laut (%)	58,82	73,53	82,35	97,06	100	Rumus baris 1 : baris 2 x 100%
4	Target Persentase ketersediaan pelabuhan laut (%)	64.71	73.53	82,35	91,18	100	
5	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Persentase ketersediaan pelabuhan laut (%)	90,90	100	100	106,45	100	Rumus baris 3 : baris 4 x 100%

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat peningkatan capaian realisasi atas indikator kinerja persentase ketersediaan pelabuhan laut dari Tahun 2017 ke Tahun 2021. Pada Tahun 2017 realisasi persentase ketersediaan pelabuhan laut sebesar 58,82 %, pada tahun 2018 meningkat menjadi 73,53 %, lalu pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan menetapkan target sebesar 82,35% atau sebanyak 3 Pelabuhan laut yang selesai

pengerjaannya namun realisasinya meningkat sebesar 4 pelabuhan laut atau 85,29%. Pada Tahun 2020 Dinas Perhubungan menetapkan target sebesar 91,18% atau penambahan pelabuhan sebanyak 2 dari tahun sebelumnya, namun realisasinya meningkat sebesar 4 pelabuhan atau 97,06%. Sedangkan pada tahun 2021 Dinas Perhubungan telah menambah 1 pelabuhan laut, sehingga berdasarkan target yang telah ditetapkan sebesar 34 pelabuhan laut yang terbangun hingga tahun 2021 adalah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu mencapai persentase sebesar 100% atau dalam kategori sangat baik.

Tabel. 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target akhir RPJMD

No	Indikator kinerja	Target RPJMD	Realisasi	%
1	Persentase Ketersediaan Pelabuhan Laut	34	34	100

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 presentase ketersediaan pelabuhan laut dibandingkan dengan target RPJMD tercapai sebesar 100%, dimana jumlah target RPJMD sebesar 34 Pelabuhan dan dapat terealisasi sebesar 34 pelabuhan.

Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan menetapkan target persentase ketersediaan pelabuhan laut sebesar 100% atau sebanyak 34 pelabuhan laut yang dibangun. Berdasarkan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2021, Dalam upaya mencapai target yang ditetapkan Dinas Perhubungan telah merencanakan membangun 2 unit pelabuhan akan tetapi terealisasi 1 pekerjaan pembangunan pelabuhan laut yaitu Pembangunan Dermaga Pulau Panjang di Kec. Belat Kab. Karimun. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 namun hal ini tidak menyebabkan capaian tahun 2021 dibawah target karena pada tahun 2020 sudah melebihi target RPJMD sesuai dengan tabel 2.14 diatas dimana target 2020 sebesar 91% sedangkan realisasi 97% dan pada tahun 2021 dengan penambahan 1 unit pelabuhan capaian sesuai target yaitu 100%. Meskipun terdapat rasionalisasi/ refocusing anggaran tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, namun capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu pada persentase ketersediaan pelabuhan laut dibandingkan dengan target RPJMD tercapai sebesar 100 persen.



Gambar. 3.8 Dermaga Pulau Panjang Kabupaten Karimun

Tabel 3.15
Evaluasi Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pelabuhan Laut
Tahun 2020-2021

No	Kab/ kota	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tanjungpinang	5	5
2	Bintan	2	2
3	Batam	3	3
4	Karimun	8	9
5	Lingga	9	9
6	Natuna	5	5
7	Anambas	1	1
Total		33	34

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan pelabuhan laut meningkat dari tahun ke tahun mulai dari 2020 sampai tahun 2021. Pada Tahun 2020 jumlah pelabuhan laut sebanyak 33, pada tahun 2021 meningkat menjadi 34 pelabuhan yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga secara keseluruhan jumlah pembangunan pelabuhan laut yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2021 adalah sudah mencapai target yang telah ditetapkan di RPJMD 2016-2021.



Secara rinci pelabuhan laut yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.16
Pelabuhan Laut se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Pelabuhan	Lokasi
1	Pelabuhan Pelantar I dan Pelantar II Tahun II	Kota Tanjungpinang
2	Pelantar Rakyat Kampung Bugis	Kota Tanjungpinang
3	Pelantar Rakyat Tanjung Siambang Dompok Tahap I	Kota Tanjungpinang
4	Dermaga Ponton di Pulau Penyengat	Kota Tanjungpinang
5	Dermaga Ponton Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang
6	Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Uban	Kab. Bintan
7	Dermaga Apung di Tanjung Uban	Kab. Bintan
8	Dermaga Pulau Kasu Barat Belakang Padang	Kota Batam
9	Dermaga Apung di Pulau Kasu	Kota Batam
10	Pelabuhan Sijantung	Kota Batam
11	Pelabuhan Parit Rempak	Kab. Karimun
12	Ponton Pelabuhan Kampung Asam Kecamatan Kundur Utara	Kab. Karimun
13	Pelabuhan Tanjung Berlian Kundur Utara	Kab. Karimun
14	Dermaga Pasir Panjang Kecamatan Durai	Kab. Karimun
15	Dermaga Rakyat Desa Rawa Jaya Moro	Kab. Karimun
16	Dermaga Ponton di Kecamatan Durai	Kab. Karimun
17	Dermaga Ponton di Alai	Kab. Karimun
18	Pelabuhan Selat Mendaun	Kab. Karimun
19	Ponton Pelabuhan Sei Tenam Daik	Kab. Lingga
20	Dermaga Pulau Panjang Kec Belat	Kab. Karimun
21	Pelabuhan Pulau Teban Senayang	Kab. Lingga



22	Pelabuhan Pulau Berhala	Kab. Lingga
23	Pelabuhan Bongkar Muat Sei Tenam Lingga	Kab. Lingga
24	Dermaga Ponton di Pelabuhan Jagoh	Kab. Lingga
25	Dermaga Tanjung Buton di Daik	Kab. Lingga
26	Dermaga Cempa	Kab. Lingga
27	Dermaga Apung di Benan	Kab. Lingga
28	Dermaga Apung di Penaah (Hibah)	Kab. Lingga
29	Pelabuhan Penagi	Kab. Natuna
30	Pelabuhan Pulau Nyit Nyit Kec Pulau Tiga	Kab. Natuna
31	Dermaga Ponton di Binjai Bunguran Barat	Kab. Natuna
32	Dermaga Ponton di Penuba	Kab. Natuna
33	Pembangunan Dermaga Sedanau	Kab. Natuna
34	Pelabuhan Teluk Durian	Kab. Anambas

Dari hasil pendataan tersebut terdapat beberapa pelabuhan laut yang dalam kondisi baik maupun rusak, sehingga hal ini membutuhkan perawatan maupun perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan dan rasa aman bagi para pengguna jasa transportasi laut. Maka pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau melalui dana APBD telah melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sebagian pelabuhan yang mengalami rusak. Adapun pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Dermaga Ponton Kasu Belakang Padang
2. Pemeliharaan Dermaga Ponton Senayang
3. Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Sijantung
4. Revitalisasi Dermaga Apung Pulau Penyengat
5. Revitalisasi Dermaga Apung Tanjung Uban

Keberhasilan dalam mencapai target indikator yang ditetapkan tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan untuk mencapai target tingkat capaian kinerja presentase ketersediaan pelabuhan laut pada tahun anggaran 2021 yang bersumber dari dana APBD-P Provinsi Kepulauan Riau.

Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dan kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dan tingkat efisiensi keuangan. Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis sebesar 100% dan capaian berdasarkan penyerapan keuangan pada tahun 2021 adalah sebesar 82,46%. Realisasi Keuangan ini dibawah target yang ditetapkan dikarenakan pada 31 Desember 2021 terdapat pekerjaan yang belum diajukan pembayarannya sehingga terjadi tunda bayar.

Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori sangat baik.

Dukungan program/ kegiatan penunjang capaian kinerja presentase ketersediaan pelabuhan laut pada tahun anggaran 2021 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau adalah program dengan rincian sebagai berikut:

- **Program Pengelolaan Pelayaran**

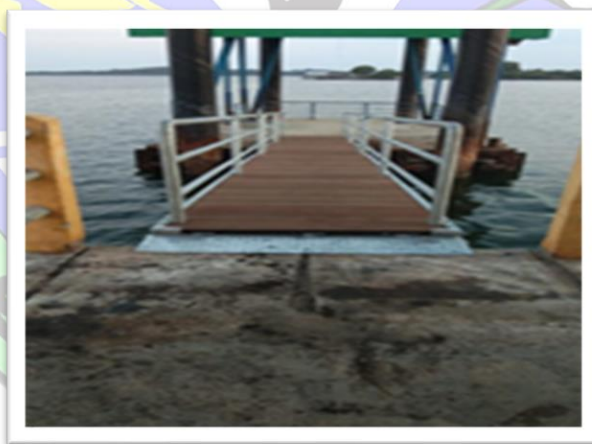
- Kegiatan: Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan sub kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan sub kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, yaitu pada pekerjaan Pembangunan Dermaga Pulau Panjang Kecamatan Belat Kabupaten Karimundengan nilai pagu pekerjaan sebesar Rp 1.021.654.200,- dan pekerjaan Revitalisasi Dermaga Apung Pulau Penyengat serta Revitalisasi Dermaga Apung Tanjung Uban.

Gambar 3.9
Dermaga Apung Pulau Penyengat dan Dermaga Apung Tanjung Uban



- Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dengan sub kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional, yaitu pada pekerjaan Pemeliharaan Dermaga Konton Kasu, Pemeliharaan Dermaga Ponton Senayang, Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Sijantung.

Gambar 3.10
Dermaga Ponton Kasu



Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dan kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dan tingkat efisiensi keuangan.



Meskipun realisasi keuangan dari pekerjaan Pembangunan Dermaga Pulau Panjang Kecamatan Belat Kabupaten Karimun hanya 85,79% akan tetapi realisasi fisiknya mencapai 100% sehingga terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar 14,21% hal ini terjadi karena terdapat addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya bahwa Pekerjaan Pembangunan Dermaga Pulau Panjang Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dalam proses pelaksanaan pekerjaan menggunakan penyedia dari daerah, mengutamakan bahan-bahan dalam negeri, tenaga kerja penduduk setempat sehingga lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori sangat baik.



SASARAN. 4**Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih****A. Perbandingan Target dan Realisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akses pelayanan air bersih ditetapkan indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/Minum yang Aman. Kriteria Air bersih/ minum yang aman adalah air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Evaluasi Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 3.17
Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis/	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Sanitasi dan Air Bersih	Persentase Pelayanan akses air bersih/ minum yang aman	100.00 %	92.72%

Hasil evaluasi persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman Tahun 2021 dengan target sebesar 100.00% dapat tercapai sebesar 92.72%. sehingga capaian kinerja sebesar 92.72% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

Berikut perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase pelayanan akses air bersih/ minum yang aman Tahun 2020 dan tahun 2021:

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Data Awal (Tahun 2020)	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Pelayanan akses air bersih/ minum yang aman (%)	92.68%	100.00 %	92.72%	92.72%



Persentase pelayanan akses air bersih/ minum yang aman merupakan perbandingan dari luas wilayah yang memperoleh akses air bersih dibagi luas wilayah dikali 100. Evaluasi terhadap pelayanan akses air bersih/ minum yang aman Tahun 2021 dapat digambarkan dengan formulasi luas wilayah yang memperoleh akses air bersih seluas 7604,36 km² dibagi dengan Wilayah administrasi sebanyak 8201.72 km² dengan persentase 92.72%.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017-2021

Berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2021 yang juga sekaligus menjadi periode akhir RPJMD tahun 2016 – 2021, maka indikator kinerja Persentase Pelayanan akses air bersih/ minum yang aman mengalami kenaikan dari tahun ketahun sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.19
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/Minum Yang Aman Tahun 2017 – 2021

Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelayanan akses air bersih/ minum yang aman (%)	89,44	89,44	100%	92,19	92,15	100%	96,79	92,47	95,54%	97,59	92,68	94,97%	100	92,72	92,72%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman dari Tahun 2020 ke Tahun 2021. Pada Tahun 2020 realisasi persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman sebesar 92,68% sedangkan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 92,72%. Adapun pelayanan akses air bersih/minum yang aman pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut ini :



Tabel. 3.20
Pelayanan Akses Air Bersih/Minum Yang Aman Pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri Tahun 2017 – 2020

Kab/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
	Luas wilayah (km2)	Persentase Terlayani air bersih (%)	Luas wilayah yang terlayani (km2)	Luas wilayah (km2)	Persentase Terlayani air bersih (%)	Luas wilayah yang terlayani (km2)	Luas wilayah (km2)	Persentase Terlayani air bersih (%)	Luas wilayah yang terlayani (km2)	Luas wilayah (km2)	Persentase Terlayani air bersih (%)	Luas wilayah yang terlayani (km2)	Luas wilayah (km2)	Persentase Terlayani air bersih (%)	Luas wilayah yang terlayani (km2)
Tanjungpinang	144.56	72.82%	105.27	144.56	91.48%	132.24	144.56	98.03%	141.71	144.56	98,03%	141,71	144.56	88.41%	127.81
Bintan	1318.21	59.04%	778.27	1318.21	82.84%	1092.01	1318.21	90.40%	1191.66	1318.21	92,97%	1225,53	1318.21	92.97%	1225.54
Batam	960.25	96.50%	926.64	960.25	97.21%	933.46	960.25	93.96%	902.25	960.25	93,96%	902,25	960.25	97.96%	940.63
Karimun	912.75	20.12%	183.65	912.75	81.07%	739.97	912.75	88.41%	806.96	912.75	88,41%	806,96	912.75	81.66%	745.35
Lingga	2266.77	72.09%	1634.11	2266.77	81.74%	1852.86	2266.77	81.66%	1851.04	2266.77	81,66%	1851,04	2266.77	61.78%	1400.41
Natuna	2009.04	55.86%	1122.25	2009.04	87.19%	1751.68	2009.04	96.58%	1940.33	2009.04	97,83%	1965,52	2009.04	94.04%	1889.37
Anambas	590.14	67.07%	395.81	590.14	62.38%	368.13	590.14	61.78%	364.59	590.14	61,78%	364,59	590.14	99.72%	588.46
Kepri	8201.72	89.44%	7335.62	8201.72	92.15%	7557.88	8201.72	92.47%	7584.13	8201.72	92,68%	7601,05	8201.72	92.72%	7604.36



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelayanan akses air bersih/minum yang aman Tahun 2021 paling tinggi adalah di Kota Tanjungpinang yakni sebesar 99,72% dan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni sebesar 61,78%. sedangkan pada Tahun 2020 pelayanan akses air bersih/minum yang aman paling tinggi masih sama yakni di Kota Tanjungpinang sebesar 98,03% dan yang paling rendah masih berada di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni sebesar 61,78%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja Persentase Pelayanan akses air bersih/minum yang aman dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Dapat dilihat perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Persentase Pelayanan akses air bersih/ minum yang aman dengan target nasional pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Target Nasional Tahun 2021

N o	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Provinsi	Capaian
1	Persentase Pelayanan akses air bersih/ minum yang aman	93,18%	92,72%	99,51%

Definisi sumber air minum layak adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang terlindung, meliputi: (i) ledeng perpipaan (keran individual); (ii) ledeng eceran; (iii) keran umum/hydrant umum; (iv) terminal air; (v) penjual eceran; (vi) penampungan air hujan (PAH); (vii) mata air terlindungi; (viii) sumur terlindungi; dan (ix) sumur bor atau sumur pompa.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dinilai atas dua aspek yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dan kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dan tingkat efisiensi keuangan. Capaian kinerja Pelayanan akses air bersih/minum yang aman berdasarkan sasaran strategis sebesar 92.72% dan capaian berdasarkan penyerapan keuangan pada tahun 2021 adalah sebesar 56,93%. Sehingga Kegagalan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam Capaian Indikator



Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/Minum yang Aman dikarenakan faktor Refocusing Anggaran yang menyebabkan beberapa pekerjaan yang telah ditargetkan tidak dapat diselesaikan sesuai target sasaran.

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori **sangat baik**. Dukungan program/kegiatan/sub kegiatan penunjang capaian kinerja Pelayanan akses air bersih/ minum yang aman pada tahun anggaran 2021 yang bersumber dari dana APBD-P Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Program/Kegiatan Penunjang Capaian Pelayanan Akses Air Bersih/Minum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Kinerjs			Anggaran				Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi	
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100.00%	92,72%	92.72%	2,706,500,000	1.540.750.524,23	56,93%	-	-
	Pembangunan Penyediaan Air Bersih di Senggarang (KOREM)				1.300.000.000	366.019.663			
	PEMBANGUNAN PIPA JARINGAN AIR BERSIH TANJUNG - KELANGA – KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT				329.000.000	328.388.115			
	Pembangunan Sumur Bor dan Fasilitas Air Bersih Muslim Pulau Seraya				127.500.000	127.500.000			
	Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan tersier di jalan Ganet kota Tanjungpinang				850.000.000	618.842.747			
	PENGEMBANGAN JARINGAN PERPIPAAN DISTRIBUSI SWRO TANJUNGPINANG				100.000.000	100.000.000			

G. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**1. Anggaran**

Pagu Anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 mengalami refocusing/pengurangan pagu anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penanganan pandemic Covid-19. Sehingga terdapat beberapa capaian kinerja dari program/kegiatan tahun 2021 tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau telah cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Waktu Pelaksanaan

Terdapat kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 yaitu adanya permasalahan Pandemi Covid-19, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan beberapa program/kegiatan tahun 2021 yang tidak sesuai dengan target waktu pelaksanaan yang telah direncanakan. Kondisi cuaca dan geografis Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi sehingga menghambat waktu pelaksanaan program/kegiatan.

SASARAN. 5
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi

Dewasa ini, listrik memegang peranan yang sangat dominan dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketergantungan bangsa ini terhadap listrik sangat besar, sehingga ketidaktersediaan listrik akan menimbulkan masalah yang krusial, bahkan bisa mengakibatkan lumpuhnya roda perekonomian bangsa. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dibidang kelistrikan. Untuk mencapai sasaran percepatan pembangunan infrastuktur dasar dibidang kelistrikan dapat dilihat melalui indikator rasio elektifikasi.

Elektrifikasi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian atau penggantian dengan listrik (sebelumnya tidak digunakan listrik) atau pemasangan atau pemberian tenaga listrik (pada mesin-mesin kereta api dan sebagainya).

Sedangkan rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik dengan jumlah rumah tangga total di suatu wilayah atau negara.

Berikut dapat dilihat capaian kinerja percepatan infrastruktur dasar dengan indikator rasio elektrifikasi tahun 2021 :

Tabel. 3.23
Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
Rasio Elektrifikasi Tahun 2021

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Rasio Elektrifikasi	94,50%	94,50%	100,00%

Analisis terhadap capaian rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik dari PLN maupun Non PLN) sebesar 635.593 RT dibagi dengan jumlah rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau sebesar 672.614 RT= 94,50%.

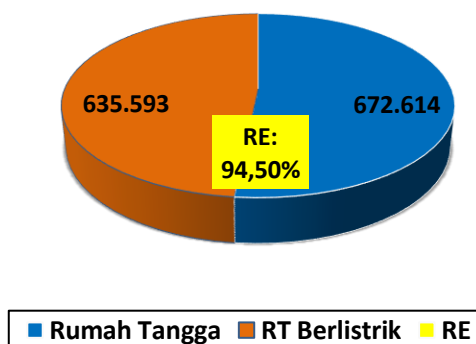
Hasil analisis Rasio Elektrifikasi pada tahun 2021 dengan target sebesar 94,50% dapat tercapai sebesar 94,50% sehingga capaian kinerja sebesar 100,00% atau dalam kategori **kinerja Sangat Baik**.

Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dengan terlaksananya beberapa program kelistrikan seperti Program Bantuan Penyambungan Listrik PLN bagi Rumah Miskin, Program Listrik Pedesaan Tahun 2021, Program Melistriki Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), program merangkai pulau-pulau dengan kelistrikan, serta adanya program penambahan pembangunan kelistrikan Non PLN di beberapa daerah di kab/kota Provinsi Kepulauan Riau antara lain dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan khususnya PLTS Komunal dan ditambah data pendukung yaitu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

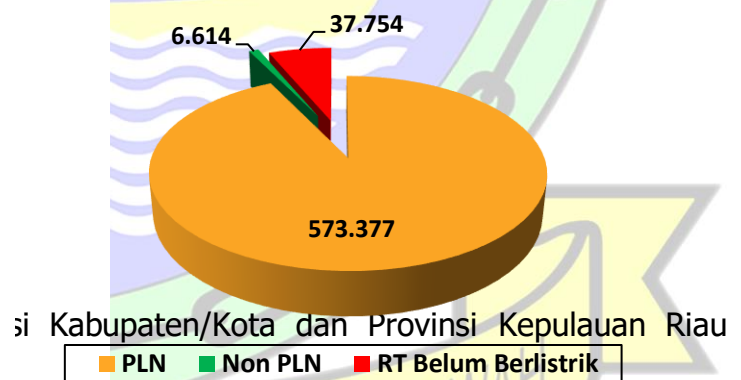
Capaian kinerja dibidang kelistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN, rumah tangga yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan rumah tangga yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut :

Grafik. 3.2
Kondisi Rasio Elektrifikasi Tahun 2021

RASIO ELEKTRIFIKASI (RE)



RUMAH TANGGA BERLISTRIK

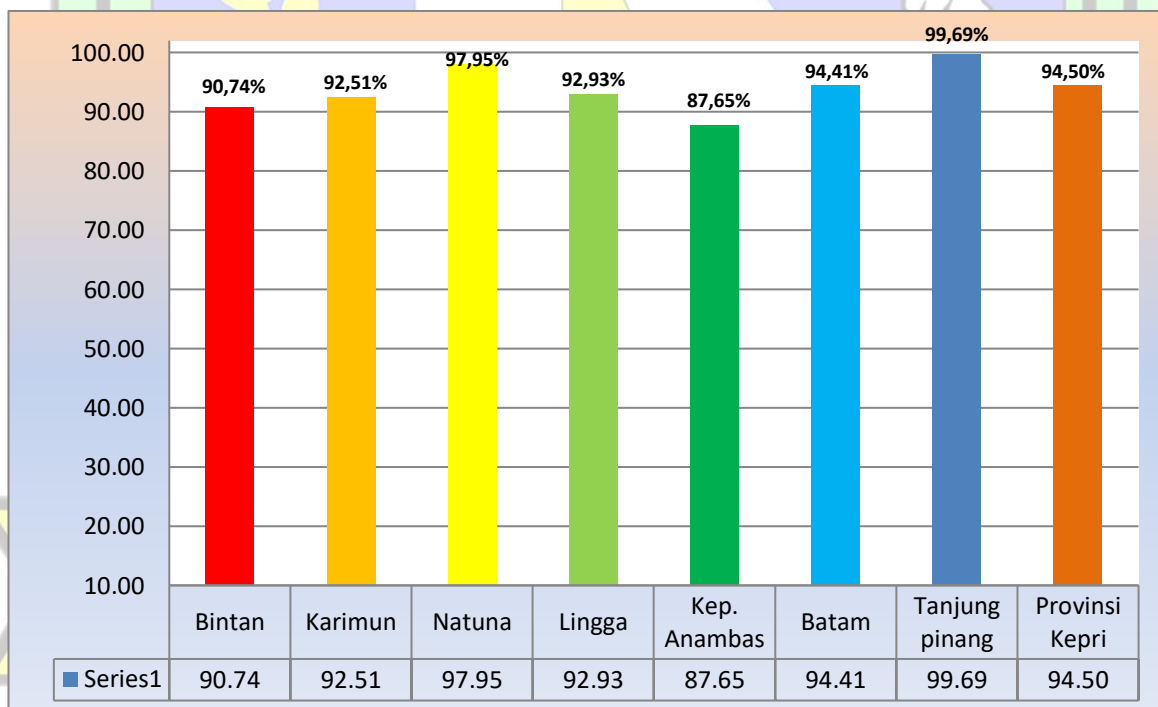




Tabel 3.24
Data Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE (%)
			PLN	Non-PLN	LTSHE	Jumlah		
1	BINTAN	58.866	53.052	364	-	53.416	5.450	90,74
2	KARIMUN	83.237	75.843	1.156	-	76.999	6.238	92,51
3	NATUNA	24.932	24.255	166	-	24.421	511	97,95
4	LINGGA	28.159	26.015	152	-	26.167	1.992	92,93
5	KEP. ANAMBAS	15.203	12.790	535	-	13.325	1.878	87,65
6	BATAM	369.796	347.713	1.414	-	349.127	20.669	94,41
7	TANJUNGPINANG	92.421	92.137	0	-	92.137	284	99,69
Total Provinsi Kepri		672.614	631.806	3.787	-	635.593	37.021	94.50%

Grafik. 3.3
Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021



Keterangan :

1. Jumlah rumah tangga berlistrik PLN berdasarkan data unit layanan pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang dan pemegang wilayah usaha ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.



2. Jumlah rumah tangga berlistrik non PLN berdasarkan wilayah yang mendapatkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut realisasi serta capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2021 :

Tabel 3.25
Realisasi dan Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020-2021

Indikator kinerja	2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Elektrifikasi	93,50%	93,72%	100,24	94,50%	94,50%	100,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 ke tahun 2021 terdapat peningkatan yaitu pada tahun 2020 dengan target 93,50% terealisasi sebesar 93,72% dengan persentase capaian 100,24%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi meningkat menjadi 94,50% dari target sebesar 94,50% dengan persentase capaian sebesar 100,00%.

Adapun perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

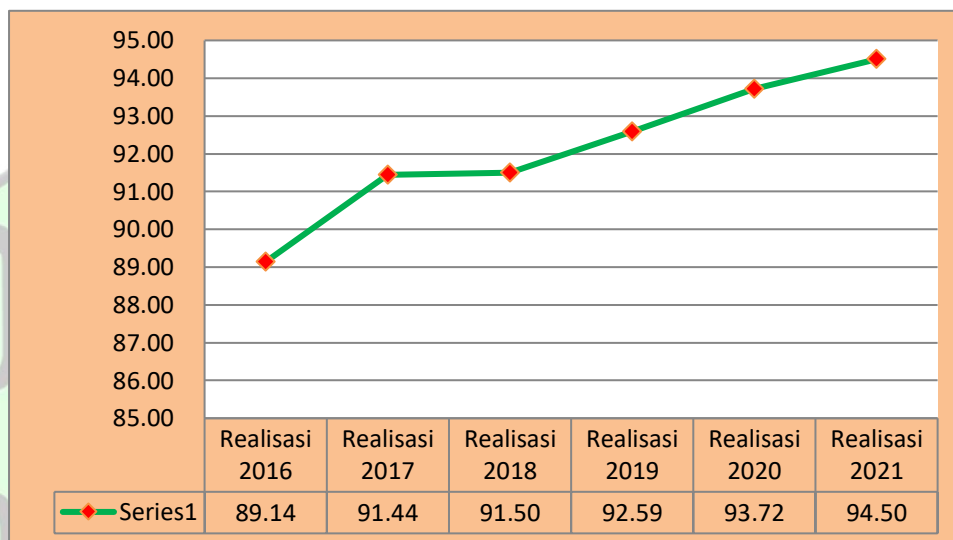
Tabel. 3.26
Evaluasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Kep. Riau
Tahun 2016-2021

No	Indikator kinerja	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga (RT)	464.107	523.564	523.931	539.421	628.596	635.593
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	520.631	572.581	572.581	582.570	670.701	672.614
3	Rasio Elektrifikasi	89,14%	91,44%	91,50%	92,59%	93,72%	94,50%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2016 ke tahun 2021. Pada tahun 2016 realisasi rasio elektrifikasi sebesar 89,14%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 91,44%, lalu pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 91,50%, tahun 2019 juga meningkat menjadi 92,59%, tahun 2020 kembali meningkat menjadi 93,72% dan di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 94,50%.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2016-2021 dapat digambarkan seperti grafik dibawah ini :

Grafik. 3.4
Pencapaian Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau
dari Tahun 2016-2021



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2016 samapai dengan tahun 2021. Pada tahun 2016 rasio elektrifikasi sebesar 89,14% sedangkan sampai dengan tahun 2021 meningkat menjadi 94,50% maka ada peningkatan sebesar 5,36%.

Adapun Rasio Elektrifikasi pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 s.d 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

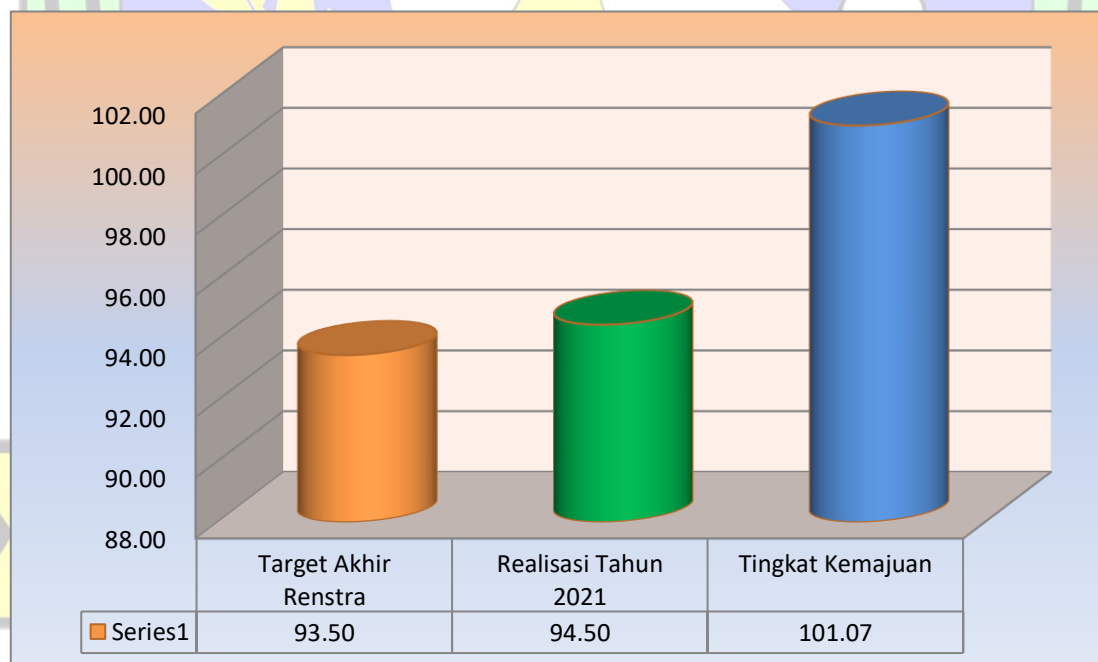
Tabel. 3.27
Evaluasi Rasio Elektrifikasi Pada Kabupaten/ Kota se Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016 s.d 2021

No	Kab/Kota	Realisasi 2016			Realisasi 2017			Realisasi 2018			Realisasi 2019			Realisasi 2020			Realisasi 2021		
		Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (RT)	Jumlah Rumah Tangga se Prov. Kepri (RT)	RE	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (RT)	Jumlah Rumah Tangga se Prov. Kepri (RT)	RE	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (RT)	Jumlah Rumah Tangga se Prov. Kepri (RT)	RE	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (RT)	Jumlah Rumah Tangga se Prov. Kepri (RT)	RE	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (RT)	Jumlah Rumah Tangga se Prov. Kepri (RT)	RE	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (RT)	Jumlah Rumah Tangga se Prov. Kepri (RT)	RE
1	Tg.Pinang	62.177	63.000	98,70	55.603	55.603	99,64	55.403	55.603	99,64	68.772	53.200	100	92.137	92.137	100	92.137	92.421	99,69
2	Bintan	42.021	42.915	97,92	37.823	42.003	90,05	37.884	42.003	90,19	41.841	42.330	98,84	52.544	58.382	90,00	53.416	58.866	90,74
3	Batam	262.325	300.043	87,43	329.923	361.364	91,30	329.978	361.364	91,31	322.752	369.250	87,41	347.160	369.250	94,02	349.127	369.796	94,41
4	Karimun	50.936	57.928	83,93	51.600	57.790	89,29	51.669	57.790	89,41	58.327	59.780	97,57	74.898	83.229	89,99	76.999	83.237	92,51
5	Lingga	20.778	25.295	82,14	21.135	24.098	87,70	21.181	24.098	87,90	20.058	25.820	77,68	25.059	28.156	89,00	26.167	28.159	92,93
6	Natuna	16.793	20.268	82,85	18.431	20.790	88,65	18.431	20.790	88,65	18.253	20.840	87,59	24.110	24.927	96,72	24.421	24.932	97,95
7	Anambas	9.077	11.182	81,18	9.249	10.933	84,60	9.385	10.933	85,84	9.418	11.350	82,98	12.688	14.620	86,79	13.325	15.203	87,65
Total		464.107	520.631	89,14	523.564	572.581	91,44	523.931	572.581	91,50	539.421	582.570	92,59	628.596	670.701	93,72	635.593	672.614	94,50

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio elektrifikasi pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 paling tinggi adalah Kota Tanjung Pinang dan paling rendah adalah Kabupaten Anambas. Sedangkan Untuk Tahun 2019 paling tinggi adalah Kota Tanjungpinang yakni 100,00% dan yang paling rendah Kabupaten Lingga yakni 77,68%. Sedangkan Tahun 2020 yang paling tinggi adalah Kota Tanjungpinang yakni 100,00% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 86,79%. Tahun 2021 yang paling tinggi adalah Kota Tanjungpinang yakni 99,69% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 87,65%. Pada tahun sebelumnya yakni Tahun 2019-2020 Kota Tanjungpinang telah mencapai 100,00%, namun pada Tahun 2021 rasio elektrifikasi Kota Tanjungpinang yakni 99,69% hal ini disebabkan karena adanya penambahan data jumlah rumah tangga baru di Kota Tanjungpinang yang belum berlistrik.

Jika di bandingkan dengan Target Akhir RPJMD maka dapat dilihat perbandingan sebagai berikut :

Grafik. 3.5
Perbandingan Akhir Periode RPJMD dan Realisasi Kinerja



Tingkat kemajuan sasaran strategis “ **Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar** ” dengan indikator “ **Rasio Elektrifikasi** ” jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh tingkat kemajuan sebesar 101,07%.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta meningkatkan rasio desa berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menikmati listrik, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar dikarenakan kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD serta jenis sumber energi primer yang terbatas.
2. Untuk rasio desa berlistrik, selain kendala diatas adalah masalah mobilisasi material ke lokasi pembangkit yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero), serta tanah/jalur yang akan dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Menggunakan pembangkit yang kecil, tersebar dan menghubungkan antar pulau yang berdekatan serta memanfaatkan sumber energi primer yang tersedia melimpah di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi tegangan menengah.
2. Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja :

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Anggaran

Pagu Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 mengalami refocusing/pengurangan pagu anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penanganan pandemic Covid-19. Sehingga terdapat beberapa capaian kinerja dari program/kegiatan tahun 2021 tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Waktu Pelaksanaan

Terdapat kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 yaitu adanya permasalahan Pandemi Covid-19, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan beberapa program/kegiatan tahun 2021 yang tidak sesuai dengan target waktu pelaksanaan yang telah direncanakan. Kondisi cuaca dan geografis Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi sehingga menghambat waktu pelaksanaan program/kegiatan.

B. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan.

Program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ketenaga listrikan dengan pagu Rp. 5.420.447.668, terealisasi Rp. 5.111.288.997,98 (94,30%), dengan rincian kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Rp. 5.258.850.768,- terealisasi Rp. 4.969.254.497,98 (94,49%) pada sub kegiatan:
 - Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu dengan pagu Rp. 2.103.640.350,-, terealisasi Rp. 1.945.702.890,- (92,49%).
 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan pagu Rp. 30.980.000,-, terealisasi Rp. 21.568.200,- (69,62%).
 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan pagu Rp. 2.998.616.718,-, terealisasi Rp. 2.890.153.247,98 (96,38%).



- Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan pagu Rp. 125.613.700,-, terealisasi Rp. 111.830.160,- (89,03%).
 - b. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Rp. 111.353.900,-, terealisasi Rp. 102.725.000,- (92,25%) pada sub kegiatan:
 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 28.420.000,-, terealisasi Rp. 31.266.500,- (110,02%).
 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 82.933.900,-, terealisasi Rp. 71.458.500,- (86,16%).
 - c. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Rp. 50.243.000,-, terealisasi Rp. 39.309.500,- (78,24%) pada sub kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 50.243.000,-, terealisasi Rp. 39.309.500,- (78,24%).
2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan dengan pagu Rp. 1.022.916.250,- terealisasi Rp. 822.268.000,- (80,38%), Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Rp. 1.022.916.250,- terealisasi Rp. 822.268.000,- (80,38%), dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi dengan pagu Rp. 249.872.500,- terealisasi Rp. 140.322.500,- (56,16%).
 - Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi dengan pagu Rp. 726.510.000,- terealisasi Rp. 645.303.100,- (88,82%).
 - Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi dengan pagu Rp. 46.533.750,- terealisasi Rp. 36.642.400,- (78,74%).

SASARAN 6
Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia, mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia. dengan mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia yaitu:

"Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila."

Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan. Mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha / industri, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lainnya. Harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 kebijakan pendidikan baru hasil pembaharuan dari sistem sebelumnya. 10 kebijakan tersebut tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 – 2035
10 Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar :

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK – SD – SMP – SMA, informal)
2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah
3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata
6. Membangun sekolah / lingkungan belajar masa depan

7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan
8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi
9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia
10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih

Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah, sebagai penanda meningkatnya kualitas pendidikan.

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS 2015). Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sedangkan cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan Rata-rata Lama Sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. Usia 25 tahun dipakai batasan berdasarkan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Saat ini dunia pendidikan sedang menghadapi berbagai macam tantangan akibat wabah pandemi Covid 19. Social distance merupakan pilihan berat dalam menerapkan pencegahan penyebaran virus ini yang kita kenal adalah kebijakan pemberlakuan PPKM. kebijakan ini berdampak negatif setiap aspek kehidupan. Pembatasan interaksi social masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, namun tidak ada pilihan lain selain pembatasan sosial, karena cara inilah yang paling efektif untuk mengurangi resiko penularan Covid 19, kendala yang di alami Provinsi Kepulauan Riau dalam urusan pendidikan di masa pandemi Covid 19 antara lain:

1. Kegiatan proses pembelajaran mengalami perubahan yang cukup besar dan harus cepat beradaptasi.
2. Pelaksanaan pendidikan harus bergantung pada koneksi internet.
3. Guru mengalami kesulitan dalam mengajar yang harus menyesuaikan dengan penguasaan teknologi
4. Terkendala oleh biaya internet yang cukup besar.
5. Siswa tidak semua memiliki smartphome dan computer yang terkoneksi dengan internet.

Tabel. 3.28
Evaluasi Capaian Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	Capaian (%)
1.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,41	10,18	97,79

Di Provinsi Kepulauan Riau Angka Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 10,41 (tahun) dan realisasi tahun 2021 sebesar 10,18 (tahun). Rata-rata penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,18 tahun berarti penduduk Provinsi Kepulauan Riau rata-rata berada pada jenjang Pendidikan Menengah kelas I, jika dilihat berdasarkan kategori maka indikator ini berada pada **kategori baik** dimana Presentase capaiannya sebesar 97,79%. Peningkatan Rata Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau di tengah Pandemi Covid 19 merupakan hal positif dalam rangka memperkecil angka putus sekolah meskipun secara target belum tercapai.

Berikut kondisi rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 :

Tabel. 3.29
Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021
1	Tanjungpinang	10,25	10,26
2	Bintan	8,44	8,67
3	Batam	11,14	11,15
4	Karimun	8,17	8,18
5	Lingga	6,67	6,88
6	Natuna	8,73	8,92
7	Anambas	7,17	7,34
Kepulauan Riau		10,12	10,18

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel 3.29 di atas dapat dilihat terjadi peningkatan sebesar 0,59 % angka rata rata lama sekolah Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020.

Angka rata-rata lama sekolah per kabupaten/kota dapat dilihat angka tertinggi yaitu di kota Batam angka rata-rata lama sekolah sebesar 11,14 (Tahun) pada tahun 2020 dan terjadi peningkatan 0,01 pada tahun 2021 yaitu sebesar 11,15, angka ini

menunjukkan pada tahun 2021 rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas sudah berada pada pendidikan SMA kelas 2 dan angka rata-rata lama sekolah yang terendah yaitu di kabupaten Lingga pada tahun 2020 masih di angka 6,67 dan naik sedikit pada tahun 2021 yaitu 6,88 angka ini menunjukkan bahwa di kabupaten lingga penduduk berusia 25 tahun ke atas pendidikannya masih di tingkat SD/MI.

Tabel. 3.30
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2021	Target akhir RPJMD (2021)	%
1.	Rata-rata lama Sekolah	10,18	10,41	97,79%

Sumber Data : Data Olahan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri

Pada Tabel 3.30 capaian pada indikator Rata – rata Lama Sekolah pada tahun 2021 apabila diperbandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 masih belum tercapai dimana realisasi pada tahun 2021 sebesar 10,18% dan di targetkan pada akhir tahun RPJMD sebesar 10,47%, karena capaian ini merupakan penghitungan usia penduduk di atas 25 tahun yang bersekolah dan penghitungannya merupakan kewenangan BPS maka di sini terlihat pada saat ini penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata berada pada tingkat pendidikan SM kelas 1, dan di harapkan untuk periode renstra berikutnya dapat di tingkatkan rata-rata lama sekolah minimal sampai rata-rata tamatan Sekolah Menengah (SM).

Tabel. 3.31
Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah 2017-2021

INDIKATOR	2017		2018		2019		2020		2021	
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Rata Rata Lama sekolah (Tahun)	9,79	99,59	9,81	98,1	9,99	97,94	10,12	97,31	10,18	97,79

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 3.31 di atas dapat dilihat realisasi kinerja di Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,20 % dari realisasi kinerja Tahun 2017 meskipun secara target tidak tercapai. Di Tahun 2019 mengalami kenaikan realisasi kinerja sebesar 1,81 % dari tahun

2018. Terjadi juga peningkatan realisasi kinerja sebesar 1,2 % di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 kenaikan realisasi kinerja sebesar 0,59 % dari Tahun 2020.

Melihat Tabel. 3.32 Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun mengalami peningkatan capaian angka rata rata lama sekolah, dengan program wajib belajar 9 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau tentunya hal ini menjadi hasil yang baik. Sehingga kedepannya secara perlahan tapi pasti Provinsi Kepulauan bisa membuat program wajib belajar 12 Tahun.

Tabel. 3.32
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Nasional

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional 2021	%
1.	Jumlah Rata-rata lama Sekolah	10,18	8,54	119,20%

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Jika melihat Tabel 3.32, dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah secara nasional di mana Kepulauan Riau jauh di atas nasional, dimana Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai angka 10,18 atau rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas sudah berada pada tingkat SM kelas 1, sementara secara nasional rata-rata lama sekolah masih di angka 8,54 atau penduduk Indonesia secara rata-rata baru pada tingkat SMP kelas III.

Adapun beberapa langkah yang terus dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi melalui Pelaksanaan Program Kegiatan dalam APBD Tahun 2021 guna meningkatkan angka rata rata lama sekolah yaitu : **Pemerataan Kuantitas Tenaga Pendidik**, melihat letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Kepulauan Pemerataan Kuantitas Tenaga Pendidik perlu di lakukan untuk menjaga kesenjangan antar wilayah hal ini dilakukan melalui Mutasi dan Rotasi hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meratakan kualitas/mutu Pendidikan, Di tahun 2021 1.781 PTK Non ASN yang di terima di Provinsi Kepulauan Riau, dengan bertambahnya jumlah Guru yang berasal dari PTK Non ASN sebagai salah satu cara dalam pemerataan Tenaga Pendidik. **Penambahan Ruang Kelas Baru / Rehabilitasi Ruang Kelas**. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggap Proses pendidikan yang baik didukung oleh fasilitas sarana prasarana pendidikan yang memadai. Salah satu sarana utama agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar adalah ruang kelas. Ruang kelas menjadi sarana prasarana penunjang pendidikan yang harus ada sebelum sarana pendidikan yang lainnya.

Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan menjalankan 1 (satu) Program pembangunan untuk urusan pendidikan yaitu **Program Pengelolaan Pendidikan**, yang di tunjang oleh 3 Kegiatan yaitu : (1) *Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas*, (2) *Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan* dan (3) *Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus*. dan **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** yang di dukung oleh Kegiatan yaitu : (1).Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (3).Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (4). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (5)Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6) Administrasi Umum Perangkat Daerah (7). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. (8). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (9). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Data alokasi belanja Dinas Pendidikan Tahun 2021berdasarkan Program terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.33
Realisasi Belanja berdasarkan Program Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Program Pengelolaan Pendidikan	401.994.678.112, -	368.923.973.576	91,77
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	228.247.861.041, -	205.640.246.891	90,10
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan	157.825.846.216, -	148.669.674.539	94,20
Pengelolaan Pendidikan Khusus	15.920.970.855, -	14.614.052.147	91,79

Sumber Data : Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPP)

Secara umum, alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau bidang pendidikan mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Penurunan ini terkait Rasionalisasi Anggaran yang terjadi secara Nasional dalam rangka Penanganan Covid 19 dan dalam upaya Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi dana pendidikan bertujuan untuk membiayai segala aktivitas dan pembangunan di bidang pendidikan. Dengan adanya anggaran bidang pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang indikatornya salah satunya peningkatan Angka Rata Rata Lama sekolah. Dan juga Peningkatan anggaran sebagai upaya dalam meningkatkan Mutu dan akses layanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan. Penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi, tim penilai, pemberi masukan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan kegiatan kegiatan pendidikan.

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya :

a. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, Alokasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau bidang pendidikan mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Penurunan ini terkait Rasionalisasi Anggaran yang terjadi secara Nasional dalam rangka Penanganan Covid 19 dan dalam upaya Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN). Alokasi dana pendidikan bertujuan untuk membiayai segala aktivitas dan pembangunan di bidang pendidikan. Program tetap berjalan karena Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) masih mendukung dalam pelaksanaan program pengelolaan pendidikan.

Dengan adanya anggaran bidang pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau yang indikatornya salah satunya peningkatan Angka Rata Rata Lama sekolah, dan juga Peningkatan anggaran sebagai upaya dalam meningkatkan Mutu dan akses layanan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Sumberdaya Manusia

Pelaksanaan Program/kegiatan telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan. Penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi, tim penilai, pemberi masukan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan kegiatan kegiatan pendidikan.

Jumlah sumberdaya Manusia pada Dinas Pendidikan pada tahun 2021 berkurang karena adanya memasuki masa pensiun, namun demikian komitmen pelayanan tetap dilaksanakan, ini terbukti dengan adanya Cabang Dinas di Kota Batam, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan dalam mengurus administrasi kependidikan.

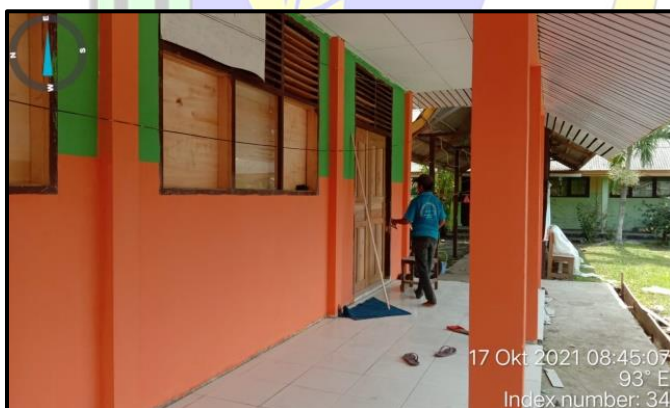
c. Waktu Pelaksanaan

Mulai dari awal pelaksanaan kegiatan, sebagian besar tidak mengalami kendala dan dapat berjalan sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia sudah mulai terpenuhi meskipun tidak secara keseluruhan, akan tetapi pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi pendidikan tetap berjalan dengan baik seperti pengurusan legalisir ijazah, Pengurusan Pindah rayon dan pengurusan administrasi tenaga pendidik (Guru) .

Beberapa Pembangunan Sarana dan Prasarana di Tahun 2021



REHAB RUANG KELAS SMAN BUNGURAN TIMUR,
NATUNA



Pembangunan Ruang Praktek Siswa
SMKN 8 Batam



REHAB LAB.BIOLOGI SMAN BUNGURAN TIMUR, NATUNA



REHAB RUANG KELAS SMAN I PALMATAK, ANAMBAS



PEMBANGUNAN RUANG GURU, SMAN I BURU, KARIMUN



PEMBANGUNAN LAB.KOMPUTER, SMAN I BURU, KARIMUN



SASARAN. 7***Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja***

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah. Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan profesionalisme tenaga kerja ditetapkan indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan evaluasi capaian sebagai berikut:

Tabel. 3.34
Capaian Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja Tahun 2021

N o	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,60	9,91	49.84

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 9,91 persen. Tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT menjelaskan seberapa banyak jumlah pengangguran dalam setiap 100 angkatan kerja.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 1.207.014 orang, naik 73.238 orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,99 persen poin.

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2011-2021 adalah sebagai berikut Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja.

Kriteria Penganggur Terbuka terdiri dari :

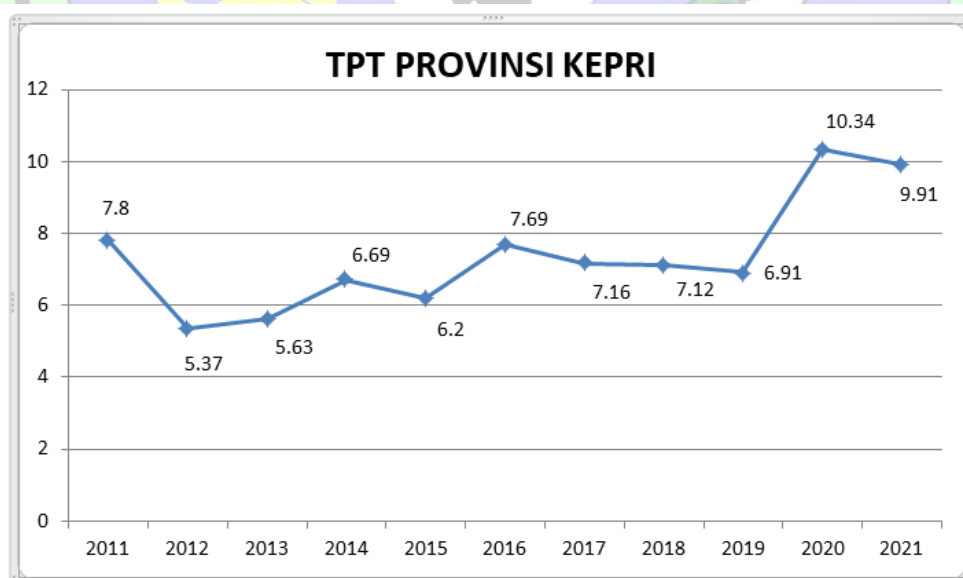
1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan pekerjaan
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Analisis indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio dari jumlah penganggur terbuka yakni 119.595 orang dengan jumlah angkatan kerja yakni 1.207.014 sehingga Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,91%.

Hasil analisis indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan yakni 6,6 hanya terealisasi sebesar 9,91 (angka TPT semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 49.84% termasuk dalam kategori kinerja **Kurang**

Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2011-2021 adalah sebagai berikut :

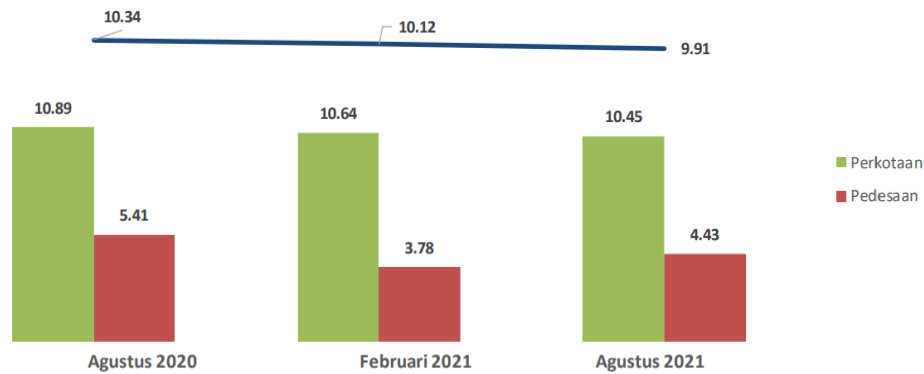
Grafik. 3.6
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011-2021



Dalam lima tahun terakhir, TPT di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari periode tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan sebesar 0,49 poin persen, dari tahun 2015 ke 2016 terjadi peningkatan sebesar 1,49 poin

persen, dari tahun 2016 sampai 2018 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan walaupun tidak begitu signifikan. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12 persen. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Adanya Pengaruh Covid -19 diberbagai sektor menyebabkan angka TPT Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 3,43 poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 9,91 persen, turun 0,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Terdapat 209 506 orang (11,85 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (41 275 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (5.889 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (11 698 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (150.644 orang)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Jika dilihat Berdasarkan tipe daerah, TPT wilayah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,28 poin persen. Sebaliknya, TPT di daerah perdesaan mengalami penurunan dari 5,39 persen pada tahun 2017, menjadi 2,77 persen pada tahun 2018. Pada Tahun 2019 TPT perkotaan sebesar 7,21 persen sedang di perdesaan sebesar 3,93 persen. Mengalami penurunan sebesar 0,48 persen poin, demikian juga TPT diperkotaan mengalami dan TPT perdesaan mengalami peningkatan sebesar 1,16 persen poin dibandingkan Tahun 2018. Tahun 2020 dengan kondisi Covid-19 TPT Perkotaan maupun pedesaan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 10.89 untuk perkotaan (naik sebesar 3.09 persen poin) dan TPT Pedesaan sebesar 5,41 (naik sebesar 0.91 persen poin) dari periode Agustus 2019. Pada Periode Agustus 2021, TPT perkotaan (10,45 persen) lebih tinggi hampir dua kali TPT di daerah perdesaan (4,43 persen).



Gambar. 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Agustus 2020–Agustus 2021

Dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan turun sebesar 0,19 persen poin dan TPT pedesaan sebesar 1,88 persen poin dan 0,62 persen poin. Namun jika dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,98 persen poin dan 0,65 persen poin.

Tabel. 3.35
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, 2011-2021

DAERAH	TAHUN										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perkotaan	8.28	5.73	5.97	7.03	6.31	8.18	7.41	7.69	7.21	10.89	10.45
Perdesaan	5.46	3.49	3.71	4.76	5.58	4.54	5.39	2.77	3.93	5.41	4.43
TPT	7.80	5.37	5.63	6.69	6.20	7.69	7.16	7.12	6.91	10.34	9.91
JENIS KELAMIN											
Laki-Laki	6.61	5.30	3.64	5.60	6.10	7.54	7.14	7.98	7.78	10.87	9.42
Perempuan	10.07	5.51	9.67	8.87	6.41	7.97	7.19	5.54	5.90	9.38	10.72
TPT	7.80	5.37	5.63	6.69	6.20	7.69	7.16	7.12	6.91	10.34	9.91

Sumber : Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2011-2021

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Tahun 2021, Pada Agustus 2021, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 11,75 persen. Sementara TPT yang

paling rendah adalah mereka dengan pendidikan universitas yaitu sebesar 7,09 persen. TPT untuk Sekolah menengah Kejuruan (SMK) mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 9.96 persen atau turun sebesar 6.59 persen poin dari tahun 2020. Artinya pada periode tahun 2021 ada penyerapan yang cukup signifikan terhadap angkatan kerja tamatan SMK.

TPT tertinggi terdapat pada Sekolah menengah Atas (SMA) sebesar 11,75 persen, Dan tamatan SMP sebesar 11.72 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang kurang terserap terutama pada tingkat pendidikan SMP dan SMA. Namun begitu, berdasarkan tren karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan terdapat penyerapan tenaga kerja lulusan SMK dan SMA Pada tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan dari Tahun 2020 yaitu sebesar 243.461 (naik 3.36 poin) orang untuk SMK dan 330.605 orang untuk SMA (naik 0.53 point). Dan selama covid-19 berdasarkan data karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan kategori Diploma jauh mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 53.429 menjadi 43.651 (pengurangan sebesar 9.778 orang) atau turun menjadi -1.24 persen poin dari tahun 2020.

Berikut rincian TPT pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021:

Tabel. 3.36
Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepri Tahun 2021

No	Kab/ Kota	Realisasi 2021		
		Jumlah Penganggur Terbuka (Orang)	Angkatan Kerja	TPT
1	Tanjungpinang	6,366	100,874	6,31
2	Bintan	6,601	76,577	8,62
3	Batam	94,384	781,064	11,64
4	Karimun	7,801	108,416	7,20
5	Lingga	1,726	40,288	4,23
6	Natuna	1,977	41,528	5,15



7	Anambas	740	58,267	1,27
Total		119.595	1.207.014	9,91

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada Tahun 2019 terjadi di Kota Batam sebesar 7,72% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar 2,91%.

Adapun Evaluasi tingkat pengangguran terbuka pada setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 3.37
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepri Tahun 2020-2021

No	Kab/ Kota	TPT		
		2020	2021	Perubahan 1 Tahun
1	Tanjungpinang	9.30	6,31	2.99
2	Bintan	8.86	8,62	0.24
3	Batam	11.79	11,64	0,15
4	Karimun	8.36	7,20	1.16
5	Lingga	4.41	4,23	0.18
6	Natuna	4.10	5,15	-1.05
7	Anambas	3.44	1,27	2.17
Total		10,34	9.91	0,43

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2020 maka Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari target RPJMD, di mana pada target RPJMD jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5%, sedangkan realisasi sebesar 10,34%, sehingga baru mencapai 19.81%. Perbandingan target RPJMD dengan capaian tahun 2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3. 38
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2020	Target akhir RPJMD (2021)	%
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,91	5,5	19,81

Secara Nasional diketahui bahwa bila dibandingkan dengan 10 Provinsi lain di Sumatera, maka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau termasuk tertinggi. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan TPT Nasional yakni 6,49%.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.39
TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2021

Provinsi (1)	Agustus 2021 (2)
Aceh	6.30
Sumatera Utara	6.33
Sumatera Barat	6.50
Riau	4.42
Jambi	5.09
Sumatera Selatan	4.98
Bengkulu	3.65
Lampung	4.69
Kepulauan Bangka Belitung	5.08
Kepulauan Riau	9.91
DKI Jakarta	8.50
Jawa Barat	9.82
Jawa Tengah	5.95
D.I. Yogyakarta	4.56
Jawa Timur	5.74
Banten	8.98
Bali	5.40
Nusa Tenggara Barat	2.76
Nusa Tenggara Timur	3.77
Kalimantan Barat	5.75
Kalimantan Tengah	4.53
Kalimantan Selatan	4.95
Kalimantan Timur	6.82
Kalimantan Utara	4.58
Sulawesi Utara	7.06
Sulawesi Tengah	3.75
Sulawesi Selatan	5.69
Sulawesi Tenggara	3.92
Gorontalo	3.01
Sulawesi Barat	3.13
Maluku	6.71
Maluku Utara	4.71
Papua Barat	5.84
Papua	3.33
Total	6.49



Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah dan usaha terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya masih perlu dioptimalkan. Secara absolut, jumlah pengangguran di Kota Batam naik sekitar 30.301 orang. Sehingga, angka TPT Kota Batam mengalami kenaikan dari 8,31 persen pada Agustus 2019 menjadi 11,79 persen pada Agustus 2020. Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka Tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah di Kota Batam yakni 11,79 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 3,44 %. Namun secara keseluruhan dapat tergambar bahwa terjadi Kenaikan yang cukup tinggi TPT di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,84 dari tahun 2019 ke Tahun 2020.

Pada Tahun 2021 Penduduk bekerja naik sebanyak 286 orang dan pengangguran naik sebanyak 2.850 orang. Meskipun Jumlah Angkatan Kerja beserta komponennya secara absolut mengalami kenaikan, namun secara kualitas indikator ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukkan perbaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 68,27 persen mengalami kenaikan 1,99 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk usia kerja maupun sebagai penganggur. Peningkatan nilai TPAK diikuti dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada periode Agustus 2021, TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,91 persen. Angka tersebut terus mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Februari 2021 sebesar 10,12 persen poin dan Agustus 2020 sebesar 10,34 persen poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah orang yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa, dan belum mulai bekerja bertambah, namun proporsinya justru berkurang apabila dibandingkan dengan keseluruhan Angkatan Kerja yang tersedia.

Adapun target yang ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan adanya kondisi eksternal yaitu covid-19 yang secara internasional dan nasional sangat berdampak kepada perekonomian sehingga sangat berpengaruh kepada kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Survey BPS Tahun 2020 secara umum permasalahan yang dihadapi perusahaan selama pandemic covid-19 antara lain tidak tercukupinya keuangan Perusahaan, bahan baku tidak tersedia atau harga menjadi mahal, Rekan Bisnis juga terdampak sangat buruk, Pelanggan terdampak covid sehingga permintaan turun. Akibat

permasalahan tersebut mengakibatkan Perusahaan melakukan adaptasi yaitu berupa pengurangan jam kerja, Pengurangan Pekerja, Pemasaran online yang tidak membutuhkan karyawan.

TPT di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 mengalami Penurunan jika dibandingkan dengan TPT tahun 2020, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 209.506 orang, mengalami penurunan sebanyak 79.043 orang atau sebesar 0,27 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari orang pengangguran karena COVID-19; 41 275 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; 5 889 orang sementara tidak bekerja karena COVID-19; 11 698 orang dan 150.644 penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 74.540 orang
2. Berdasarkan data BPS Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 137.060 orang, terdiri dari 41.275 orang pengangguran karena Covid-19, 5.889 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, 11.698 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 225.184 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki yang terdampak Covid-19 (95.093 orang) lebih besar daripada perempuan (55.551 orang). Sementara itu, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di perkotaan yang terdampak Covid-19 sebanyak 142.864 orang, sedangkan di perdesaan sebanyak 7.780 orang.

Tabel. 3.40
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Riau, Agustus 2021

Status Keadaan ketenagakerjaan	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total (Orang)
	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Perkotaan (Orang)	Perdesaan (Orang)	
a. Pengangguran ² Karena Covid-19	33 200	8 075	40 696	579	41 275
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	239	5.650	5.326	563	5 889
c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	8.528	3.170	11.258	440	11 698
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	95.093	55.551	142.864	7.780	150 644
Total					
Penduduk Usia Kerja (PUK)	137.060	72.446	200.144	9.362	209 506
Total	903.102	864.877	1.593.000	174.976	1 767 979
Persentase terhadap PUK	15.18	8.38	12,56	5.35	11. 85

Sumber : Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020

- Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2021 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 330.605 orang (30,40 persen) dan Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 243.461 orang (22,39 persen). Dalam tahun terakhir, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.087 419 orang, meningkat sebanyak 70.819 orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (2,25 persen poin) dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,36 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Jasa Lainnya (1,48 persen point) dan Transportasi dan Pergudangan (0,80 persen poin). penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP) meningkat dari 216.800 orang (19,94) persen pada Agustus 2021 dari 132.858 orang (13,02 persen) pada Agustus 2020.
- Adanya perubahan kondisi tenaga kerja selama Tahun 2021 tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut



- a. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2020 masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 25,01 persen dan sektor Perdagangan sebesar 17,67 persen. berdasarkan tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2020 - Agustus 2021, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Pertanian (0,05 persen poin) dan Jasa Pendidikan (0,15 persen poin). Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Transportasi dan pergudangan (-0,80 persen poin) dan jasa lainnya (-1,48 persen poin)
- b. Kondisi ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/kota selama pandemi covid menunjukkan kurang terserapnya tenaga kerja akibat minimnya kesempatan kerja. Seperti Kota Batam pada Tahun 2020 masih merupakan pusat aktifitas perekonomian di Kepulauan Riau. Dimana menunjukan kenaikan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar disebabkan beberapa penurunan produktifitas disektor formal. Demikian juga Adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja namun disisi lain adanya pergeseran penduduk yang bekerja disektor formal ke sektor informal dimana pada tahun 2020 pekerja di sektor formal sebesar 64.59 persen naik menjadi 64.80 persen pada tahun 2021 dan sektor informal mengalami Penurunan dari 35.41 persen tahun 2020 menjadi 35.20 persen pada tahun 2021.
- c. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, hal ini diindikasikan dari jam kerja rendah. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (full time worker), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu, pada Agustus 2020 jumlahnya mencapai 811.839 (79,86 persen). Dibandingkan dengan Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar -3,65 persen poin. Sementara itu dalam setahun terakhir, pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) bertambah sebanyak 16.840 orang (6,47

persen) yaitu dari 135.176 orang pada Agustus 2020 menjadi 828.679 (76,21%) orang pada Agustus 2021.

A. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mengatasi TPT (Tingkat pengangguran terbuka), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan program dan kegiatan pelatihan berbasis inkubasi bisnis dan juga wirusaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan serta mengembangkan model pelatihan yang ada ke arah membangun jiwa wirausaha. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan mendorong siswa SMK yang mengikuti pemagangan, sehingga ketika lulus nanti mereka siap bekerja. Diharapkan nantinya lulusan SMK maupun BLK mampu mengisi pasar kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan atas dasar permintaan, bukan penawaran. Di samping itu, untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi ibu rumah tangga untuk menjadi pelaku ekonomi
2. Meningkatkan pelatihan-pelatihan berbasis kemasyarakatan.
3. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan dinas terkait.

Adapun program yang dilaksanakan di Tahun 2021 untuk mendukung kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ada 3, yaitu:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan dan Produktivitas

2. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pembangunan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kondisi perekonomian makro, dimana pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan utama di bidang ketenagakerjaan baik menyangkut optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.



Masalah pokok penyelenggaraan urusan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi.
2. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri.

Sedangkan masalah yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Sedangkan permasalahan masing-masing bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dapat dilihat dalam tabel berikut

Masih terbatasnya tempat uji kompetensi (TUK) beserta sumber daya pendukungnya.

- ✓ Belum optimalnya produktifitas kerja kepada masyarakat maupun perusahaan.
- ✓ Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan.
- ✓ Minimnya SDM fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- ✓ Sistem, mekanisme, dan sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif.
- ✓ Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal.
- ✓ Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal.
- ✓ Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan sumber daya manusia (SDM) pengelola pelatihan sehingga berdampak terhadap pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri dan dunia pendidikan.
- ✓ Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan.
- ✓ Masih belum berfungsinya BLK secara maksimal.
- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga kebutuhan dunia usaha terhadap lulusan BLK belum optimal terpenuhi
- ✓ Terbatasnya alokasi dana pelayanan perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada

SASARAN. 8
Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Dalam rangka terwujudnya sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat maka ditetapkan indikator kinerja yaitu Persentase Kekurangan Gizi (*underweight*) pada anak balita.

Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Gizi yang baik merupakan landasan kesehatan, gizi mempengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).



Gambar.3.12 Pemberian F100 pada Balita Gizi Buruk

Status gizi pada masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kondisi sosial ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi. Bila kondisi sosial ekonomi baik maka status gizi diharapkan semakin baik. Status gizi anak balita akan berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi keluarga (orang tua), antara lain pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, jumlah anak orang tua, pengetahuan dan pola asuh ibu serta kondisi ekonomi orang tua secara keseluruhan.

Kelompok umur balita (bawah lima tahun) merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan tentunya

memerlukan perhatian khusus. Usia di bawah lima tahun merupakan “usia emas” dalam pembentukan sumber daya manusia baik dari segi pertumbuhan fisik maupun kecerdasan, di mana hal ini harus didukung oleh status gizi yang baik karena status gizi merupakan pondasi dalam membangun SDM yang berkualitas. Anak yang kekurangan gizi akan mengalami hambatan kognitif dan kegagalan pendidikan sehingga berdampak pada rendahnya produktifitas di masa dewasa. Kurang gizi yang dialami pada awal kehidupan juga berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular pada usia dewasa.



Gambar 3.13 Pelacakan Balita Underweight

Provinsi Kepulauan Riau dengan bentuk geografis kepulauan, memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa dan berdampak positif dalam menekan angka permasalahan gizi di wilayah ini. Konsumsi ikan dan hasil laut sudah membudaya di masyarakat tempatan sehingga akses terhadap keseimbangan gizi bersumber hayati cenderung lebih mudah berbanding dengan masyarakat di dataran tinggi. *Underweight* adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Kekurangan gizi banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun.

Indikator *underweight* pada balita diukur dengan rumus perhitungan yaitu jumlah anak usia 0-59 Bulan 29 hari dengan status gizi kurus ($BB/U -3 SD$ s.d. $<2 SD$)/Jumlah anak usia 0-59 Bulan 29 hari yang dikonfirmasi status gizinya pada periode dan wilayah tertentu x 100%.

Tabel. 3.41
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Target)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) Pada anak balita	16,2	13,4	117

Tabel. 3.42
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2021)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) Pada anak balita	16,2	13,4	117,3

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 maka persentase *underweight* Provinsi Kepulauan Riau sangat baik karena sudah melampaui target pada akhir periode RPJMD (2021). Pada akhir periode RPJMD persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita ditargetkan sebesar 16,2%, sedangkan pada tahun 2021 telah mencapai mencapai angka 13,4%, dengan capaian kinerja sebesar 117,3% atau dalam kategori **sangat baik**.



Gambar. 3.14 Pelacakan Kasus Balita dengan Permasalahan Gizi di Provinsi Kepulauan Riau

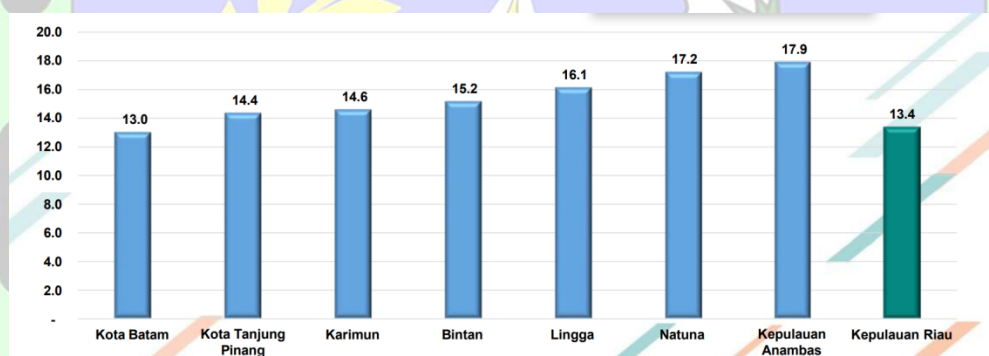
Realisasi persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebesar 13,4% dihitung berdasarkan hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Tahun 2021.

Sementara itu, capaian pada indikator persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita pada Tahun 2021 apabila diperbandingkan dengan target nasional maka sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 3.43
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dengan Target Nasional

NO	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	15	13,4	110,7

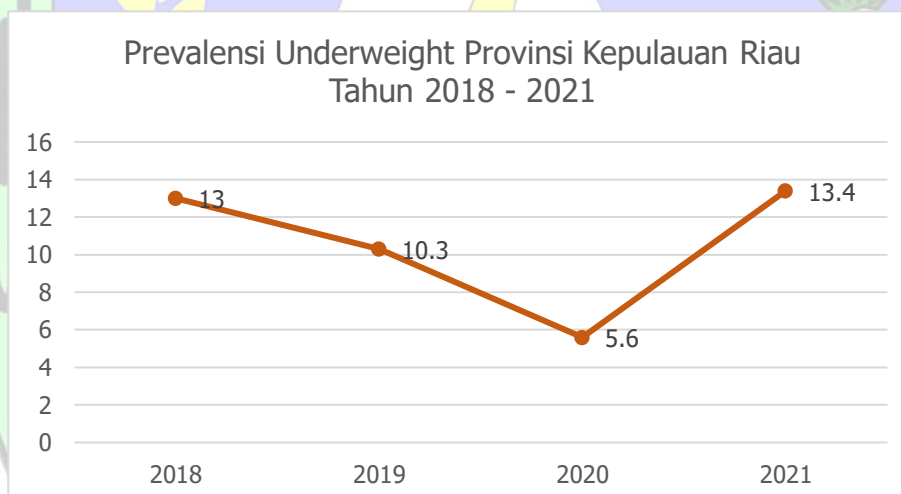
Distribusi hasil surveilans gizi (BB/U) berdasarkan kabupaten/kota dapat dirincikan sebagai berikut:



Gambar.3.15 Data Underweight berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 (sumber: SSGI Tahun 2021)

Berdasarkan Gambar 3.15, prevalensi *underweight* di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 13,4%. Persentase *underweight* di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas 17,9% dan terendah di Kota Batam 13%. Tingginya prevalensi *underweight* di Kabupaten Kepulauan Anambas dikarenakan pola asuh. Pola asuh berkaitan dengan cara pemberian makanan sehari-hari. Anak akan bertumbuh kembang dengan baik jika mendapatkan pola asuh yang baik meskipun dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, orang tua dan keluarga harus mengetahui pentingnya pola asuh, setiap anak wajib mendapatkan IMD (Inisiasi Menyusui Dini) dan ASI Eksklusif selama 6 bulan, Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai bayi usia 6 bulan, melanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih, pemberian kapsul vitamin A pada Bulan Februari dan Agustus, menimbang berat badan secara rutin di Poyandu, dipantau tahap perkembangannya melalui program SDIDTK (Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) dan kelas ibu balita di puskesmas.

Setiap tahun terjadi penurunan kasus yang signifikan, terlihat dengan perbandingan persentase balita *underweight* Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2018 – 2021. Tahun 2018, persentase *underweight* sebesar 13%, lalu menurun di Tahun 2019 menjadi 10,3%, dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 5,6%. Hanya saja pada tahun 2021 prevalensi *underweight* meningkat yaitu 13,4%. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung berkontribusi pada kenaikan prevalensi *underweight*. Pandemi Covid-19 di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia berdampak buruk bagi sistem perekonomian masyarakat yang mengarah pada kurangnya kebutuhan pangan. Jumlah pangan yang semakin berkurang diprediksi akan menyebabkan berkurangnya asupan makanan, penurunan status gizi dan kesehatan, sampai dengan terjadinya kelaparan. Tren prevalensi *underweight* Provinsi Kepulauan Riau tergambar melalui diagram di bawah ini :



Angka *underweight* yang terus menurun di Provinsi Kepulauan Riau juga tidak terlepas dari dukungan peran fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan terutama tenaga gizi. Pada tahun 2021, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 1428 posyandu. Posyandu mempunyai peranan penting karena salah satu kegiatan di posyandu adalah memantau perkembangan status gizi balita. Persebaran posyandu tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 3.44
Jumlah Posyandu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu
1	Tanjungpinang	138
2	Batam	522
3	Bintan	165
4	Karimun	227
5	Lingga	188
6	Natuna	120
7	Kepulauan Anambas	68
	Total	1428

Pada tahun 2021, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 35 rumah sakit serta 93 puskesmas yang tersebar di 7 kabupaten/kota. Sedangkan jumlah tenaga gizi yang terdiri dari nutrisionis dan dietisien di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebanyak 195 orang seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.45
Persebaran Tenaga Gizi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Gizi
1	Kota Tanjungpinang	22
2	Kota Batam	54
3	Bintan	24
4	Karimun	25
5	Lingga	16
6	Natuna	35
7	Kepulauan Anambas	19
	Total	195

Sumber: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI SDM), 2021

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam penurunan balita dengan status kekurangan gizi, yaitu dengan melakukan monitoring pelacakan dan konfirmasi masalah gizi di Kabupaten/Kota. Hasil temuan dari pelacakan gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau secara umum disebabkan pola asuh, penyakit penyerta dan tingkat perekonomian rendah. Dari hasil wawancara konseling riwayat Pemberian Makanan Bagi Anak (PMBA), balita dengan kekurangan gizi tidak diberikan ASI Eksklusif dan pemberian makanan yang tidak adekuat (jumlah yang dikonsumsi masih kurang dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi anak).



Tabel. 3.46
Realisasi Keuangan Kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 yang Menunjang Penurunan Angka *Underweight*
Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Kegiatan	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) Pada Anak Balita	Pelacakan Kasus Gizi Buruk	109.665.000	108.810,000		
			Sosialisasi PMBA	39.273.700	32.446.700		
			Pengadaan PMT BUMIL KEK	640.070.700	470.467.077		
			Pengadaan PMT Balita Kurus	691.446.000	503.802.958		
			Peningkatan Cakupan balita ditimbang D/S	80.000.000	77.977.500		
			Total Anggaran	1.560.455.400	1.193.504.235	76,5	Efisien

Total pagu APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan yang berhubungan dengan penurunan angka *underweight* sebesar Rp 1.560.455.400 dengan realisasi Rp 1.193.504.235 (76,5%).

Untuk menekan jumlah kasus balita dengan kekurangan gizi, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya - upaya sebagai berikut:

1. Penanganan kasus gizi buruk menggunakan prosedur tetap (SOP) tatalaksana asuhan gizi baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
2. Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Balita masih sangat diperlukan terutama di daerah - daerah *hinterland* dan terpencil.
3. Pola asuh menjadi penyebab utama kejadian gizi buruk pada Balita. Pola Asuh berkaitan dengan cara pemberian makanan sehari-hari. Anak akan bertumbuh kembang dengan baik jika mendapatkan pola asuh yang baik yaitu:
 - IMD dan ASI Eksklusif selama 6 bulan
 - Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai bayi usia 6 bulan
 - Melanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih
 - Pemberian kapsul vitamin A pada bulan Februari dan Agustus
 - Menimbang berat badan secara rutin di Posyandu
 - Pemantauan tahap perkembangan balita melalui program Stimulasi, Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan kelas ibu balita di Puskesmas

SASARAN. 9
Angka Kemiskinan Menurun

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan perbandingan. Dalam hal ini, persentase penduduk miskin pada tahun 2021 akan dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel. 3.47
Evaluasi Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penduduk Miskin	5,68%	5,75%	98,77%

Evaluasi terhadap Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dapat digambarkan dari jumlah penduduk miskin provinsi (137.750 orang) dibagi dengan jumlah penduduk provinsi (2.395.652 orang) dengan nilai persentase 5,75%.

Hasil Evaluasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dengan target 5,68% dapat tercapai sebesar 5,75% sehingga capaian kinerja sebesar 98,77% atau dalam kategori kinerja relatif sangat baik.

Capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin didukung oleh 2 (dua) program dan 13 (tiga belas) kegiatan sebagai berikut :



Tabel. 3.48
Program/Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)				
		Kegiatan (output)				
A	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	1,77	1,35	76,20
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,47	0,51	110,00
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	42,74	63,15	147,74
1	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	728	336	46,15
2	Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah Perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	322	334	103,73
3	Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah Pesisir dan Perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	93	201	216,13
4	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	120	270	225,00
5	Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah Perdesaan yang menerima bantuan melalui	kk	90	30	33,33



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)				
		Kegiatan (output)				
		mekanisme KUBE				
6	Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah Pesisir dan Perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	90	30	33,33
7	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	19.449	27.700	142,42
8	Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah Perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	7.545	12.759	169,11
9	Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah Pesisir dan Perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	579	276	47,67
10	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		keg	1	1	100
B	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25,00	18,33	73,33
		Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	60,35	42,47	70,37



No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Program (outcome)				
		Kegiatan (output)				
11	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah korban bencana alam provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	org	75	55	73
12	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah korban bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	org	75	55	73
13	Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos)	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	org	61.320	43.149	70,37

Berikut Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin dari tahun 2020-2021 dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah:

Tabel. 3.49
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Penduduk Miskin Dari Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Persentase Penduduk Miskin	6,13% (142.611 org)	5,75% (137.750 org)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu berkurang 4.861 orang atau (0,38%). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan perekonomian terhenti, terutama sebelum era *new normal*, banyak karyawan yang dirumahkan, banyak hotel yang tutup, banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Dengan demikian,

penurunan pendapatan dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pada lapisan bawah.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangani kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 antara lain:

1. Memperbarui data penduduk miskin

2. Integrasi penyaluran bansos

Di banyak tempat, berbagai bentuk Bantuan Sosial yang berbeda-beda jenis dan jumlahnya telah menimbulkan ketegangan sosial di sejumlah daerah. Hal ini diperparah dengan basis data Bantuan Sosial, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang digunakan oleh pemerintah daerah yang belum mencakup masyarakat yang sebelumnya tidak terdata namun kondisi ekonominya memburuk selama pandemi. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah ialah menggandeng bank-bank pemerintah dan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada penerima bantuan.

3. Meningkatkan anggaran bantuan sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat Covid-19.

4. Meningkatkan anggaran bantuan modal usaha bagi penduduk miskin untuk meningkatkan kemandiriannya.

Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
A	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	1,77	1,35	76,20	3.579.102.987	3.408.690.254	95,24
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,47	0,51	110,00			
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	42,74	63,15	147,74			
1	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	728	336	46,15	1.349.756.000	1.257.942.744	93,20

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah Perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	322	334	103,73			
3	Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme UEP	Jumlah keluarga miskin di wilayah Pesisir dan Perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	kk	93	201	216,13			
4	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	120	270	225,00			
5	Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah Perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	90	30	33,33			
6	Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme Kube	Jumlah keluarga miskin di wilayah Pesisir dan Perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	kk	90	30	33,33			
7	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	19.449	27.700	142,42	1.736.860.000	1.661.434.748	95,66

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU **2021**

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8	Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah Perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	7.545	12.759	169,11			
9	Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Perbatasan Melalui Mekanisme Bankessos	Jumlah keluarga miskin di wilayah Pesisir dan Perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	kk	579	276	47,67			
10	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		keg	1	1	100	492.486.987	489.312.762	99,36
B	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25,00	18,33	73,33	623.294.500	618.438.170	99,22
		Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	60,35	42,47	70,37			

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
11	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah korban bencana alam provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	org	75	55	73	100.000.000	99.780.000	99,78
12	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah korban bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	org	75	55	73	523.294.500	518.658.170	99,11
13	Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos)	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	org	61.320	43.149	70,37			

A. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas *efisiensi sumber daya biaya* dan *sumber daya manusia*. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.4.027.128.424, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.4.202.397.487. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 4,17%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya, sama halnya pada level kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya hanya berkisar antara 0,22% hingga 6,80%.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping PKH sebagai pendamping program untuk memastikan program berjalan dengan baik.

B. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 program dan 13 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program/kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.579.102.987,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.408.690.254,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 95,24%, yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Keluaran yang dicapai :

- Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP sebanyak 336 KK.
- Jumlah keluarga miskin di wilayah Perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP sebanyak 334 KK.
- Jumlah keluarga miskin di wilayah Pesisir dan Perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP sebanyak 201 KK.
- Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE sebanyak 270 KK.
- Jumlah keluarga miskin di wilayah Perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE sebanyak 30 KK.
- Jumlah keluarga miskin di wilayah Pesisir dan Perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE sebanyak 30 KK.
- Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya sebanyak 27.700 KK.
- Jumlah keluarga miskin di wilayah Perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya sebanyak 12.759 KK.
- Jumlah keluarga miskin di wilayah Pesisir dan Perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya sebanyak 276 KK.

2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.623.294.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.618.438.170,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 99,22%, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial provinsi.

Keluaran yang dicapai :

- Jumlah korban bencana alam provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 55 orang.
- Jumlah korban bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 55 orang.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan perekonomian terhenti, terutama sebelum era *new normal*, banyak karyawan yang dirumahkan, banyak hotel yang tutup, banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, penurunan pendapatan dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pada lapisan bawah.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangani kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 antara lain:

1. Memperbarui data penduduk miskin
2. Integrasi penyaluran bansos

Di banyak tempat, berbagai bentuk Bantuan Sosial yang berbeda-beda jenis dan jumlahnya telah menimbulkan ketegangan sosial di sejumlah daerah. Hal ini diperparah dengan basis data Bantuan Sosial, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang digunakan oleh pemerintah daerah yang belum mencakup masyarakat yang sebelumnya tidak terdata namun kondisi ekonominya memburuk selama pandemi. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah ialah menggandeng bank-bank pemerintah dan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan sosial kepada penerima bantuan.

3. Meningkatkan anggaran bantuan sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat Covid-19.
4. Meningkatkan anggaran bantuan modal usaha bagi penduduk miskin untuk meningkatkan kemandiriannya.

Tabel. 3.50
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021
dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021
1	Persentase Penduduk Miskin	5,68%	5,75%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian target RPJMD 2016 s.d 2021, terdapat ketidaktercapaian target penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Kepri sebesar 0,17%.

Tabel. 3.51
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kategori Perkotaan dan Perdesaan
September 2020 - September 2021

Daerah/ Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
September 2020	121.820	5,69
Maret 2021	124.900	5,72
September 2021	119.310	5,37
Perdesaan		
September 2020	20.790	11,25
Maret 2021	19.570	11,10
September 2021	18.440	10,45
Total		
September 2020	142.610	6,13
Maret 2021	144.460	6,12
September 2021	137.750	5,75

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2020 - September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan selalu menurun, sedangkan di daerah perkotaan sempat meningkat pada Maret 2021 dan kembali menurun pada September 2021. Meskipun jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan yang cukup besar pada Maret 2021, namun persentasenya hanya naik 0,03 persen dibandingkan September 2020.

Adapun Persentase Penduduk Miskin pada setiap kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 3.52
Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	P0	P1	P2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Karimun	6,85	1,14	0,34	16.280	237.664
2	Bintan	6,42	0,65	0,11	10.540	164.174
3	Natuna	4,95	0,44	0,07	3.980	80.404
4	Lingga	13,93	2,98	0,90	12.580	90.309
5	Kepulauan Anambas	7,09	0,87	0,19	3.080	43.441
6	Kota Batam	5,05	0,89	0,25	77.170	1.528.119
7	Kota Tanjungpinang	9,57	1,75	0,52	20.850	217.868
Kepulauan Riau		5,75	0,953	0,218	137.750	2.395.652

Keterangan :

P0 = Persentase Kemiskinan

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (13,93%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Natuna (4,95%). Sedangkan jumlah penduduk miskin Tahun 2020 paling besar adalah di Kota Batam (77.170 Jiwa) dan yang paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Anambas (3.080 Jiwa). Di samping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2021 paling besar adalah di Kabupaten Lingga (2,98%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Natuna (0,44%). Sama halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2021, yakni paling besar adalah di Kabupaten Lingga (0,90%) dan yang paling sedikit di Kabupaten Natuna (0,07%).

Tabel. 3.53
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Se-Indonesia Semester II
Tahun 2021

No	PROVINSI	SEMESTER 2 (SEPTEMBER)
1	KALIMANTAN SELATAN	4,56
2	KEP. BANGKA BELITUNG	4,67
3	DKI JAKARTA	4,67
4	BALI	4,72
5	KALIMANTAN TENGAH	5,16
6	KEP. RIAU	5,75
7	SUMATERA BARAT	6,04
8	KALIMANTAN TIMUR	6,27
9	MALUKU UTARA	6,38
10	BANTEN	6,5
11	KALIMANTAN UTARA	6,83
12	KALIMANTAN BARAT	6,84



No	PROVINSI	SEMESTER 2 (SEPTEMBER)
13	RIAU	7
14	SULAWESI UTARA	7,36
15	JAMBI	7,67
16	JAWA BARAT	7,97
17	SUMATERA UTARA	8,49
18	SULAWESI SELATAN	8,53
19	JAWA TIMUR	10,59
20	JAWA TENGAH	11,25
21	LAMPUNG	11,67
22	SULAWESI TENGGARA	11,74
23	SULAWESI BARAT	11,85
24	DI YOGYAKARTA	11,91
25	SULAWESI TENGAH	12,18
26	SUMATERA SELATAN	12,79
27	NUSA TENGGARA BARAT	13,83
28	BENGKULU	14,43
29	GORONTALO	15,41
30	ACEH	15,53
31	MALUKU	16,3
32	NUSA TENGGARA TIMUR	20,44
33	PAPUA BARAT	21,82
34	PAPUA	27,38
INDONESIA		9,71

Sumber: <https://kepri.bps.go.id>

Berdasarkan Persentase Kemiskinan *Update* per September 2021, Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat terendah ke-6 se-Indonesia (5,75%).

SASARAN. 10**Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, tidak dapat langsung diambil dari masing masing Indeks yang merupakan data dasar yaitu :

1. Persentase Keterwakilan Perempuan di parlemen : 11,11 %
2. Persentase Tenaga Profesional Perempuan : 46,12%
3. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan : 28,83 %

Data dasar tersebut memiliki satuan yang berbeda, untuk itu terlebih dahulu dihitung nilai standarisasi agar mendapatkan agregasi guna mempermudah menghitung rata-rata. Untuk perhitungan masing-masing komponen perlu dihitung indeksnya terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan IDG. Adapun komponen perhitungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Proporsi Keterwakilan Perempuan di Parlemen : 20,87
2. Proporsi Profesional Perempuan : 48,75
3. Proporsi Sumbangan Pendapatan Perempuan : 0,826
4. Proporsi Sumbangan Pendapatan Laki-laki : 1,405
5. Proporsi Penduduk Perempuan : 0,490
6. Proporsi Pengeluaran Perkapita pertahun : 671,23

Hasil perhitungan komponen tersebut diatas menghasilkan tiga indeks antara lain sebagai berikut :

1. Indeks Keterwakilan di Parlemen (I_{par}) : 0,401
2. Indeks Pengambil keputusan (I_{DM}) : 1,004
3. Indeks distribusi pendapatan ($I_{inc-dis}$) : 0,455

Berikut perhitungan IDG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

$$\begin{aligned} IDG &= \frac{(I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis})}{3} \times 100 \\ &= \frac{0,401 + 1,004 + 0,455}{3} \times 100 \\ &= \frac{1,860}{3} \times 100 \\ &= 62,02 \end{aligned}$$

Sumber : BPS Pusat Jakarta Tahun 2021

Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021 masih menggunakan data tahun 2020, dikarenakan data IDG Tahun 2021 baru dikeluarkan oleh BPS Pada Agustus 2022. Capaian dari indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai berikut:

Tabel. 3.54
Capaian Kinerja Meningkatnya
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65	62,02	95,42

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah nilai rata-rata dari penjumlahan indeks keterwakilan perempuan di parlemen, indeks pengambilan keputusan dan indeks distribusi pendapatan.

Analisis terhadap persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020 dapat digambarkan dengan persentase nilai rata-rata Indeks Keterwakilan di Parlemen (I_{par}) sebesar 0,401, Indeks Pengambil keputusan (I_{DM}) sebesar 1.004, dan Indeks distribusi pendapatan ($I_{inc-dis}$) sebesar 0,455, sehingga nilai realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 62,02 %.

Hasil analisis Persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target 65% dapat tercapai 62,02% sehingga capaian kinerja sebesar 95,42% atau dalam kategori **kinerja baik**.

Berikut evaluasi realisasi indikator indeks pemberdayaan gender Tahun 2016-2020:

Tabel. 3.55
Evaluasi Realisasi Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,60	66,96	66,18	61,58	62,02

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) disetiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 65,60 %, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 66,96%, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 66,18%, pada Tahun 2019 menurun 4,6% sehingga menjadi 61,58%, pada tahun 2020 mulai naik kembali sebesar 62.02% .

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) lebih banyak dipengaruhi komposit persentase perempuan sebagai profesional sebesar 46,12%. Selain itu, peningkatan IDG juga dipengaruhi komposit peningkatan komponen sumbangan pendapatan perempuan sebesar 28,83% sedangkan pada komposit keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 11,11% tidak mengalami perubahan yang berarti.

Berikut rincian IDG Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan komponen pembentuknya serta kondisi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020:

Tabel. 3.56
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan perempuan di Parlemen	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
	(%)	(%)	(%)	
KEPULAUAN RIAU	11.11	46,12	28.83	62.02
Karimun	16.67	49.58	25.41	64.05
Bintan	24.00	52,22	24.30	69.64
Natuna	0.01	39.47	24.51	42.99
Lingga	5.00	52.38	23.15	48.52
Kepulauan Anambas	10.00	46.88	26.09	62.57
Kota Batam	8.00	41.40	29.31	59.10
Kota Tanjungpinang	36.67	41.37	26.92	76.44

Sumber : BPS Kepri 2021

Dari data tersebut dapat digambarkan capaian IDG Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,44 dari tahun sebelumnya, IDG tertinggi di Tanjungpinang dengan nilai capaian sebesar 76.44% yang sebelumnya 76.13%. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan nilai IDG secara keseluruhan satu Provinsi Kepulauan Riau. Nilai IDG terendah masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yakni di Kabupaten Natuna sebesar 42.99% mulai menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 42,02%.

Dari data tersebut juga dapat disimpulkan peningkatan IDG Tahun 2020 lebih banyak dipengaruhi oleh persentase perempuan sebagai profesional sebesar 46,12% dimana pada tahun sebelumnya hanya sebesar 43,16%. Selain itu, peningkatan IDG juga disebabkan peningkatan komponen sumbangan pendapatan perempuan sebesar 28,83% meningkat sedikit dari tahun lalu yang sebesar 28,61%. Keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 11,11% pada tahun 2020 dari tahun ke tahun masih belum menunjukkan perubahan yang berarti dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak dan stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun capaian IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 3.57
IDG Provinsi Kepri dan kabupaten Kota 2016-2020

No	Provinsi/Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	PROV Kepri	65,60	66,96	66,18	61,58	62,02
2	Karimun		54,47	57.03	64.17	64.05
3	Bintan		61,24	63.41	69.71	69.64
4	Natuna		48,55	49.17	42.02	42.99
5	Lingga		47,82	46.08	48.96	48.52
6	KepAnambas		57,07	57.32	57.74	62.57
7	Batam		55,28	53.29	58.40	59.10
8	Tanjungpinang		70,33	68.57	76.13	76.44

Sumber : BPS Kepri 2021.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam kurung waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif artinya terdapat peningkatan dan penurunan dalam capaian setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 65,60, kemudian meningkat Tahun 2017 sebesar 66,96% dan

menurun tidak terlalu signifikan pada Tahun 2018 sebesar 66,18%, pada Tahun 2019 menurun sangat signifikan yakni sebesar 61,58% dikarenakan dampak pandemi Covid 19 yang melanda dunia, tanah air dan Provinsi Kepulauan Riau juga turut terdampak terutama pada sektor ekonomi, pada tahun 2020 mulai bergerak naik sebesar 62,02%

IDG Tahun 2020 (62.02%) mulai menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya (61,58%). Kenaikan IDG Tahun 2020 sebesar 0,44%, dapat dilihat pada tiga komposit pendukung IDG antara lain : Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan, komposit Perempuan sebagai Tenaga Profesional mengalami peningkatan sebesar 2,96% dari 43,16% pada Tahun 2019 menjadi 46,12% pada Tahun 2020. Begitu juga dengan Sumbangan Pendapatan Perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,22% dari 28,61% pada Tahun 2019 menjadi 28,83% pada tahun 2020.

Namun Keterlibatan Perempuan di Parlemen merupakan komposit yang menjadi penyebab rendahnya pencapaian IDG Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2019 jumlah perempuan Provinsi Kepulauan Riau yang duduk diparlemen sebanyak 5 orang (11,11 %) dari 45 orang anggota parlemen keseluruhan. Sementara Tahun 2020 jumlah tersebut tidak mengalami perubahan atau kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel. 3.58
Anggota Legislatif laki-laki dan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2020

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase Caleg Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Karimun	27	3	30	11,11%
2.	Bintan	20	5	25	25%
3.	Natuna	19	0	20	0%
4.	Lingga	19	1	20	5%
5.	Kep. Anambas	17	3	20	17,64%
6.	Batam	46	4	50	8,69%
7.	Tanjungpinang	19	11	30	57,89%
8.	Kepulauan Riau	40	5	45	12,5%
Total		207	33	240	16 %

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam upaya meningkatkan peran perempuan di Parlemen pada Tahun 2021 sudah dilakukan berbagai cara antara lain : melalui peningkatan kapasitas perempuan potensial dan Capacity Building bagi perempuan agar mampu bersaing dalam Pemilu 2024. Serta Memberikan Pemahaman kepada perempuan dan pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas, yang dana nya bersumber dari Dana APBD Provinsi Kepulauan Riau maupun Dana APBN.

Perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian tahun 2021 disajikan seperti pada tabel di bawah:

Tabel. 3.59
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	%
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,5	62,02	99,23

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 maka Provinsi Kepulauan Riau masih dibawah dari target pada akhir periode RPJMD (2021), di mana pada akhir periode RPJMD jumlah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kepulauan Riau ditargetkan sebesar 62,5%, namun baru terealisasi sebesar 62,02% atau dengan capaian 99,23%.

Jika di dibandingkan secara nasional dengan daerah lain, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 berada pada urutan ke-31 dengan nilai sebesar 62,02%. Berikut data lengkap dari seluruh Provinsi se-Indonesia:

Tabel 3.60
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) se-Indonesia

Rangking	Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		2020
	INDONESIA	75.57
1	KALIMANTAN TENGAH	82.41
2	SULAWESI UTARA	78.98
3	MALUKU UTARA	77.28
4	SULAWESI SELATAN	76.32
5	SULAWESI TENGAH	75.78
6	MALUKU	75.54
7	DKI JAKARTA	75.16
8	DI YOGYAKARTA	74.73
9	SUMATERA SELATAN	74.64
10	NUSA TENGGARA TIMUR	74.53
11	KALIMANTAN SELATAN	74.48



12	JAWA TIMUR	73.03
13	SULAWESI TENGGARA	72.54
14	BALI	72.16
15	JAWA TENGAH	71.73
16	GORONTALO	70.74
17	BENGKULU	70.48
18	JAWA BARAT	70.24
19	LAMPUNG	69.06
20	BANTEN	68.76
21	RIAU	68.70
22	KALIMANTAN BARAT	68.07
23	SUMATERA UTARA	67.52
24	PAPUA	66.72
25	SULAWESI BARAT	65.92
26	JAMBI	65.86
27	KALIMANTAN TIMUR	65.54
28	KALIMANTAN UTARA	64.31
29	ACEH	63.47
30	PAPUA BARAT	62.17
31	KEP. RIAU	62.02
32	SUMATERA BARAT	58.28
33	KEP. BANGKA BELITUNG	53.03
34	NUSA TENGGARA BARAT	51.96

Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 62,02 masih jauh dibawah angka Nasional yaitu sebesar 75,57 tertinggal 13,55 poin, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih sangat perlu untuk meningkatkan upaya untuk pemberdayaan perempuan di bidang Politik, Hukum dan Sosial dengan melibatkan stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Politik, Ekonomi dan Sosial serta sumber daya manusia di provinsi kepulauan Riau.

Adapun beberapa program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi (IDG) antara lain:

1) Memberikan Pemahaman kepada perempuan untuk menjadi pemilih yang cerdas.

Pembangunan karakteristik gender di Kepulauan Riau yang tentunya wajib mendapatkan perhatian penuh dari berbagai pihak, mengingat isu gender merupakan isu dengan lintas sektoral serta lintas disiplin ilmu yang beragam serta memiliki makna

yang kuat dalam pembangunan, untuk itu upaya Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB melaksanakan. Kegiatan yang dilakukan dari dana APBD tahun 2021 yaitu Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Rp. 802.718.690,00 dengan realisasi Rp. 639.097.950,00 (79,62%).

Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah timbulnya kesadaran masyarakat bahwa perempuan harus memiliki pemikiran tersendiri terhadap calon legislatif yang didukungnya. Hal ini diharapkan akan berpengaruh pada pemilihan Umum yang akan dilakukan Tahun 2024 yang akan datang. Kondisi ini terlihat dengan belum mendapatkan hasil maksimal dengan hasil pemilu 2019 bahwa perolehan suara untuk Caleg Perempuan hanya sebesar 35 orang atau hanya 15%, perolehan suara terbanyak di Kota Tanjungpinang sebanyak 11 orang atau 37% dan terendah di Kabupaten Natuna 0%, semangat ini masih terhambat oleh beberapa Faktor antara lain : Budaya patriarki, dimana dalam budaya ini perempuan dianggap sebagai pelengkap dalam dunia perpolitikan, Persepsi yang sering dipegang bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, Masih rendahnya kualitas perempuan baik itu di bidang politik maupun bidang sosial, Belum ditetapkannya Grand Desain oleh Partai Politik dalam perencanaan Caleg menjadi Adeg, Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai yang hampir selalu laki-laki, Kurangnya peran media dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen dan Kurangnya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

2) Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan tingkat Provinsi dan kabupaten/ Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan dari dana APBD tahun 2021 antara lain Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Rp 1.500.000.000,00 dengan Realisasai Rp. 1.293.545.137,00 (86,24%).



3) Meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan

Kegiatan yang dilaksanakan dari dana APBD tahun 2021 antara lain Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Rp. 873.662.800,00 dengan Realisasi Rp. 866.081.263,00 (99,13%), Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Rp. 310.584.844,00 dengan Realisasi Rp. 305.263.296,00 (98,29%) dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Rp. 260.360.600,00 dengan Realisasi Rp. 259.366.280,00 (99,62%).

Kebijakan pembangunan nasional telah menetapkan kesetaraan gender merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Saat ini perempuan masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Hambatan yang dialami perempuan untuk mengakses layanan yang disebabkan persoalan struktur dan budaya patriarki, seperti pembatasan pendidikan perempuan serta capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di mana saat ini laki-laki sebesar 10,19 tahun dan perempuan sebesar 9,77 tahun sementara sumbangan pendapatan perempuan yang berkisar 28,83 jauh dibanding dan inilah menjadi salah satu inisiasi peningkatan Life skill perempuan dan sekolah perempuan di Provinsi Kepulauan Riau.



**Dokumentasi
Kegiatan Sekolah Perempuan**



❖ Kendala yang dihadapi

- ✚ Masih meningkatnya kesenjangan kesenjangan di berbagai macam bidang akibat situasi masa pandemi Covid-19 seperti: Kehilangan Pekerjaan, Pendapatan Menurun, Tingkat Stress meningkat, pekerjaan rumah tangga meningkat dan juga tanggungjawab mengajar anak sekolah secara daring, Produktivitas Usaha Menurun dengan meningkatnya beban yang bertambah berlipat-lipat, Menjadi tulang punggung keluarga karena pasangan meninggal atau sakit dan harus isolasi mandiri dan Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender.

Hal ini menjadi kendala untuk optimalnya pelaksanaan peningkatan life skill perempuan.

- ✚ Pembinaan dan pendampingan lebih lanjut belum optimal dilakukan terhadap peserta peningkatan kapasitas baik ekonomi maupun politik karena terkendala dengan lingkup jangkauan dinas.

❖ Solusi

- ✚ Salah satu upaya dilakukan pemerintah selain meningkatkan life skill perempuan adalah mendorong perempuan terlibat dalam perekonomian dan membangun jejaring social.
- ✚ Tindak lanjut berupa dukungan sosial dan support system dari Pemerintah. Perlu peraturan-peraturan yang menguntungkan perempuan. Termasuk juga institusi atau kelembagaan-kelembagaan harus mendukung perempuan.

SASARAN. 11**Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan**

Dalam mencapai sasaran meningkatkannya produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan strategi "Percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan prasarana budidaya laut, payau, tawar serta pembenihan, dan mengembangkan sarana prasarana pengolahan".

Apabila melihat Capaian kinerja, Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.61
Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	306.463,67	302.662,68	98,76

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah Jumlah hasil tangkapan ikan perairan Kepulauan Riau oleh perusahaan perikanan maupun kelompok nelayan pesisir dan didaratkan di pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Analisis terhadap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah Jumlah hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan dan sentra produksi baik perikanan tangkap di laut dan hasil estimasi di desa sampel oleh petugas statistik bidang perikanan tangkap di Kab/Kota Data di atas dikompilasi dan divalidasi oleh petugas.



Dilihat dari tabel diatas sampai akhir tahun 2021 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 302.662,68 ton, dengan target kinerja sebesar 306.463,67 ton diperoleh capaian kinerja sebesar 98,76 % sehingga capaian kinerja sasaran berada dalam kondisi **sangat baik**.

Berikut evaluasi realisasi indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2021 :

Tabel. 3.62
Evaluasi Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	303.411	304.244	304.221	366.582	332.176	302.662,68

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dari Tahun 2019 ke Tahun 2020. Pada Tahun 2019 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 366.582 ton yang selanjutnya mengalami 34.406 ton di Tahun 2020 dengan jumlah produksi 332.176 ton. Pada Tahun 2021 menurun kembali menjadi 302.662,68 ton. Adapun pelaksanaan pagu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2021 sebagai berikut:

No	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	22.269.949.780,00	21.536.919.780	96,71

Adapun Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 3.63
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Kabupaten/ Kota		Jumlah Produksi Tangkap (Ton)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Karimun	73.693	73.754	69.442	61.174	52.521	11.721
2	Bintan	51.870	51.973	50.279	56.315	47.702	57.131
3	Natuna	81.382	81.390	81.991	104.879	120.589	132.633
4	Lingga	33.647	33.643	33.602	44.137	34.265	35.966
6	Kep Anambas	28.788	28.785	30.875	28.775	21.119	24.030
7	Batam	32.671	32.801	34.973	60.662	38.397	38.513
8	Tanjungpinang	1.360	1.898	3.059	10.640	17.583	2.669
Jumlah/ Total:		303.411	304.244	304.221	366.582	332.176	302.663

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan tangkap mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 303.411 ton sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 304.244 ton. Untuk tahun 2017 jumlah produksi perikanan tangkap paling tinggi adalah di Kabupaten Natuna yakni 81.390 ton dan yang paling rendah adalah Kota Tanjungpinang yakni 1.898 ton. Sedangkan di Tahun 2018 jumlah produksi perikanan tangkap paling tinggi adalah di Kabupaten Natuna yakni 81.991 Ton, sedangkan yang paling rendah adalah Kota Tanjungpinang yakni 3.059 Ton.

Pada tahun 2019, produksi perikanan tangkap tertinggi pada Kabupaten Natuna dengan hasil tangkap sebesar 104.879 Ton dan disusul oleh Kabupaten Karimun dengan hasil tangkapan sebesar 61.174 Ton. Sedangkan produksi terendah dihasilkan oleh Kota Tanjungpinang sebesar 10.640 Ton. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 332.176 ton, jumlah produksi perikanan tangkap paling tinggi adalah di Kabupaten Natuna yakni 120.589 ton, sedangkan paling rendah di Tanjungpinang sebesar 17.583 ton. Sedangkan untuk Tahun 2021 terdapat penurunan angka Produksi dari tahun sebelumnya dengan selisih jumlah produksi sebesar 29.513 ton. Untuk produksi tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Natuna sebesar 132.633 Ton dan produksi terendah di hasilkan oleh Kota Tanjungpinang sebesar 2.669 ton.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 maka Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi dan mencapai target yang telah ditetapkan pada target akhir RPJMD sebesar 306.463.67 Ton yang terealisasi sebesar 302.6622,78 Ton atau 98,76%. Perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian tahun 2021 disajikan seperti pada tabel di bawah;

Tabel. 3.64
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2021	Target akhir RPJMD (2021)	%
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	302.6622,78	306.463.67	98,76

Sementara itu capaian pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 apabila diperbandingkan dengan target nasional sangat jauh dari target yang telah ditetapkan hal ini juga disebabkan produksi nasional merupakan akumulasi dari produksi provinsi se Indonesia. di mana Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 menyumbang 3,78 % dari target nasional sebesar 8.008.000 Ton.

Tabel. 3.65
Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Target Nasional

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Nasional 2021	%
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	302.6622,78	8.008.000	3,78

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Tahun 2021 disebabkan beberapa faktor. antara lain :

- Penambahan armada kapal dan alat penangkap ikan untuk nelayan baik pribadi maupun bantuan dari pemerintah pusat (KKP). Dinas kelautan dan perikanan provinsi kepri. dinas perikanan kab/kota maupun pihak swasta.
- Perbaikan system terkait pencatatan data pendaratan ikan baik dipelabuhan maupun tangkahan sehingga data tangkapan ikan yang dihasilkan lebih baik.

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Penambahan armada kapal dan alat penangkap ikan untuk nelayan di Provinsi Kepulauan Riau
- b. Penempatan petugas pusat informasi pelabuhan perikanan (PIPP) yang bertugas untuk mencatat dan melaporkan pendaratan ikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri.

Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya :

a. Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dasar atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang penacapaian target produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau. Dimasa pandemic. juga terjadi beberapa pemotongan/efisiensi anggaran namun tidak signifikan. Dikarenakan. Program pengelolaan Perikanan Tangkap Merupakan Program Prioritas yang harus dilaksanakan.

Selain itu juga. pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyalurkan bantuan di Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu tepatnya di Kabupaten Natuna. Bantuan yang diberikan berupa kapal penangkap ikan dilengkapi alat penangkap ikan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap di Kabupaten Natuna.

b. Sumberdaya Manusia

Jumlah Sumberdaya Manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami penurunan tiap tahunnya diakrenakan ada yang telah pensiun dan yang telah wafat. Namun demikian. komitmen dalam pelayanan dibuktikan dengan dibentuknya Cabang Dinas di 5 Kabupaten/Kota dalam upaya melayani izin usaha perikanan tangkap sebagaimana kewenangan yang telah diberikan.

c. Waktu Pelaksanaan

Mulai dari pelaksanaan awal. sebagian besar tidak mengalami kendala dan dapat berjalan sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat. Namun, dengan kondisi yang ada pelaksanaan kegiatan dan pelayanan perizinan tetap dilaksanakan seoptimal mungkin.



SASARAN. 12**Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Kepulauan Riau. Sektor pariwisata memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur Kepulauan Riau. Peranan sektor pariwisata semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Kepulauan Riau.

Sektor pariwisata secara umum memiliki peran yang penting dalam perekonomian Kepulauan Riau yang digambarkan oleh *multiplier effect* di Kepulauan Riau. Efek pengganda menyebabkan seluruh pengeluaran wisatawan, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah memberikan dampak ekonomi berupa pertambahan *output*, nilai tambah, pendapatan, dan penciptaan tenaga kerja di Kepulauan Riau. Melalui efek penggandanya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu fokus dalam pembangunan sesuai dengan RPJMD Kepulauan Riau 2016 – 2021 dan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah daerah Kepulauan Riau.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Dinas Pariwisata tidak bisa mewujudkan sasaran ini sendiri. Pariwisata Kepulauan Riau menjadi tanggungjawab semua elemen, baik pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, dan juga media. Berkembangnya sektor pariwisata sangat bergantung dari sektor lainnya, pada prinsipnya pembangunan pariwisata dikerjakan lintas sektor dan lintas aktor.

Kedatangan wisatawan akan meningkatkan perekonomian. karena wisatawan dapat menimbulkan multiplier efek bagi daerah yang dikunjungi. Dampak kunjungan wisatawan akan dirasakan langsung oleh pengelola akomodasi, sektor konsumsi/makan minum, transportasi, hiburan, dan penyedia oleh-oleh tentunya. Oleh karena itu pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau sangat gencar berusaha meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi capaian sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.66
Evaluasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	2.500.000	3.103	0.10

Sumber data BPS

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Wisatawan Mancanegara pada indikator ini adalah setiap orang yang berasal dari luar wilayah Indonesia, yang mengunjungi Indonesia, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi, dengan lama tinggal minimal 24 jam dan maksimal 6 (enam) bulan, dengan tujuan: berlibur, rekreasi, dan olah raga, bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan. Wisatawan Mancanegara (Wisman) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan mendapat upah dari penduduk negara yang dikunjungi.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau yang dihitung berdasarkan data melalui 4 (empat) pintu masuk yaitu; Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan.

Evaluasi terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau tahun 2021 dapat digambarkan jumlah seluruh wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau melalui 4 (empat) pintu masuk dengan jumlah total 2.559 kunjungan wisatawan mancanegara yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Hasil evaluasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2021 dengan target 2.500.000 kunjungan wisatawan mancanegara dapat tercapai 3.103 kunjungan wisatawan mancanegara sehingga capaian kinerja sebesar 0,12 % atau dalam **kategori kinerja sangat rendah**.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau tahun 2020-2021.

Tabel. 3.67
Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2020 - 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2020	2021
1.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	408.005	3.103

Dilihat dari tabel di atas jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sebesar 2.559 kunjungan mengalami penurunan sebesar 99,24 % di mana kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 408.005 kunjungan.

Sementara itu capaian kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun 2021 jika diperbandingkan dengan capaian tahun 2019 maka mengalami penurunan sebesar 99,89 % di mana kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019 sebesar 2.864.795 kunjungan. Sementara itu capaian kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun 2021 jika diperbandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 99,88 % di mana pada tahun 2018 kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau sebesar 2.635.004 kunjungan.

Capaian kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun 2021 ini jika diperbandingkan dengan capaian pada akhir tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar 99,85 % di mana angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau di tahun tersebut sebesar 2.074.534.

Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel. 3.68
Evaluasi Pencapaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2.074.534	2.635.664	2.864.795	408.005	3.103

Sumber data BPS

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 yang juga sekaligus menjadi periode akhir RPJMD tahun 2016 – 2021 maka Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari target pada akhir periode RPJMD (2021). di mana pada akhir periode RPJMD jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau ditargetkan sebesar 2.500.000 kunjungan yang berarti hanya mencapai mencapai angka 0.12 %. Perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian tahun 2021 disajikan seperti pada tabel di bawah;

Tabel. 3.69
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2021	Target akhir RPJMD (2021)	%
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	3.10	2.500.000	0.12

Sementara itu capaian pada indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2021 apabila diperbandingkan dengan target nasional maka juga masih jauh dari target yang telah ditetapkan. di mana Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 ditargetkan menyumbang 20% (800.000) dari target nasional (4.000.000) yang direvisi setelah adanya pandemic covid 19. Realisasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau atas target yang dibebankan hanya mencapai 0.39 % sebagaimana tabel dibawah.

Tabel. 3.70
Perbandingan Target Kinerja Tahun 2021 dengan Target Nasional

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Nasional 2021	%
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	3.10	800.000	0.39

Berikut disampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau menurut pintu masuk Tahun 2020-2021 sebagai berikut :

Tabel. 3.71
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pintu Masuk Tahun 2020 - 2021

No	Pintu Masuk	2020		2021	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Batam	299.158	73,32	2.651	85,44
2.	Bintan	64.896	15,91	283	9,12
3.	Tanjungpinang	22.115	5,42	154	4,96
4.	Karimun	21.836	5,35	15	0.48
Total		408.005	408.005	100	3.103

Sumber data BPS

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau dihitung berdasarkan empat kabupaten/kota sebagai pintu masuk yaitu: Kota Batam. Kabupaten Bintan. Kota Tanjungpinang. dan Kabupaten Karimun.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 paling banyak melewati pintu masuk dari kota Batam yaitu sebanyak 2.651 orang (85,44%), selanjutnya Kabupaten Bintan sebanyak 283 orang (9,12%), pintu masuk Kota Tanjungpinang sebanyak 154 orang (4,96%) dan melewati Kabupaten Karimun sebanyak 15 orang (0,48%).

Total jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 sebesar 3.103 orang. Dari seluruh kabupaten/ kota pintu masuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan kunjungan yang signifikan; Kabupaten Karimun mengalami prosentase penurunan tertinggi sebesar 99,93 %, Kabupaten Bintan mengalami prosentase penurunan sebesar 99,56 %, Kota Tanjungpinang mengalami prosentase penurunan sebesar 99,30 %, dan Kota Batam mengalami prosentase penurunan 99,11%.



Berikut disampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia Tahun 2020 – 2021 menurut Provinsi tujuan sebagai berikut :

Tabel. 3.72
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
Menurut Provinsi Tujuan Tahun 2020 – 2021

NO	Pintu Masuk/ Provinsi	2020		2021	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1.	Bali	1,041,420	25,92	51	0,003
2.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	420,506	10,46	119,063	7,644
3.	Kepulaun Riau	408,005	10,15	3,103	0,199
4.	Sumatera Utara	41,455	1,03	218	0,014
5.	Jawa Timur	34,977	0,87	689	0,044
6.	Jawa Barat	30,309	0,75	7	0.000
7.	Sulawesi Utara	23,026	0,57	15,239	0,978
8.	Daerah Istimewa Yogyakarta	18,640	0,46	0	0.000
9.	Nusa Tenggara Timur	23,514	0,59	685	0,044
10.	Kalimantan Barat	11,178	0,28	86	0,006
11.	Nusa Tenggara Barat	11,863	0,30	29	0,002
12.	Lainnya	1,953,465	48,61	1,418,360	91,065
TOTAL		4.018.358	4,018,358	100	1,557,530

Sumber data BPS

Pada tahun 2021 total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 1,557,530 di mana Kepulauan Riau menyumbang 1.103 kunjungan (0,199%). Pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau kembali turun peringkat III secara nasional setelah Jakarta dan Sulawesi Utara dengan kontribusi sebesar 0,199 % terhadap total kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional, pada tahun sebelumnya Kepulauan Riau juga menempati peringkat III secara nasional.

Sementara itu kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau ada di peringkat teratas untuk wilayah Sumatera.

Sementara itu komposisi wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau berdasarkan Negara asal dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel. 3.73
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau
Berdasarkan Negara Asal Wisatawan Tahun 2021

No	Negara Asal	Jumlah Kunjungan	Prosentase
1.	Singapura	423	13.63
2.	Malaysia	238	7.67
3.	India	33	1.06
4.	Australia	29	0,93
5.	Tiongkok	26	0.84
6.	Philipina	21	0.68
7.	Inggris	20	0.64
8.	Rusia	15	0.48
9.	Amerika	10	0.32
10.	Jepang	8	0.26
11.	Lainnya	2.280	73.43
TOTAL		3.103	100

Berdasarkan komposisi asal wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau masih didominasi wisatawan asal Singapura yang menyumbang sebesar 13.63 %, Malaysia 7.67 %, dan India 1.06%,. Selain dari negara tersebut hanya berkontribusi kurang dari 1 %.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Provinsi Kepulauan Riau telah berusaha memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada. Pemerintah Daerah Kepulauan

Riau berusaha mencapai sasaran dengan melibatkan seluruh stakeholder pariwisata, baik Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sendiri sebagai *leading sektor*, dinas-dinas pendukung di Kepulauan Riau seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata Kabupaten/ Kota, serta seluruh asosiasi pariwisata.

Sementara itu Provinsi Kepulauan Riau juga telah berusaha memaksimalkan penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.74
Tingkat Efisiensi dari capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Orang)	2.500.000	0,12	17.834.774.300	92,60	-92,50

Di lihat dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan indikator kinerja Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2021 dengan target 2.500.000 kunjungan hanya tercapai 3.103 orang atau 0,12 %. Apabila dibandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, maka untuk tingkat efisiensi sebesar minus 92,50 %.

Tabel. 3.75
Perbandingan efektifitas Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020 - 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	17,00	98,18	-81,18	0,12	92,60	-92,48

Sementara itu tingkat efisiensi pada tahun 2021 ini semakin menurun apabila dibandingkan dengan efektifitas pada tahun 2020. di mana pada tahun tersebut tingkat efisiensi mencapai -81.18 %.

Jumlah anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran tahun 2021 sebesar Rp. 17.834.774.300.- mengalami kenaikan sebesar 32.91% di mana anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran tahun 2020 sebesar Rp. 13.418.354.208.-.

Sementara itu capaian sasaran atas indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar 3.103 orang pada tahun 2021 yang mengalami penurunan sebesar 99,24% tidak berbanding lurus dengan anggaran yang bertambah sebesar 32.91% Anggaran tahun 2021 banyak dipergunakan untuk pemulihan ekonomi. branding kesiapan destinasi pariwisata dalam rangka menyambut kunjungan wisatawan. dan pelatihan Sumber Daya Manusia untuk menyambut kedatangan wisatawan mancanegara ketika dunia pariwisata telah normal kembali.

Menurut analisa kami penyebab kegagalan dari capaian sasaran strategis pada indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau karena masih berlakunya larangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia melalui PerMenkumham Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak 2 April 2020.

Tidak tercapainya target kunjungan wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau juga disebabkan tidak terlaksananya program *Travel Bubble* antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Rencananya kerjasama bilateral tersebut sepakat untuk menciptakan sebuah gelembung atau koridor perjalanan/*Travel Corridor Arrangement* (TCA) yang memudahkan penduduk yang tinggal di dalamnya melakukan perjalanan secara bebas dan menghindari kewajiban karantina mandiri.

Pada tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau tidak banyak melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung kepada keberhasilan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk membantu program pemerintah dalam penanganan pandemic covid 19. Dalam hal promosi hanya mengandalkan *digital marketing*.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 masih fokus pada pemulihan ekonomi, pengamanan jaring sosial, pembenahan destinasi dan penyiapan SDM pariwisata, serta branding kesiapan destinasi pariwisata dalam rangka menyambut kunjungan wisatawan.

Kedepannya, Provinsi Kepulauan Riau perlu mengupayakan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya yang sesuai target marketnya. Selain peran media diperlukan peran *influencer (vlogger)* baik nasional maupun asing untuk meningkatkan branding pariwisata Kepulauan Riau.

Selain itu Provinsi Kepulauan Riau masih tetap harus membenahi destinasi pariwisata, menyiapkan SDM baik pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menunjang kesiapan Kepulauan Riau dalam menyambut kedatangan wisatawan pasca dibukanya kembali arus kedatangan wisatawan mancanegara.

Kedepannya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan mengoptimalkan promosi pariwisata berbasis partisipasi masyarakat dan komunitas melalui *website, twitter, instagram, facebook, youtube*, dan berbagai aplikasi media sosial lainnya

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Jumlah total anggaran pada Dinas Pariwisata tahun 2021 termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Rp. 30.138.491.718,- (Tiga Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Dari jumlah anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata pada tahun 2021 total Rp. 30.138.491.718,- di mana jumlah anggaran utama yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah diperjanjikan adalah Rp.17.834.774.300,- dengan realisasi sebesar Rp.16.514.121.535,- atau 92.60 % sebagaimana pada tabel berikut;



Tabel. 3.76
Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
I.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
A.	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
1.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5.404.024.000.00	5.186.135.000.00	95.97	APBD
2.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.892.964.200.00	2.802.984.350.00	96.89	APBD
3.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi. Baik Dalam dan Luar Negeri	1.499.227.900.00	1.322.878.614.00	88.24	APBD
4.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	399.250.000.00	361.875.300.00	90.64	APBD
5.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	344.566.000.00	293.412.860.00	85.15	APBD
II.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
A.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				
1.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	688.164.400.00	637.157.236.00	92.59	APBD
B.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	641.966.800.00	598.878.000.00	93.29	APBD
2.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	142.049.600.00	137.078.600.00	96.50	APBD



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

	dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
3.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	640.826.500.00	617.244.650.00	96.32	APBD
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.107.321.300.00	1.990.518.000.00	94.46	APBD
C.	PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI				
1.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	369.676.200.00	316.513.100.00	85.62	APBD
D.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
1.	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	331.835.600.00	275.363.150.00	82.98	APBD
III.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				
A.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	169.178.000.00	131.387.750.00	77.66	APBD
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	285.400.000.00	268.525.675.00	94.09	APBD
B.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				APBD
1.	Pengembangan Sistem Pemasaran	164.802.000.00	153.909.500.00	93.39	APBD



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	180.620.000.00	159.529.100.00	88.32	APBD
IV.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
A.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				
1.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	476.240.000.00	392.179.100.00	82.35	APBD
2.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	489.866.800.00	390.306.200.00	79.68	APBD
3.	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	123.225.400.00	107.136.750.00	86.94	APBD
4.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	222.709.100.00	137.824.000.00	61.89	APBD
5.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	260.860.500.00	233.284.600.00	89.43	APBD
JUMLAH		17.834.774.300.-	16.514.121.535.-	92.60	

SASARAN. 13
Meningkatnya Realisasi Investasi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi ditetapkan dua indikator kinerja yaitu jumlah nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan jumlah nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). dengan evaluasi capaian sebagai berikut :

. Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2021

TAHUN	INDIKATOR					
	PMA			PMDN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	7.300.000.000	13.822.619.000	189%	500.000.000	1.397.962.000	279%
2018	7.500.000.000	11.138.727.000	148%	600.000.000	4.385.980.000	730%
2019	7.700.000.000	20.450.475.000	265%	700.000.000	5.656.425.000	808%
2020	7.900.000.000	23.750.858.000	300%	800.000.000	14.248.924.000	1.780%
2021	8.100.000.000	15.237.000.000.000	188%	900.000.000	9.768.000.000.000	1.085 %

*data dari BKPM per desember 2021

Tabel. 3.77
Capaian Meningkatnya Realisasi Investasi
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) (Rp Milyar)	8.100	15.237	188
2	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp Milyar)	900	9.768	1.085

Jumlah nilai realisasi investasi PMA tahun 2021 sebesar Rp. 15.237.000.000.000 (Lima Belas Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dari target sebesar Rp. 8.100.000.000.000 (Delapan Triliun Seratus Miliar Rupiah) atau berhasil terealisasi 188% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 9.768.000.000.000 (Sembilan Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Rupiah) dari

target Rp. 900.000.000.000 (Sembilan Ratus Miliar Rupiah) atau terealisasi 1.085 % dari target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan kepada Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 44.1 Triliun (gabungan PMA dan PMDN), maka nilai realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 25 Triliun atau sekitar 56.81% dari target yang ditetapkan.

- **Nilai Realisasi Investasi (PMA)**

Nilai Realisasi Investasi diperoleh dari dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang rutin dilaporkan oleh perusahaan. Setiap investor yang melakukan penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi perusahaan. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi yang dilakukan. LKPM juga mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan di setiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di bidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada Izin Prinsip.

Dari tabel 1 diatas diketahui realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau per september tahun 2021 sebesar Rp. 15.237.000.000.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.100.000.000.000 atau capaian 188% dari target, dan termasuk kategori sangat baik. Adapun data realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.78
Evaluasi Realisasi Investasi
Penanaman Modal Asing Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 sd 2021

Tahun	Realisasi Investasi PMA (Rp)
2016	7.108.250.023.800
2017	13.822.619.920.000
2018	11.138.727.220.000
2019	20.450.475.000.000
2020	23.750.858.880.000
2021	15.237.000.000.000

data dari BKPM

Berdasarkan tabel 2 diatas, terlihat realisasi investasi PMA pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.237.000.000.000 (Lima Belas Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah). Nilai



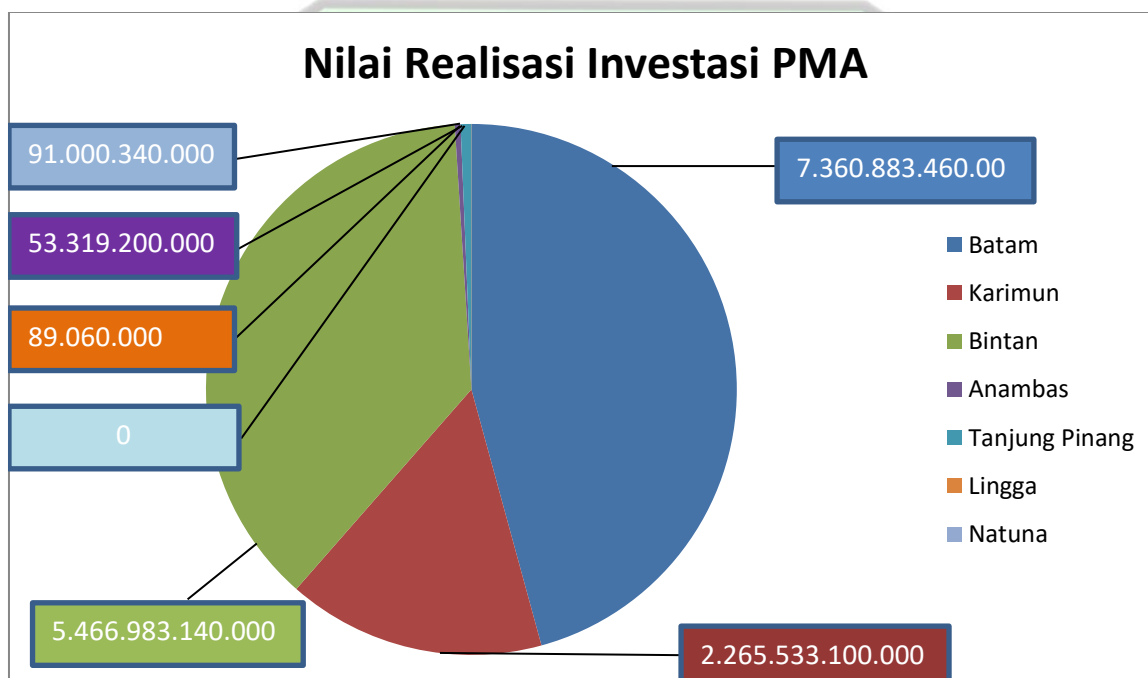
realisasi ini turun 35.84% dari tahun 2020 yaitu Rp. 23.750.858.880.000 (Dua Puluh Tiga Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Penurunan nilai realisasi ini disebabkan pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia tidak terkecuali Provinsi Kepulauan Riau, sehingga membatasi pergerakan dunia usaha. Diharapkan juga setelah data realisasi investasi per desember oleh BKPM, nilai realisasi investasi PMA dapat meningkat secara signifikan.

Tabel. 3.79
Evaluasi Realisasi Investasi
Penanaman Modal Asing di Kabupaten/Kota
Tahun 2016 sd 2021

No	Lokasi	Realisasi Investasi PMA (Rp)					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Batam	5.370.626.580.200	6.515.951.000.000	7.666.390.580.000	11.261.520.000.000	9.268.486.560.000	7.360.883.460.000
2	Karimun	967.444.126.200	2.401.846.820.000	144.697.220.000	282.772.500.000	1.584.142.560.000	2.265.533.100.000
3	Bintan	477.416.660.800	4.802.823.020.000	3.268.774.560.000	8.504.482.500.000	12.889.490.400.000	5.466.983.140.000
4	Anambas	278.483.922.800	38.752.800.000	9.481.840.000	305.622.000.000	-	53.319.200.000
5	Tanjungpinang	4.136.957.400	48.727.760.000	88.440.000	95.925.000.000	8.565.120.000	91.000.340.000
6	Lingga	1.843.212.400	5.231.360.000	3.652.840.000	-	174.240.000	89.060.000
7	Natuna	8.298.564.000	9.278.160.000	45.641.740.000	153.000.000	-	0
Total		7.108.250.023.800	13.822.619.920.000	11.138.727.220.000	20.450.475.000.000	23.750.858.880.000	15.237.808.300.000

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi Investasi (PMA) pada Tahun 2021 paling tinggi adalah Kabupaten/Kota. Saat pandemi Covid-19 melanda dan membuat beberapa perusahaan sektor pariwisata tumbang dan tutup, kegiatan realisasi investasi di berbagai bidang di Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang justru mengalami peningkatan. Hal ini karena banyak perusahaan yang sedang membangun atau menambah kapasitasnya.

Gambar persebaran realisasi investasi (PMA) pada tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :



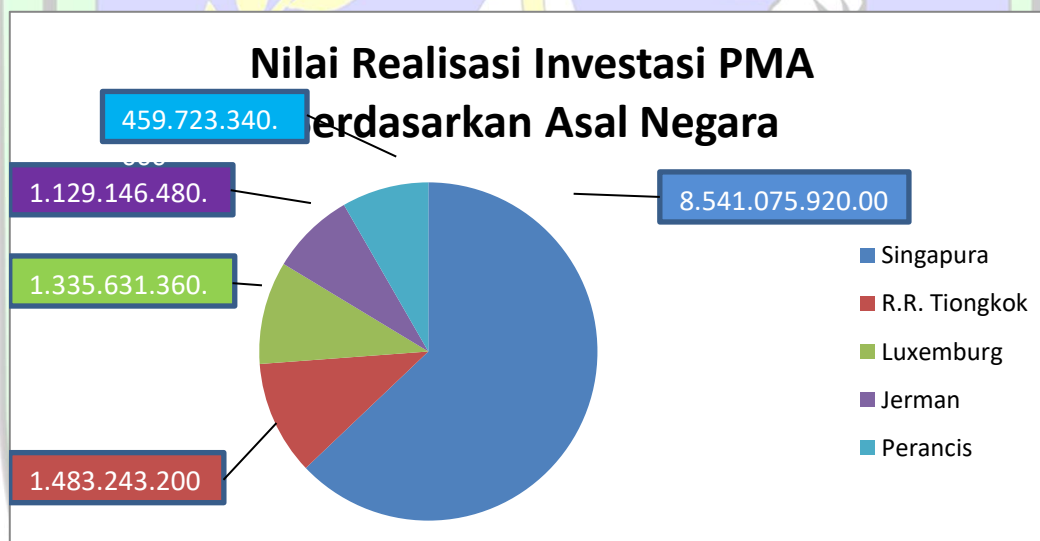
**Gambar. 3.16 Persebaran Nilai Realisasi Investasi (PMA)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021**

Nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Kota Batam. Kabupaten Bintan dan Karimun, jauh meninggalkan capaian empat kabupaten/kota lainnya. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terjadi pemerataan realisasi investasi. Salah satu yang menjadi hambatan adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di kabupaten Anambas, Lingga, dan Natuna. Walaupun potensi yang ditawarkan cukup tinggi, namun minimnya sarana pendukung menjadi hambatan tersendiri bagi perkembangan investasi di daerah tersebut. Belum lagi dengan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih melanda dunia, menjadikan rencana investasi yang sudah dipersiapkan menjadi belum dapat terealisasi.

Realisasi Investasi PMA berdasarkan Negara asal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.80
Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan Negara Asal

No	Negara Asal	Nilai Investasi PMA (Dalam US\$.Ribu)
1	Singapura	8.541.075.920.000
2	R.R.Tiongkok	1.483.243.200.000
3	Luxembourg	1.335.631.360.000
4	Jerman	1.129.146.480.000
5	Perancis	459.723.340.000



*Gambar. 3.17 Persebaran Nilai Realisasi Investasi (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021
Berdasarkan Asal Negara*

- **Nilai Realisasi Investasi (PMDN)**

Indikator kinerja nilai realisasi investasi (PMDN) dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp 900.000.000.000.- (Sembilan ratus miliar rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp 9.768.000.000.000 (Sembilan Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Rupiah) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 1.085% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Sebagaimana nilai realisasi PMA, nilai realisasi PMDN juga dapat diketahui dari LKPM yang disampaikan oleh perusahaan yang berinvestasi di suatu daerah. Data akhir realisasi yang dikeluarkan oleh BKPM sebagai lembaga yang berwenang menyampaikan data investasi di Indonesia, nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau per september tahun 2021 sebesar Rp. 9.768.000.000.000 (Sembilan Triliun Tujuh Ratus

Enam Puluh Delapan Miliar Rupiah) dari target Rp. 800.000.000.000 (Delapan Ratus Miliar) yang ditetapkan dalam RPJMD.. Adapun nilai realisasi investasi PMDN enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.81
Evaluasi Realisasi Investasi
Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 sd 2021

Tahun	Realisasi Investasi PMDN (Rp)
2016	492.512.500.000
2017	1.397.962.200.000
2018	4.385.980.300.000
2019	5.656.425.300.000
2020	14.248.924.600.000
2021	9.768.000.000.000

data dari BKPM

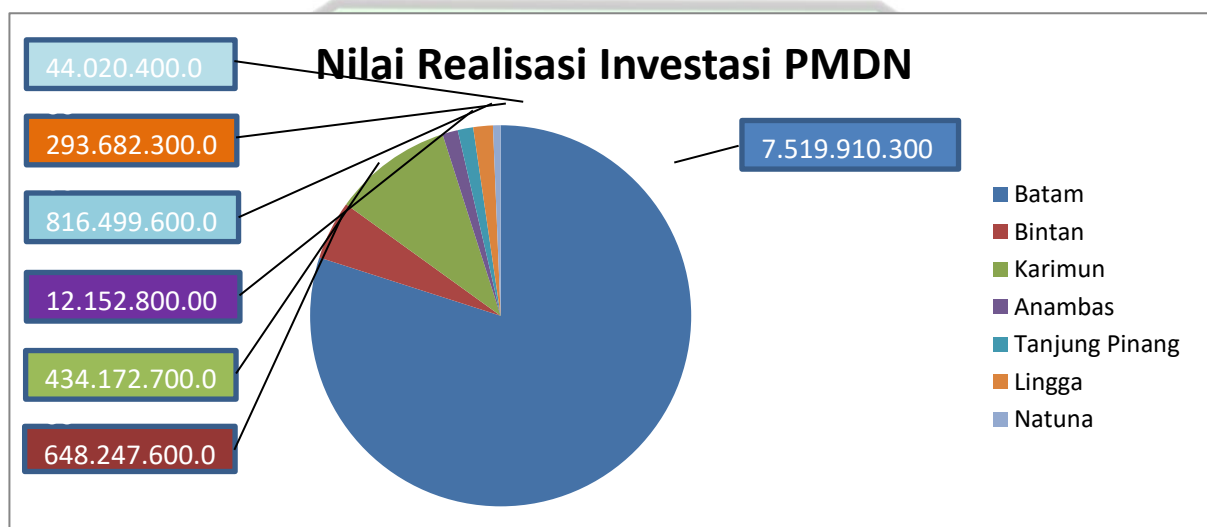
Dari tabel 2.75 terlihat nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau per september 2021 sebesar Rp. 9.768.000.000.000 (Sembilan Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Rupiah). turun sekitar Rp. 4.480.924.600.000 atau 31.4% dari tahun sebelumnya. Walaupun jumlah ini sebenarnya sudah melebihi capaian tahun 2016 sampai dengan 2019. namun adanya pandemi Covid-19 masih menjadi hambatan besar pencapaian realisasi investasi baik PMA maupun PMDN. Semoga data akhir yang dirilis oleh BKPM untuk tahun 2021 nanti. capaian realisasi investasi PMDN mampu melewati atau paling tidak menyamai capaian realisasi investasi pada tahun 2020.

Tabel. 3.82
Realisasi Investasi PMDN di Kabupaten/Kota
Tahun 2016 s.d 2021

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi PMDN (Rp)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Batam	489.455.800.000	1.091.447.700.000	3.181.498.500.000	4.876.613.800.000	13.688.861.900.000	7.519.910.300.000
2	Kota Tanjungpinang	-	79.535.100.000	45.473.800.000	160.197.100.000	144.924.800.000	816.499.600.000
3	Kabupaten Karimun	2.077.400.000	106.663.300.000	109.269.300.000	342.777.900.000	152.671.800.000	434.172.700.000
4	Kabupaten Bintan	400.000.000	47.127.600.000	1.030.980.700.000	259.803.700.000	120.228.000.000	648.247.600.000
5	Kabupaten Lingga	-	940.700.000	0	1.530.600.000	120.014.300.000	293.682.300.000
6	Kabupaten Anambas	-	-	0	4.985.000.000	4.594.800.000	12.152.800.000
7	Kabupaten Natuna	579.300.000	72.247.800.000	18.758.000.000	10.517.200.000	17.629.000.000	44.020.400.000
TOTAL							9.768.685.700.000

data dari BKPM

Berdasarkan LKPM yang sudah masuk. Realisasi Investasi PMDN Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut :



Gambar. 3.18 Persebaran Nilai Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 per Kabupaten Kota

Capaian nilai realisasi investasi PMDN Kota Batam masih jauh mengungguli capaian-capaian investasi di Kabupaten/Kota lain. Hal ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun sebelumnya. Sama halnya dengan PMA, faktor yang menjadikan Kota Batam jauh mengungguli dikarenakan kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana serta letak geografis yang strategis.

Penganggaran Program/Kegiatan DPMPTSP Tahun 2021

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan dan sub kegiatan dalam 6 Program berikut :

Tabel. 3.83
Program DPMPTSP Tahun 2021

No	Program
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3	Program Promosi Penanaman Modal
4	Program Pelayanan Penanaman Modal
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Data Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang disajikan merupakan data per September Tahun 2021. dikarenakan BKPM belum merilis secara resmi data investasi di Triwulan IV. Dari data sementara, capaian realisasi investasi sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 dengan persentase capaian sebesar 188% untuk PMA dan 1.085 % dari target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, nilai realisasi investasi pada tahun 2021 masih belum bisa melampaui atau bahkan menyamai pencapaiannya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor utama antara lain :

- Pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia, termasuk Kepulauan Riau sehingga membatasi pergerakan dunia usaha.
- Realisasi Investasi Perusahaan tidak sesuai dengan Rencana Realisasi yang disampaikan.
- Masih terdapat perusahaan yang tidak melaporkan dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Sebagai penggerak pencapaian terhadap peningkatan penanaman modal, DPMPTSP dibekali dengan penganggaran program dan kegiatan DPMPTSP di tahun 2021. dimana datanya disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tergambar sebagai berikut :

Tabel. 3.84
Perbandingan Penganggaran DPMPTSP Tahun 2017-2021 berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Langsung	11.050.166.356	7.792.751.470	8.644.656.000	3.600.579.582	4.139.135.494
Belanja Tidak Langsung	3.978.036.952	4.754.215.567	9.564.215.618	8.762.931.232	10.105.300.371
Total	15.028.203.308	12.546.967.037	18.208.871.618	12.363.510.814	14.244.435.865

Penganggaran DPMPTSP mengalami dinamika kenaikan maupun juga penurunan yang menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Pada tahun 2021 terlihat mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.85
Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		ANGGARAN	%
Belanja Langsung	4.139.135.494	3.948.640.766	95.39
Belanja Tidak Langsung	10.105.300.371	9.595.696.394	94.95
Total	14.244.435.865	13.544.337.160	95.17

Realisasi anggaran DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebesar Rp. 13.5 Miliar dari anggaran Rp. 14.2 Miliar atau sekitar 95.17%. Adapun anggaran yang tidak bisa direalisasikan sebagian besar berasal dari gaji dan tunjangan pegawai yang pensiun dan pindah ke OPD lain.

SASARAN. 14
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Kepulauan Riau. Sektor perdagangan memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan, dan mendorong perekonomian provinsi Kepulauan Riau. Peranan sektor perdagangan besar dan eceran semakin penting sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika mampu dioptimalkan didukung letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. maka peluang untuk mengeksport produk-produk unggulan Provinsi Kepulauan Riau tersebut terbuka lebar. dan kontribusi yang diberikan sektor perdagangan melalui akselerasi kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran bersumber dari peningkatan aktivitas perdagangan antar daerah dan ke luar negeri.

Ekspor sebagai salah satu sumber devisa negara saat ini sedang berusaha digalakkan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dunia dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2.9% pada tahun 2019. Adalah rekor terendah. Hal ini merupakan tantangan global yang dihadapi yaitu adanya konflik. Ancaman non-tradisional. populisme (sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang di sebut elit). proteksionisme (Kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar Negara melalui cara-cara seperti tarif barang import. batas kuota. dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil). bencana alam. rivalitas/persaingan. trade war/perang dagang. Adanya perubahan kondisi ekonomi global dan regulasi yang sangat cepat. tidak diimbangi dengan intensitas (komunikasi. sosialisasi&mediasi) antar pelaku usaha eksportir dan importir dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan nilai ekspor dengan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha. diantaranya adalah dengan memberikan fasilitasi ekspor dan impor. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut



diharapkan para pengusaha lebih termotivasi untuk meningkatkan ekspor produk-produk mereka. sehingga devisa yang masuk ke Indonesia akan semakin besar.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang diukur berdasarkan besaran PDRB Lapangan usaha atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.86
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2021

No	Lapangan Usaha/Sektor Usaha PDRB	[Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)			
		2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.100.215,59	8.223.770,09	8.061.287,21	8.470.555,46
2	Pertambangan dan Penggalan	35.148.524,03	34.964.435,85	28.391.325,00	34.716.338,34
3	Industri Pengolahan	91.792.574,06	100.705.378,60	105.899.714,30	115.852.493,75
4	Pengadaan Listrik, Gas	2.644.609,63	2.763.729,27	2.603.102,35	2.733.324,23
5	Pengadaan Air	288.735,55	291.287,12	281.458,37	279.641,60
6	Konstruksi	46.628.248,31	52.239.254,82	49.317.721,92	53.159.158,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.074.794,1	24.314.345,42	21.561.951,67	22.474.868,28
8	Transportasi dan Pergudangan	7.648.632,38	7.219.023,71	4.111.948,12	3.826.971,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.585.876,45	6.208.870,52	3.391.339,93	3.171.664,57
10	Informasi dan Komunikasi	5.016.209,28	5.603.091,08	6.483.543,9	7.078.071,84
11	Jasa Keuangan	6.781.343,52	7.271.530,18	6.991.384,68	7.191.816,93
12	Real Estate	3.467.236,77	3.563.184,73	3.195.114,26	3.116.427,02
13	Jasa Perusahaan	12.475,70	11.378,51	5.823,38	6.637,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.385.002,87	6.791.467,49	7.347.301,63	6.697.961,39
15	Jasa Pendidikan	3.708.434,66	3.849.230,76	3.896.178,95	3.878.483,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.228.235,58	2.305.965,16	2.277.838,82	2.571.773,49
17	Jasa lainnya	1.311.084,62	1.332.300,44	436.250,56	429.971,86
	PDRB	248.822.233,10	267.658.243,75	254.253.285,05	275.656.160,27

Sumber Data : BPS Kepulauan Riau Tahun 2020



Capaian kinerja dari indikator kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 3.87
Capaian Kinerja Meningkatnya kinerja sektor perdagangan
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
		Targ et	Realis asi	% Capai an	Targ et	Realis asi	Realis asi	Targ et	Realis asi	% Capaian	Targ et	Realis asi	% Capaian	Targ et	Realis asi	% Capaian
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,19	7	85,47	8,27	8,56	103,50	8,35	9,07	108,62	8,44	8,50	100,71	8,25 %	8,15%	98,79 %

Sumber Data : BPS Kepulauan Riau Tahun 2020

Unit ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian kontribusi sektor perdagangan merupakan perbandingan dari jumlah PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan jumlah PDRB dikali 100.

Analisis terhadap Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2020 dapat digambarkan jumlah PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni 22.474.868.28 (dalam juta rupiah) dibagi dengan jumlah PDRB yakni 275.656.160,27 (dalam juta rupiah) dengan persentase 8,15%. Dari data di atas dapat kita lihat kinerja sektor perdagangan belum dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 8.25% pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 8,15%. Dan capaian realisasi kinerja sebesar 98,79% pada tahun 2021.

Hal ini disebabkan oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalan yang memberikan andil cukup besar terhadap proporsi pertumbuhan PDRB provinsi Kepri tahun 2021 sehingga sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontraksi. namun secara nilai kinerja sektor perdagangan meningkat sebesar 4,23% (dapat dilihat pada Tabel 3.88).

Tabel 3.88
Persentase Pertumbuhan Nilai PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 s/d 2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pertumbuhan Nilai PDRB sektor perdagangan	10.93%	12.32%	10.15%	-11.32%	4.23%

Tabel. 3.89
Capai Kinerja PDRB Sektor Perdagangan
Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2021	Target akhir RPJMD (2021)	%
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8.15%	8.52%	95.66

Tahun 2021 adalah tahun akhir dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Priode 2016-2021. Sektor perdagangan diharapkan dapat mendukung pencapaian misi pembangunan yang telah ditetapkan didalam RPJMD dengan sasaran Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indicator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB yang mana pada tahun akhir RPJMD yakni tahun 2021 ditetapkan target sebesar 8.52%. Dari table diatas dapat kita simpulkan bahwa kinerja sektor perdagangan belum mencapai target yang ditetapkan namun dari penilaian realisasi kinerja dapat dikategorikan dengan sangat tinggi sebar 95,66%. Hal ini disebabkan oleh terkontraksinya sektor perdagangan oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian yang memberi andil proporsi yang besar terhadap pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Tapi jika dilihat dari Nilai sektor perdagangan tumbuh sebesar 4,23% dari tahun 2021.

Tabel. 3.90
Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 s/d 2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	0.43%	0.24%	0.21%	-0.6%	-0.33%

Pertumbuhan sektor perdagangan yang menunjukkan tren membaik didukung oleh . Akselerasi kinerja perdagangan besar dan eceran bersumber dari peningkatan aktivitas

perdagangan antar daerah dan ke luar negeri. Hal ini juga ditunjang dengan perbaikan kinerja ekspor yang meningkat pada tahun 2021.

Dari table diatas terlihat kinerja sector perdagangan menunjukan kinerja yang membaik dari tahun sebelumnya hal ini didukung oleh membaik kinerja ekspor yang meningkat dengan total nilai ekspor US\$16.019,02 juta dibanding tahun 2020 sebesar US\$12.006,08 juta sehingga peningkatan kinerja sector perdagangan tumbuh sekitar 15,60%

Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 dalam meningkatkan kinerja sektor perdagangan dengan cara :

1. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penting serta menjaga fluktuasi harga barang pokok dan penting. dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Kepulauan Riau melakukan Pemantauan harga diseluruh pasar dan melakukan Pasar murah bersubsidi.
2. Melakukan sosialisasi perlindungan konsumen dan fasilitasi pengaduan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan Fasilitasi Ekspor dan Impor untuk mendukung daya saing produk daerah.

Selain upaya-upaya diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan beberapa program penunjang untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan yakni :

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan
3. Program peningkatan dan pengembangan ekspor.

SASARAN. 15***Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan,*****Kinerja**

bagi kelangungan h

idup masyarakat. Untuk mencapai sasaran Berkurangnya kerusakan lingkungan. meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan dapat dilihat melalui dua Indikator yakni Persentase Waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu dan Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan.

Adapun evaluasi terhadap pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 3.91**Capaian Kinerja Berkurangnya Kerusakan Lingkungan. Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya dukungan Kota Hijau dengan Penataan Bangunan dan Lingkungan. Pembangunan Inovasi Teknologi Terapan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Permukiman/Perumahan di Perkotaan	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	10.99 %	16.27%

Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan merupakan merupakan perbandingan dari Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan Perkotaan dibagi Luas Wilayah dikali 100. Evaluasi terhadap Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Tahun 2021 dapat digambarkan Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan Perkotaan yakni 22.392.155 ha dibagi dengan Luas Wilayah Perkotaan yakni 137.667 ha dengan persentase 16.27%.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

Definisi operasional Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidak sesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan Tahun 2020 dan tahun 2021 :

Tabel 3.92
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Data Awal (Tahun 2020)	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	16.27%	10.99%	16.27%	148.04%

Hasil evaluasi Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan perkotaan dengan target sebesar 10.99% dapat tercapai sebesar 16.27% sehingga capaian kinerja sebesar > 100% atau dalam kategori kinerja **sangat baik**.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017-2021

Berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2021 yang juga sekaligus menjadi periode akhir RPJMD tahun 2016 – 2021. maka indikator kinerja Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.93
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Proporsi RTH Publik di Wilayah Perkotaan Tahun 2017 - 2021

Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Proporsi RTH Publik di Wilayah Perkotaan	10,52	16,20	153,99	10,52	16,27	154,65	10,84	16,27	150,09	10,84	16,27	150,09	10,99	16,27	148,04

Tata cara penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan sebagaimana perhitungan tabel sebagai berikut :



Tabel 3.94
Proporsi RTH Publik di Wilayah Perkotaan se Provinsi Kepri

No	Kab/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	% luas RTH terhadap luas perkotaan	Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	% luas RTH terhadap luas perkotaan	Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	% luas RTH terhadap luas perkotaan	Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	% luas RTH terhadap luas perkotaan	Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	% luas RTH terhadap luas perkotaan
1	Tanjungpinang	15.124	1.414.49	9.35%	15.124	1.414.49	9.35%	15.124	1.414.49	9.35%	15124	1414.49	9.35%	15124	1414.49	9.35%
2	Bintan	5.070	378.62	7.47%	5.070	378.62	7.47%	5.070	378.62	7.47%	5070	378.62	7.47%	5070	378.62	7.47%
3	Batam	102.957	19.236.05	18.69%	102.957	19.321.075	18.77%	102.957	19.321.075	18.77%	102957	19321.15	18.77%	102957	19321.275	18.77%
4	Karimun	5.594	955.13	17.07%	5.594	955.13	17.07%	5.594	955.13	17.07%	5594	955.13	17.07%	5594	955.13	17.07%
5	Lingga	4.240	192.53	4.54%	4.240	192.53	4.54%	4.240	192.53	4.54%	4240	192.53	4.54%	4240	192.53	4.54%
6	Natuna	4.509	130.31	2.89%	4.509	130.31	2.89%	4.509	130.31	2.89%	4509	130.31	2.89%	4509	130.31	2.89%
7	Anambas	173	n.a	0.00%	173	n.a	0.00%	173	n.a	0.00%	173	n.a	0.00%	173	n.a	0.00%
Total		137.667	22.307.13	16.20%	137.667	22.392.155	16.27%	137.667	22.392.155	16.27%	137667	22392.23	16.27%	137667	22392.355	16.27%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Tahun 2021 paling banyak dimiliki oleh Kota Batam sebesar 18.77% sedangkan yang paling sedikit memiliki Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan yakni Kabupaten Natuna sebesar 2.89%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Nasional

Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di setiap kota memiliki tiga fungsi penting yaitu ekologis, sosial-ekonomi dan evakuasi. Dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, jumlah RTH di setiap kota harus sebesar 30 persen dari luas kota tersebut.

Dapat dilihat perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan dengan target target nasional pada tabel berikut :

Tabel 3.95
Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Target Nasional Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Provinsi	Capaian
1	Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan	20.00%	16.27%	81.35%

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terbatas setiap tahunnya. Undang-Undang Penataan Ruang No. 26/2007, khususnya pasal 29 mengamanatkan proporsi RTH di perkotaan paling sedikit tiga puluh persen dari luas wilayahnya. Angka tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik sistem hidrologi, mikroklimat, dan ekologis lain, untuk meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta meningkatkan nilai estetika kota.

Dari tabel diatas dapat terlihat realisasi proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Provinsi Kepulauan Riau masuk pada kategori **sangat baik** karena memiliki capaian sebesar 81.35%.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dan kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dan tingkat efisiensi keuangan. Capaian kinerja Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan berdasarkan sasaran strategis sebesar 148.04% dan capaian berdasarkan penyerapan keuangan pada tahun 2021 adalah sebesar 99.98%.

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori sangat baik. Dukungan program/kegiatan/sub kegiatan penunjang capaian kinerja Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan pada tahun anggaran 2021 yang bersumber dari dana APBD-P Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari rincian sebagai berikut :

Tabel 3.96
Program/Kegiatan Penunjang Capaian
Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Kinerjs			Anggaran				Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi	
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA.SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.99%	16.27%	148.04%	170.000.000	169.973.000	99.98%		
	Pembangunan Taman Jasinta RW 06				170.000.000	169.973.000	99.98%		

G. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Pagu Anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 mengalami refocusing/pengurangan pagu anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penanganan pandemic Covid-19. Sehingga terdapat beberapa capaian kinerja dari program/kegiatan tahun 2021 tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia/personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau telah cukup memadai dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Waktu Pelaksanaan

Terdapat kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 yaitu adanya permasalahan Pandemi Covid-19, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan beberapa program/kegiatan tahun 2021 yang tidak sesuai dengan target waktu pelaksanaan yang telah direncanakan. Kondisi cuaca dan geografis Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi sehingga menghambat waktu pelaksanaan program/kegiatan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

Tabel. 3.97
Proporsi RTH Publik di Wilayah Perkotaan se Provinsi Kepri

No	Kab/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	% luas RTH terhadap luas perkotaan	Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	%luasRTH terhadap luas perkotaan	Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	% luas RTH terhadap luas perkotaan	Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	% luas RTH terhadap luas perkotaan	Luas Perkotaan (ha)	Luas RTH (ha)	%luasRTH terhadap luas perkotaan
1	Tanjungpinang	15.124	1.414.49	9.35 %	15.124	1.414.49	9.35 %	15.124	1.414.49	9.35 %	15.124	1.414.49	9.35 %	15124	1414.49	9.35%
2	Bintan	5.070	378.62	7.47 %	5.070	378.62	7.47 %	5.070	378.62	7.47 %	5.070	378.62	7.47 %	5070	378.62	7.47%
3	Batam	102.957	19.236.05	18.69 %	102.957	19.321.075	18.77%	102.957	19.321.075	18.77%	102.957	19.321.15	18.77%	102957	19321.275	18.77%
4	Karimun	5.594	955.13	17.07 %	5.594	955.13	17.07 %	5.594	955.13	17.07 %	5.594	955.13	17.07 %	5594	955.13	17.07%
5	Lingga	4.240	192.53	4.54 %	4.240	192.53	4.54 %	4.240	192.53	4.54 %	4.240	192.53	4.54 %	4240	192.53	4.54%
6	Natuna	4.509	130.31	2.89 %	4.509	130.31	2.89 %	4.509	130.31	2.89 %	4.509	130.31	2.89 %	4509	130.31	2.89%
7	Anambas	173	n.a	0.00 %	173	n.a	0.00 %	173	n.a	0.00 %	173	n.a	0.00 %	173	n.a	0.00%
Total		137.667	22.307.13	16.20 %	137.667	22.392.155	16.27 %	137.667	22.392.155	16.27 %	137.667	22.392.155	16.27 %	137667	22392.355	16.27%



Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Tahun 2020 paling banyak adalah di Kota Batam yakni 18.77% dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Natuna yakni 2.89%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran					
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu anggaran	Target Penyerapan Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi	Ket
1	Berkurangnya Kerusakan Lingkungan. Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	10.99%	16.27%	148.04%	Rp 170.000.000	95.00%	Rp 169.973.000	99.98%	-	-

Faktor kegagalan/ keberhasilan program:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian target program kinerja;
2. Adanya upaya – upaya strategis dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja OPD;
3. Melaksanakan perencanaan anggaran sesuai dengan kewenangan OPD;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap jalannya kegiatan;

SASARAN. 16
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah ditetapkan indikator kinerja Indeks Profesionalitas pegawai, Nilai Hasil SAKIP, dan Nilai E-Government. Capaian Kinerja dari Indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel. 3.98
Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Profesionalitas pegawai	80	54.02	67.52
2.	Nilai Hasil SAKIP	BB		
3.	Nilai E-Government	2.5	1.96	78.4

- ***Indeks Profesionalitas Pegawai***

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Profesional seperti amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan didukung Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka diperlukan alat untuk mengukur tingkat keprofesionalitas ASN.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan dibarengi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyusun Pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

hal ini merupakan penyempurnaan dari Indeks Profesionalitas Pegawai yang telah dikeluarkan oleh BKN tahun sebelumnya.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN (dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil) diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai) dengan bobot 25%;
- b. Kompetensi (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan) dengan bobot 40%;
- c. Kinerja (diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS yang meliputi SKP dan Perilaku Kerja) dengan bobot 30%; dan
- d. Disiplin (diukur dari indikator penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami) dengan bobot 5%.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mempunyai 5 (lima) Kategori Tingkat Profesionalitas ASN;

- a. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Peta atau potret Tingkat Profesionalitas ASN bisa bermanfaat bagi ASN sendiri karena bisa mengetahui sejauh mana ASN bisa profesional dalam bekerja; bagi Instansi Pemerintah karena dapat melihat ASN yang mempunyai tingkat profesionalitas tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah sehingga bisa dilakukan peningkatan bagi yang masih rendah dan pemberian reward bagi yang sudah



mempunyai kategori tinggi profesionalitasnya; dan bermanfaat bagi masyarakat. hal ini bisa digunakan bagi masyarakat untuk memberi masukan kepada pimpinan instansi pemerintah agar meningkatkan ASN yang berkategori rendah dan sangat rendah tingkat profesionalitasnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah provinsi. sesuai dengan amanat dari Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadikan Indeks Profesionalitas Pegawai (ASN) sebagai Indikator Kinerja Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dari masing-masing Instansi dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara secara manual dan elektronik dan diteruskan ke Menteri secara manual dan elektronik dan kemudian dijadikan dasar Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN secara nasional oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan ditetapkan oleh Menteri.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau melakukan penilaian IPP secara elektronik pada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan indikator Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Sasaran penilaian IPP dilakukan kepada seluruh PNS dengan jumlah 2.684 PNS dan 2.197 Guru tetapi untuk tahun 2021 masih menggunakan data sampling sebanyak 4.881 pegawai sebagaimana yang terdata dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN.

Formula dalam penghitungan IPP adalah Jumlah Total Hasil Perkalian: (Bobot Dimensi/Indikator) X Skor (masing-masing jawaban Dimensi/Indikator).

$$\begin{aligned} IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\ &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} IP_1 &= W_{1j} * R_{1j} \\ IP_2 &= W_{2k} * R_{2k} \\ IP_3 &= W_{3l} * R_{3l} \\ IP_4 &= W_{4m} * R_{4m} \end{aligned}$$

Dimana :

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

W_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W_{3l} = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W_{4m} = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Metode pengukurannya dilakukan oleh tim penilai dengan menginput data proxy dan data pendukung dimana sumber data antara lain Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (SAPK BKN). SILAT BKPSDM. SKP Pegawai. dan data pegawai yang pernah dijatuhi hukuman.

Pengolahan data IPP dibagi ke dalam beberapa jenis identifikasi. untuk Dimensi Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal yang dicapai. meliputi Pendidikan S-3; Pendidikan S-2; Pendidikan S-1; Pendidikan D-3; Pendidikan



D-2/D-1/SLTA Sederajat dan Pendidikan di bawah SLTA dengan nilai secara berurutan dari 5;4;3;2;1 dan 0.

Pada penghitungan Dimensi Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi Diklat Kepemimpinan; Diklat Fungsional; Diklat Teknis; dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara dengan nilai jika pernah mengikuti diklat kepemimpinan 1 jika tidak pernah mengikuti mempunyai nilai 0 demikian seterusnya.

Perhitungan Dimensi Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan Perilaku Kerja dengan nilai perhitungan sesuai dengan nilai Gabungan Penilaian Kinerja.

Dimensi keempat yang dinilai adalah Dimensi Disiplin. Penilaian ini diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin; dan Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin (Ringan, Sedang dan Berat) dengan penilaian 0 untuk yang Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin; R Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan; S Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang; dan B Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat.

Ketika semua data dari empat aspek tersebut telah diisi, maka tabel perhitungan akan secara otomatis memberikan data yang diperlukan untuk mengetahui nilai indeks. Adapun hasil rekapitulasi pengolahan data Indeks Profesionalitas Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 adalah 53.40 yang berarti Tingkat Profesionalitas ASN (Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada kategori sangat rendah, dengan rincian kategori :



Tabel. 3.99
Rincian Tingkat Profesionalitas ASN (Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Kategori	Bobot	Nilai		
			2019	2020	2021
1	Kualifikasi	25	14.30	14.18	14.34
2	Kompetensi	40	20.55	9.29	9.02
3	Kinerja	30	25.25	25.30	25.07
4	Disiplin	5	5	4.99	4.99
TOTAL			65.10	53.77	54.02

Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Pegawai dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.100
Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Pegawai Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Profesionalitas Pegawai	80	54.02	67.52

Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme pegawai.

Persentase Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) merupakan rekapitulasi terhadap indikator kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Analisis Persentase Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) Tahun 2021 dapat digambarkan dengan penjumlahan nilai kualifikasi sebesar 14.34%, kompetensi sebesar 9.62%, kinerja sebesar 25.07% . dan Disiplin 4.99% sehingga nilai Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) Tahun 2021 sebesar 54.02%.

Hasil Analisis Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) dengan target 80% dapat tercapai sebesar 54.02%. sehingga capaian kinerja sebesar 67.52% atau dalam **kategori kinerja kurang.**



Tabel. 3.101
Analisis Indeks Pegawai (IPP)
Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Profesionalitas Pegawai	70	84.56	128.80	72	79	109.72	75	65.10	86.80	78

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Keseluruhan	4874	14.34	9.21	25.05	4.99	53.6

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENIS KELAMIN

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Laki-Laki	2281	14.25	8.38	25.02	4.99	52.64
Perempuan	2593	14.41	9.94	25.09	5	54.44

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI PER JENIS JABATAN

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Jabatan Struktural	723	17.14	9.43	26.31	4.98	57.87
Jabatan Fungsional	2429	14.62	14.52	24.94	5	59.08
Pelaksana	1722	12.75	1.64	24.68	4.99	44.07

Dari data tersebut dapat digambarkan hasil rekapitulasi pengolahan data Indeks Profesionalitas Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan 5 tahun terakhir, yakni sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2020. Pada Tahun 2017 reaslisasi IPP sebesar 84.56% dari target 70%. Pada Tahun 2018 menjadi 79% dari target 72%. kemudian Tahun 2019 menjadi 65.10% dari target 75%. Tahun 2020 menjadi 53.77% dari target 78% dan Tahun 2021 menjadi 53.60%.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 maka Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari target RPJMD. di mana pada target RPJMD jumlah Indeks Profesional Pegawai (IPP) sebesar 80%. sedangkan realisasi sebesar 54.02%.



sehingga baru mencapai 67.52%. Perbandingan target RPJMD dengan capaian tahun 2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.102
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD (2021)	Realisasi Hingga 2021	%
1.	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	80	54.02	67.52%

Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas Pegawai di Lingkungan Kerja Wilayah Kantor Regional XII BKN Pekanbaru untuk tingkat Pemerintah Provinsi :

NO	Instansi	Jumlah PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
1	Pemprov Kepulauan Riau	4.881	14.34	9.62	25.07	4.99	54.02	Sangat Rendah
2	Pemprov Riau	14.385	14.12	8.71	24.56	5	52.4	Sangat Rendah
3	Pemprov Sumatera Barat	17.459	14.18	11.25	18.89	5	49.31	Sangat Rendah

Faktor yang membedakan Penilaian IPP Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Responden

Penilaian pada tahun 2017 hanya mengambil sampling dari seluruh ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu para Pejabat Pimpinan Tinggi. Administrator dan Pengawas. Penilaian di tahun 2018 karena keterbatasan waktu sehingga hanya dapat mengambil sampling sebanyak 38 pegawai ASN. Tahun 2019 mengambil sampling dari seluruh ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 4.992 pegawai dari total 5.161 pegawai (96.72%) sedangkan tahun 2020 melakukan penilaian terhadap seluruh ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terdata dalam data base BKN sebanyak 4.971 pegawai sebagaimana



yang terdata dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN. begitu juga di tahun 2021 sebanyak 4.881 pegawai sebagaimana yang terdata dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN.

2. Indikator penilaian IPP

Pada tahun 2017 dimensi pengukurannya menggunakan aspek kompetensi. aspek kompensasi. aspek penilaian kinerja dan aspek disiplin sementara IPP tahun 2018 menggunakan penilaian dari dimensi kualifikasi. dimensi kompetensi. dimensi kinerja dan dimensi disiplin. Di tahun 2021 indikator penilaian sama dengan tahun 2018. 2019 dan 2020.

Program kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerjanya Indeks Profesionalitas Pegawai adalah :

Tabel. 3.103
Program Pendukung Indeks Profesionalitas Pegawai

N O	Indikator Kinerja/ Dimensi Penilaian	Program	Kegiatan
1	- Dimensi Kualifikasi Pendidikan	Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
2	- Dimensi Disiplin		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
3	- Dimensi Kinerja		Evaluasi Disiplin ASN
4	- Dimensi Kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan



N O	Indikator Kinerja/ Dimensi Penilaian	Program	Kegiatan
			Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. dan Sumber Belajar
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan

Tabel. 3.104
Program Yang Mendukung Indikator Kinerja Indeks Profesional Pegawai

No	Indikator Kinerja/ Dimensi Penilaian	Program	Kegiatan	Target	Pagu	Ket
1	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)					
	- Dimensi Kualifikasi Pendidikan	Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	23 Pegawai	Rp. 1.221.745.200.-	
	- Dimensi Disiplin		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Kasus	Rp. 138.877.000.-	
	- Dimensi Kinerja		Evaluasi Disiplin ASN	12 bulan	Rp. 118.391.300.-	
	- Dimensi Kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan		Rp. 751.752.400.-	



No	Indikator Kinerja/ Dimensi Penilaian	Program	Kegiatan	Target	Pagu	Ket
			Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum			
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Rp. 634.622.200.-	
			Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. dan Sumber Belajar	30 Orang	Rp. 145.924.600.-	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan		Rp. 2.000.000.000.-	

3. Waktu Penilaian

Penilaian IPP di tahun 2017 mulai bulan Januari 2018 hingga bulan Maret 2018 sementara penilaian IPP di tahun 2018 mulai bulan November 2018 hingga Desember 2018. tahun 2019 waktu penilaian mulai bulan November 2019 hingga Desember 2019 sedangkan tahun 2020 dan 2021 waktu penilaian mulai bulan Januari hingga Desember setiap tahunnya.

Rendahnya nilai Indeks Profesionalitas Pegawai di Tahun 2021 dapat dilihat dari dimensi kompetensi yang paling besar pengaruhnya disusul dimensi kualifikasi pendidikan. pada Tahun 2020 dimensi kompetensi sebesar 9.29% di tahun 2021 sebesar 9.62% dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 masih mengalami pandemi



Covid 19 dimana pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya mengatasi penyebarannya. Hal tersebut berdampak kepada pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang sehingga seluruh kegiatan diklat dibatasi. Dimensi Kompetensi mendapat nilai terendah diantara dimensi lainnya setiap tahun. Rendahnya nilai tersebut dikarenakan alokasi pagu anggaran untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana pada point V Hal Khusus Lainnya nomor 33 dalam lampiran peraturan tersebut pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud. sekurang-kurangnya 0.34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi.

Tabel. 3.105
Indeks Profesionalitas Pegawai sebagai berikut

N O	URAIAN	NILAI	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021
1	Kualifikasi Pendidikan	25	18.75	14.30	18.75	14.18	19.00	14.34
2	Kompetensi	40	30.00	20.55	32.50	9.29	33.00	9.62
3	Kinerja	30	22.50	25.25	22.75	25.30	23.00	25.07
4	Disiplin	5	3.75	5	4	4.99	5	4.99
TOTAL			75.00	65.10	78.00	53.77	80.00	54.02

Upaya yang telah dilakukan BKPSDM untuk mencapai target tersebut. telah dilakukan dengan mengadakan Web Seminar (Webinar) untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Riau melalui Zoom Meeting. Sebanyak 150 pegawai tercatat mengikuti webinar tersebut.

Upaya lain dilakukan oleh BKPSDM dengan mengirim tim untuk mengumpulkan data bagi pegawai yang telah melakukan diklat secara mandiri secara dalam jaringan (daring). Seluruh data diklat tersebut di masukan ke dalam



SILAT serta SAPK BKN sehingga target untuk pembaharuan data yang di minta oleh BKN dapat terealisasi.

Dapat kami sampaikan data analisis efektifitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya pagu anggaran. tidak efisien jika Realisasi Keuangan lebih besar dari Realisasi fisik. begitu juga sebaliknya efisien jika Realisasi Keuangan lebih kecil atau sama dengan Realisasi Fisik:

No	Indikator Kinerja/ Dimensi Penilaian	Program	Kegiatan	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Tingkat Efisiensi
1	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)								
	- Dimensi Kualifikasi Pendidikan	Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	23 Pegawai	Rp. 1.221.745.200	Rp. 979.110.806	80.14%	100 %	Efisien
	- Dimensi Disiplin		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Kasus	Rp. 138.877.000.-	Rp. 95.612.975.-	68.85 %	100 %	Efisien
	- Dimensi Kinerja		Evaluasi Disiplin ASN	12 bulan	Rp. 118.391.300.-	Rp.101.804.332.-	95.99 %	100 %	Efisien
	- Dimensi Kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum. Inti. dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum		Rp. 751.752.400.-	Rp.337.258.095.-	44.86 %	100 %	Efisien
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Rp. 634.622.200.-	Rp. 542.928.871.-	85.55 %	100 %	Efisien
			Pengelolaan Kelembagaan. Tenaga Pengembang Kompetensi. dan Sumber Belajar		Rp. 145.924.600.-	Rp. 88.506.970.-	60.65 %	100 %	Efisien



N o	Indikator Kinerja/ Dimensi Penilaian	Program	Kegiatan	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Tingkat Efisiensi
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. dan Prajabatan		Rp. 2.000.000.000.-	Rp.127.360.9048.-	63.68 %	100 %	Efisien

- **Nilai Hasil Evaluasi SAKIP**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk

Mewujudkan harapan dari reformasi birokrasi tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memasukkan "akuntabilitas" menjadi sasaran strategis pada RPJMD 2016-2021 yakni "Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Nilai Hasil Evaluasi SAKIP".

Tabel. 3.106
Evaluasi Realisasi Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP
Tahun 2020– 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2020	2021
1.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (75.63)	-

Hasil evaluasi atas SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum diterbitkan oleh Kemenpan RI. Sehingga data capaian belum dapat diukur.

Berikut Perbandingan realisasi kinerja nilai e-SAKIP Provinsi Kepri 2021 terhadap target RPJMD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



Tabel. 3.107
Perbandingan Nilai SAKIP Provinsi Kepri Tahun 2021
terhadap Target RPJMD

Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi s.d 2021	Capaian s.d 2021
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB	-	-

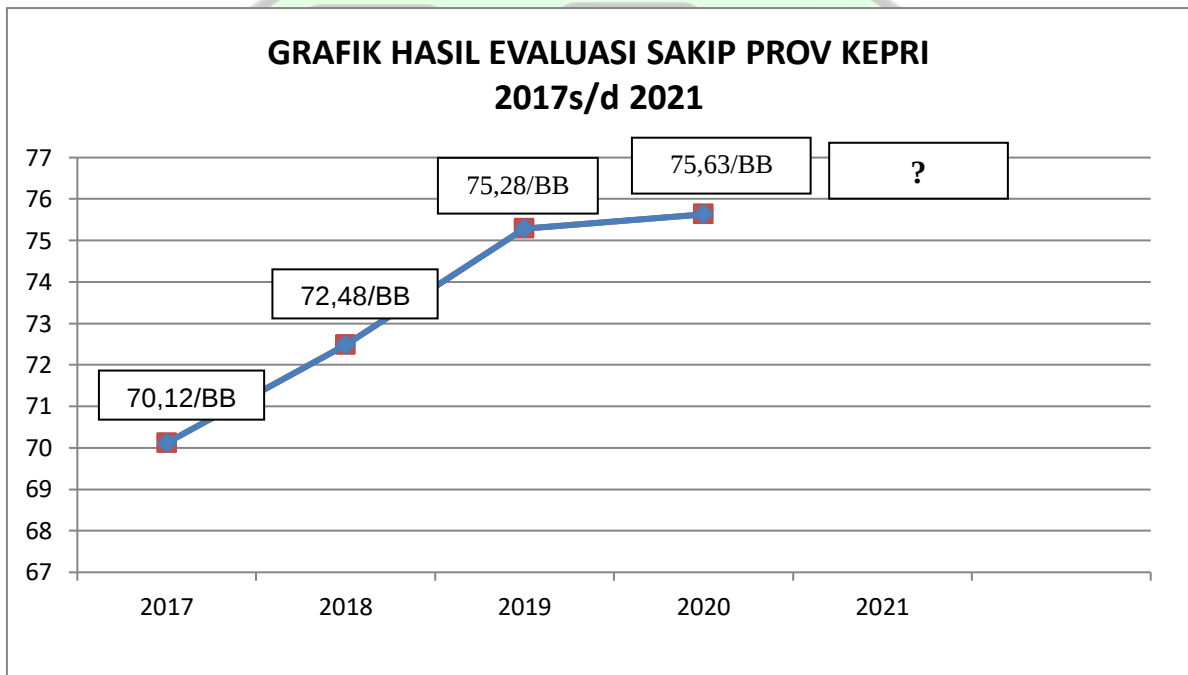
Hasil evaluasi atas SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum diterbitkan oleh Kemenpan RI. Sehingga data capaian belum dapat diukur.

Tabel. 3.108
Hasil Penilaian Komponen SAKIP
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dan 2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	24.95	-
2	Pengukuran Kinerja	25	19.49	-
3	Pelaporan Kinerja	15	11.82	-
4	Evaluasi Internal	10	7.04	-
5	Capaian Kinerja	20	12.33	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75.63	-
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	-

Hasil evaluasi atas SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum diterbitkan oleh Kemenpan RI.

Grafik 3.7
Hasil evaluasi SAKIP Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 s/d 2020



Hasil evaluasi atas SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum diterbitkan oleh Kemenpan RI.

Dalam rangka menunjang pencapaian indikator sasaran dalam RPJMD tersebut. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

1. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Reviu dilaksanakan sebagai amanat dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pasal 41 yang berbunyi "Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a. sebelum disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus direviu terlebih dahulu".

Inspektorat Daerah telah melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor Laporan : LHR-



LAKIP.01/IT-PROV.KEPRI/2020 tanggal 24 Maret 2020. dengan rekomendasi kepada Gubernur untuk memberikan Instruksi kepada:

- Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dan penanggungjawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektifitas dan efisiensi serta memanfaatkan dokumen RPJMD dalam penyusunan RKPd
- Kepala Biro Organisasi dan Korpri Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar dalam penyusunan Laporan kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat terus meningkatkan keandalan data yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun yang akan datang. Khususnya pada Dinas Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pariwisata.
- Seluruh Kepala Perangkat Daerah mengambil tindakan – tindakan dalam rangka perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

2. Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Perangkat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pada tahun 2021, Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada 31 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. dengan rekap hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel. 3.109
Rekapitulasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah
Tahun 2017-2021

No	OPD	NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	68.77	B	75.43	BB	79.85	BB	79.87	BB	78.03	BB



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

No	OPD	NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
2	Sekretariat DPRD Provinsi Kep. Riau	67.61	B	68.14	B	75.64	BB	73.32	BB	72.77	BB
3	Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	72.57	BB	74.03	BB	74.03	BB	76.53	BB	79.97	BB
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	61.38	B	70.22	BB	70.43	BB	72.68	BB	73.51	BB
5	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	59.50	CC	66.18	B	72.35	BB	72.44	BB	72.64	BB
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64.13	B	68.00	B	68.7	B	70.35	BB	71.02	BB
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	67.78	B	76.00	BB	76.69	BB	76.57	BB	76.19	BB
8	Badan Kesbangpol	60.82	B	60.07	B	60.16	B	60.33	B	61.27	B
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.43	CC	60.44	B	70.36	BB	73.1	BB	74.07	BB
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Perumahan	76.61	BB	79.85	BB	74.5	BB	73.45	BB	73.76	BB
11	Dinas Perhubungan	58.60	CC	60.21	B	64.19	B	67.08	B	68.24	B
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan, Pencatatan Sipil	69.85	B	71.08	BB	72.29	BB	72.6	BB	72.59	BB
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	74.93	BB	78.27	BB	73.59	BB	72.16	BB	73.72	BB
14	Dinas Sosial	64.98	B	72.95	BB	74.2	BB	70.53	BB	71.45	BB
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	50.01	CC	63.72	B	67.76	B	66.62	B	68.03	B
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	56.18	C	66.26	B	68.98	B	70.13	BB	74.82	BB
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	62.77	B	67.97	B	70.84	BB	64.61	B	71.31	BB



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

No	OPD	NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
18	Dinas Kebudayaan	62.77	B	72.51	BB	75.8	BB	74.54	BB	75.89	BB
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	61.70	B	68.32	B	68.49	B	71.58	BB	72.02	BB
20	Dinas Pendidikan	74.24	BB	72.04	BB	71.01	BB	72.16	BB	72.99	BB
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57.62	CC	51.41	CC	67.27	B	61.68	B	67.58	B
22	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan	68.56	B	70.17	BB	73.65	BB	73.85	BB	85.91	A
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79.88	BB	74.78	BB	77.1	BB	79.4	BB	72.25	BB
24	Dinas Pariwisata	73.32	BB	80.06	A	80.44	A	80.38	A	76.58	BB
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	56.31	CC	56.31	CC	60.64	B	60.92	B	66.11	B
26	Dinas Koperasi dan UKM	63.01	B	65.59	B	68.54	B	70.11	BB	70.53	BB
27	Dinas Kesehatan	71.43	BB	80.04	A	85.05	A	87.99	A	88.4	A
28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	63.07	B	62.30	B	65.63	B	65.2	B	66.06	B
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.15	B	72.47	BB	72.82	BB	73.53	BB	73.97	BB
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	66.67	B	73.62	BB	73.74	BB	74.36	BB	74.57	BB
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	59.95	CC	60.16	B	60.88	B	68.09	B	69.65	B

Berdasarkan table di atas. diketahui bahwa dari 31 Perangkat Daerah yang di evaluasi. terdapat 2 (dua) perangkat Daerah atau 6.45% yang mendapat nilai A



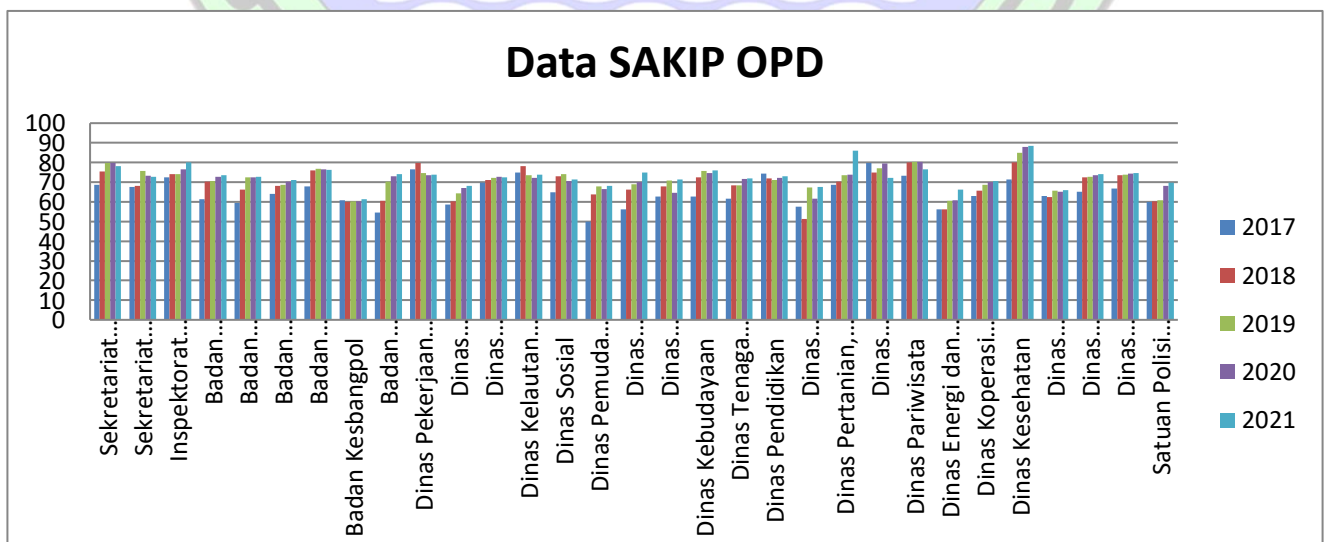
yaitu Dinas Pertanian. Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Kesehatan. Sebanyak 22 Perangkat Daerah atau 70.97% mendapat peringkat BB dan sisanya sebanyak 8 Perangkat Daerah atau 22.58% mendapat peringkat B. Rincian data dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 3.110
Pengelompokan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Tahun 2017 - 2021

OPD mendapat nilai:	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jml OPD yang di evaluasi	%	Jml OPD yang di evaluasi	%	Jml OPD yang di evaluasi	%	Jml OPD yang di evaluasi	%	Jml OPD yang di evaluasi	%
AA (>90-100)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
A (>80-90)	0	0.00	2	6.45	2	6.45	2	6.45	2	6.45
BB (>70-80)	7	22.58	14	45.16	18	58.06	21	67.74	22	70.97
B (>60-70)	16	51.61	13	41.94	11	35.48	8	25.81	7	22.58
CC (>50-60)	7	22.58	2	6.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
C (>30-50)	1	3.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
D (0-30)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Jumlah OPD yang dievaluasi AKIP	31		31		31		31		31	

Grafik perkembangan Nilai evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik . 3.8 Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD





Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	Pengawasan Kinerja	698.371.575.-	675.954.295.-	97%
3	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	40.460.700.-	40.170.600	99%
Jumlah		738.832.275.-	716.124.895.-	98%

- Nilai e-Government

Pencapaian Sasaran "Meningkatnya pengelolaan/penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kepri "dapat diukur dari indikator kinerja nilai e-government dengan menggunakan instrumen SPBE. Pada Tahun 2021 nilai e-government didapat dari hasil penilaian dengan menggunakan instrumen SPBE berdasarkan Permenpan 59 Tahun 2020. Struktur penilaian SPBE dibagi menjadi 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator yang masing-masing diberi bobot.

Berikut adalah tabel hasil evaluasi antara target dan realisasi kinerja tahun 2021:

Tabel. 3.111
Capaian Kinerja Nilai e-government Provinsi Kepri Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai e-government Provinsi Kepri	2.5	1.96	78.4%

Hasil evaluasi SPBE Provinsi Kepri tahun 2021 dengan target sebesar 2.5 dapat terealisasi sebesar 1.96. Nilai ini merupakan hasil evaluasi melalui Keputusan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1503 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada 128 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sehingga capaian kinerja nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebesar 78.4% atau dapat dikatakan dalam **Kategori kinerja Baik**.



Berikut Perbandingan realisasi kinerja nilai e-government Provinsi Kepri Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.112
Perbandingan realisasi kinerja e-government tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai e-government Provinsi Kepri	2.1	2.1	100 %	2.2	2.17	98.6 4%	2.3	2.73	118. 70%	2.4	2.8	116. 67%	2.5	1.96	78.4%

Berdasarkan tabel diatas. dapat dilihat bahwa nilai e-government Provinsi Kepri tahun 2017-2021 mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2021. dan peningkatan nilai di tahun 2019 dan 2020.

Berikut Perbandingan realisasi kinerja nilai e-government Provinsi Kepri 2021 terhadap target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.113
Perbandingan Nilai e-government Provinsi Kepri Tahun 2021 terhadap Target RPJMD

NO	Indikator kinerja	Target RPJMD	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Nilai e-government provinsi kepri	2.5	1.96	78.4%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja nilai e-government Provinsi Kepri realisasi kinerja dibandingkan dengan target RPJMD adalah 1.96%.

Berikut Perbandingan realisasi kinerja nilai e-government Provinsi Kepri 2021 terhadap indeks SPBE Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.114
Perbandingan Nilai e-government Provinsi Kepri Tahun 2021 terhadap Rata-Rata Nasional

NO	Indikator kinerja	Rata Nasional	Realisasi kinerja	Capaian kinerja
1	Nilai e-government provinsi kepri	2.24	1.96	87.5%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja nilai e-government Provinsi Kepri dibandingkan dengan target nasional adalah 87.5%. Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepri masih dibawah Rata-Rata Nasional.

> Permasalahan yang dihadapi

Nilai e-government Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 menurun dikarenakan ada perubahan indikator penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dari sebelumnya 3 domain tata Kelola. 7 aspek dan 35 indikator menjadi 4 domain tata kelola. 8 aspek dan 47 indikator penilaian. Penurunan nilai SPBE ini bukan saja di alami oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetapi hampir seluruh Kementerian. Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap pelaksanaan e-government sebagai bahan evaluasi pelaksanaan di tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya kebijakan regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan e-government;
- Belum adanya Rencana Induk TIK dan arsitektur SPBE;
- Penerapan e-government pada institusi pemerintahan tidak maksimal karena terbatasnya tenaga ahli atau SDM yang kompeten di bidang teknik informatika;
- Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan juga menjadi kendala dalam penerapan e-government;
- Sistem keamanan informasi saat ini belum optimal. sehingga sangat rawan diretas saat menerapkan e-government;
- Belum memiliki proses bisnis yang terintegrasi;
- Terbatasnya anggaran untuk belanja TIK;
- Aplikasi SPBE di lingkungan pemprov kepri tersebar dan beragam. dan data tidak terintegrasi;
- Belum memiliki Road Map SPBE.

> Solusi/saran perbaikan

Terhadap permasalahan diatas perlu dilakukan solusi penyelesaian sebagai berikut:

- Perlu dibuat regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Perlu disusun Rencana Induk TIK yang mengacu pada Rencana Induk Nasional;
- Untuk meningkatkan SDM perlu dilakukan pelatihan/bimbingan teknis tentang TIK;
- Perlu dilakukan untuk integrasi data untuk pertukaran data satu sama lain;
- Perlu dilakukan peningkatan keamanan informasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti virus dan hacker;
- Menyusun proses bisnis yang terintegrasi dan roadmap;
- Tersedianya anggaran belanja TIK yang terdokumentasi;
- Membentuk tim koordinasi. pengelola e-government.

> Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran

Pencapaian sasaran "Meningkatnya pengelolaan/penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kepri" ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan hasil capaian indikator kinerja masing-masing sebagai berikut :

Tabel. 3.115
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya pengelolaan/penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kepri"

NO	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Kegiatan. perangkat daerah. dan pelayanan yang diselenggarakan secara dari dengan memanfaatkan domain dan sub domain	Kegiatan	178	178	100



2	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OPD	34	38	111.76
3	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan @dinas kominfo	paket	35	41	117.14
4	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pemeliharaan jaringan internet	paket	31	34	109.68
5	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan SPBE	12	12	100
6	Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	aplikasi	12	12	100
7	Jumlah laporan evaluasi SPBE	laporan	1	1	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran diperoleh gambaran sebagai berikut :

- Kegiatan pengelolaan domain dan sub domain merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Diskominfo sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo. Pelayanan publik, kegiatan dan perangkat daerah harus menggunakan nama domain pemerintah daerah yang resmi. Pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa pemanfaatan/penggunaan domain/sub domain untuk kegiatan (event) tingkat provinsi belum optimal, belum semua perangkat daerah yang



menggunakan sub domain. demikian juga dengan layanan publik belum semuanya menggunakan sub domain resmi.

- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana jaringan TIK adalah penyediaan bandwidth internet untuk diakses oleh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Pada tahun 2021 jumlah OPD yang menggunakan akses internet yang disediakan oleh Kominfo sebanyak 38 OPD. Dinas Kominfo belum sepenuhnya dapat menyediakan akses internet untuk 41 OPD.
- Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan TIK adalah penyediaan pemeliharaan jaringan TIK. Pada Tahun 2021 pemeliharaan jaringan TIK disediakan untuk 34 OPD.
- Kegiatan Pengembangan Sistem informasi publik dan pemerintahan merupakan kegiatan untuk mengembangkan atau membangun aplikasi yang akan digunakan oleh public maupun pemerintah. Pada tahun 2021 jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan sebanyak 12 aplikasi.
- Kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan secara mandiri oleh tim evaluator internal pemerintah daerah dan kemudian akan dievaluasi oleh Tim Kementerian PAN RB. Evaluasi SPBE Tahun 2021 sudah dilaksanakan.

Berikut realisasi anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran kinerja nilai e-government Provinsi Kepri 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.116
Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk
Pencapaian Sasaran

No	Program/kegiatan	Pagu anggaran	Realiasi anggaran	%
I	Program e-government	7.609.092.355	7.551.562.355	99.24
1	Pengelolaan Domain dan Sub Domain	33.653.500	33.505.100	99.56
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Jaringan TIK	4.929.570.400	4.927.564.627	99.96
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan TIK	1.584.704.255	1.550.768.279	97.86
4	Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Pemerintahan	1.040.160.000	1.018.893.816	97.96
5	Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	21.004.200	20.830.533	99.17



> REALISASI ANGGARAN

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa dari 16 sasaran mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Berikut Capaian kinerja dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang di alokasi untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA				ANGGARAN			
		Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% EFISIENSI	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Kekayaan Budaya Daerah	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu (%)	70.75	28.89	40.83	6.440.516.632	5.098.074.336	79.16 %	Efisien
2	Meningkatkan Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persentase jalan provinsi berondisi baik (%)	75.00	76.38	101.83	Rp 56.999.603.533	Rp 55.142.415.000	96,7	Efisien
3	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut (%)	100	100	100	11.091.115.790.00	6.753.721.287.22	60.89	Kurang Efisien
4	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih	Persentasi pelayanan akses air bersih yang aman (%)	100	92.77	92.77	Rp 2.706.500.000.-	Rp 1.540.750.524,23.-	56,93%	Kurang Efisien
5	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi (%)	94.50%	94.50%	100.00	Rp 5.420.447.668	Rp 5.111.288.997.98	94.30	Efisien
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata – Rata Lama Sekolah	10.41	10.18	97.79	401.994.678.112	368.923.973.576	91.8%	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.6	9.91	49.85	6.781.228.850	6.463.661.917	95.317	Efisien
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Anak Balita	16.2	13.4	117	1.560.455.400	1.193.504.235	76.5	Efisien
9	Angka Kemiskinan Menurun	Persentase Penduduk Miskin	5.68%	5.75%	98.77%	3.579.102.987	3.408.690.254	95.24%	Efisien
10	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65	62.02	95.42	4.044.538.134	3.652.998.626	90,32	Efisien
11	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	306.463.67	302.662,68	83.54	Rp 22.269.949.780	Rp 21.536.919.780	96.71	Efisien



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

12	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta)	2.500.000	3.103	0.12	17.834.774.300.-	16.514.121.535.-	92.60	Efisien
13	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing Koperasi dan UKM	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) (Rp Milyar)	8.100	15.237	188	924.861.400	797.087.328	86,18	Efisien
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp Milyar)	900	9.768	1.085				
14	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8.25	8.15	98.79	3.147.954.631.-	2.971.471.271.-	94.39	Efisien
15	Berkurangnya Kerusakan Lingkungan. Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	10.99%	16.27%	148.04 %	Rp 170.000.000.-	Rp 169.973.000.-	99.88%	Efisien
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai	80	54.02	67.52	7.661.639.050.-	5.353.471.920.-	69.87	Efisien
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB			738.832.275.-	716.124.895.-	98%	Efisien
		Nilai e-Government	2.5	1.96	78.4	7.609.092.355	7.551.562.355	99.24	Efisien





BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, memuat pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yang penyusunannya berdasarkan perjanjian kinerja perubahan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2021 namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya terhadap pencapaian RPJMD, Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai, meskipun capaian tersebut mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 yang melanda secara global termasuk di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum, nampak kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah sangat baik, karena dari 19 indikator sejumlah 10 indikator memenuhi kriteria sangat baik, 4 indikator berkriteria baik, 4 indikator berkriteria kurang, 1 indikator berkriteria Nol (belum ada nilai).

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dari IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Provinsi Kepulauan Riau, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut :

1. Aspek Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat

Mengupayakan penurunan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan ekonomi produktif bagi fakir miskin, bantuan usaha kelompok usaha bersama (KUBE), serta bantuan keluarga harapan (PKH).

2. Aspek Pelayanan Umum

Lebih meningkatkan pelayanan dasar kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan pada daerah yang belum terjangkau layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, dan pelabuhan sebagai sarana prasarana perekonomian rakyat, peningkatan pemenuhan ketersediaan air bersih, listrik dan pelayanan sanitasi.

Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan peningkatan sarana belajar mengajar yang memadai dan merata di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Mengupayakan peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata ditengah pandemi covid-19 ini dengan menerapkan CHSE penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keamanan), dan Environment Sustainability (kelestarian lingkungan), meningkatkan mutu calon tenaga kerja dalam menghadapi peluang usaha yang tersedia dengan didukung program pemberdayaan masyarakat, pengembangan produktifitas pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

Selain aspek tersebut diatas, agar tetap memperhatikan aspek penting lainnya antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang

telah ditetapkan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan.

2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perencanaan SKPD dengan merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja yang menunjukkan hasil (outcome).

Akhirnya segenap aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja masa yang akan datang.





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

Lampiran I : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Kekayaan Budaya Daerah	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	70,75	28,89	40,83	Kurang
2	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Provinsi Berkondisi Baik	75,00	76,39	101,83	Sangat Baik
3	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi	Persentase Ketersediaan Pelabuhan Laut	100	100	100	Sangat Baik
4	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih	Persentase Pelayanan Akses Air Bersih yang Aman	100	92,77%	92,77%	Sangat Baik
5	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	94,50	94,50%	100%	Sangat Baik
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10,41	10,18	97,79	Baik
7	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,60%	9,91	49,84	Kurang
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) Pada Anak Balita	16,2	13,4	117	Sangat Baik
9	Angka Kemiskinan Menurun	Persentase Penduduk Miskin	5,68	5,75%	98,77%	Sangat Baik
10	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65	62	95,42	Baik
11	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	306,463.67	302.662,68	83,54	Sangat Baik
12	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2,5	3.103	0,12	Kurang
13	Meningkatnya Realisasi Investasi dan daya saing Koperasi dan UKM	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	8.100	15.237	188	Sangat Baik
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	900	9.768	1.085	Sangat Baik



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian Kinerja
14	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,25	8,15	98,79	Baik
15	Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	10,99	16,27	148,04	Sangat Baik
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai	80	54,02	67,52	Kurang
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB			
		Nilai E- Government	2,5	1,96	78,40	Sangat Baik





Lampiran II : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

**DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Indeks Pembangunan Ketenaga Kerjaan
3. Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
4. Pengelola Program Tuberkulosis Terbaik
5. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) T.A 2021 sampai dengan Triwulan III Kategori Kantor Daerah Dekonsentrasi (DK) (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau)
6. Penyampaian LPJ Bendahara Akurat dan Tepat Waktu Triwulan I TA 2021 Kategori Uang Persediaan diatas 200.000.000 s.d 1.000.000.000 (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau)
7. Penyampaian LPJ Bendahara Akurat dan Tepat Waktu Triwulan III TA 2021 Kategori Uang Persediaan lebih dari Rp 200.000.000
8. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak
9. Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi Penerima Anugerah Parahita Ekapraya
10. Penghargaan Atas Prestasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Predikat Nilai B
11. Penghargaan Auntabiliitas Kinerja Dengan Predikat Nilai "BB"
12. Sekolah Adiwiyata Nasional / SDN 003 Kundur Utara
13. Sekolah Adiwiyata Nasional / SMA 1 Teluk Sebung Kabupaten Bintan
14. Penghargaan Atas Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meraih PREDIKAT "Kepatuhan Tingkat Tinggi" Standar Pelayanan Publik
15. Penghargaan Atas Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Provinsi Terbaik Dalam Kepenyiaran Kategori Khusus Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
16. Proses dengan Izin Jarimu sebagai Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik